



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 16 TAHUN 2013**

Tentang

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2005 - 2025**

Tahun 2014

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	Halaman
1.1.	LATAR BELAKANG	1
1.2.	DASAR HUKUM PENYUSUNAN	5
1.3.	HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA	8
1.4.	SISTEMATIKA PENULISAN	11
1.5.	MAKSUD DAN TUJUAN	11
BAB II	GAMBARAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO	
2.1.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	13
2.1.1	Karakteristik Wilayah	13
2.1.2	Potensi Penggunaan Lahan	14
2.1.3	Wilayah Rawan Bencana.....	17
2.1.4	Demografi.....	20
2.2.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	22
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	22
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	28
2.2.3	Fokus Adat, Seni, Budaya, dan Olahraga.....	33
2.2.4	Fokus Pengalaman Ajaran Agama.....	35
2.3.	ASPEK PELAYANAN UMUM.....	38
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Wajib.....	38
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	77
2.4.	ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	84
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	84
2.4.2	Fokus Iklim Berinvestasi.....	88
2.4.3	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	94
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia.....	104
BAB III	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	106

3.1.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	106
3.2	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	119
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH.....	127
4.1	Visi.....	127
4.2	Misi.....	130
BAB V	ARAH KEBIJAKAN.....	135
5.1	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.....	135
5.2	Tahapan dan Prioritas.....	141
BAB VI	KAIDAH PELAKSANAAN.....	193

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pembangunan daerah yang demokratis, efektif, terarah dan berkelanjutan, diperlukan adanya koridor perencanaan pembangunan di daerah. Koridor perencanaan tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah jangka panjang dan terbagi kedalam beberapa tahapan perencanaan jangka menengah. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara dan Evaluasi Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah pasal 1 dan pasal 4, dan secara lebih teknis dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 pasal 1, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Penyusunan RPJPD Kota Sawahlunto dilakukan melalui beberapa tahapan serta perumusannya berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan aspirasi dan keinginan masyarakat diantaranya dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing – masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Tahapan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) diawali dengan persiapan penyusunan, rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan

rancangan akhir serta penetapan perda.

Dalam upaya menjamin keberlanjutan pembangunan daerah 2005 – 2025 maka peran RPJPD menjadi sangat penting bagi suatu daerah, diantaranya:

- a) Meningkatkan pelaksanaan koordinasi antar pelaku pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah,
- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah pusat dan daerah,
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
- d) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Kota Sawahlunto dengan luas daerah 273,45 Km², merupakan daerah yang sedang mengalami transisi perekonomian. Sebelum tahun 2000, Kota Sawahlunto merupakan sebuah kota di Sumatera Barat dengan roda perekonomian masyarakat bergantung dari sektor batubara yang sudah berlangsung lebih dari satu abad lamanya. Setelah batubara sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tersebut kian menipis dan tidak lagi memberikan harapan sepenuhnya seperti masa lalu, menyebabkan penduduk kehilangan sumber pendapatan utama. Kota Sawahlunto pun terancam menjadi kota mati, sedangkan kehidupan kota dengan segala pendukungnya mesti terus berlanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah kota bersama stake holder kota telah merancang strategi lain yaitu dengan menjadikan Kota Sawahlunto sebagai kota wisata dengan menonjolkan dua potensi wisata

yang menjadi kekuatannya, wisata tambang dan wisata heritage. Memanfaatkan berbagai obyek bekas tambang serta peninggalan bangunan Belanda yang memiliki nilai historis menjadikan Kota Sawahlunto menjadi kota yang unik, apalagi keberadaan masyarakat multi etnis membuat daerah ini berbeda dengan daerah lain.

Pemerintah Kota dan DPRD bersama stakeholder kota merumuskan Visi Kota Sawahlunto yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 yaitu “Kota Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya”.

Setelah lebih dari sepuluh tahun berjalan, keberhasilan pembangunan di Kota Sawahlunto dengan berbasiskan ekonomi, sosial dan pariwisata sudah memperlihatkan hasil yang signifikan. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai PDRB dari 518 milyar rupiah pada tahun 2003, menjadi 1.425,28 miliar rupiah tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi juga memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan, dari -1.52 % tahun 2003, menjadi 5,98 % pada tahun 2012. Keberhasilan lainnya disektor pariwisata adalah peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung mencapai 746.071 orang tahun 2012. Di sektor Kesehatan, lama angka harapan hidup masyarakat Kota Sawahlunto sebesar 71.86 tahun tertinggi di Sumatera Barat. Di sektor Pendidikan, tahun 2012 siswa SMA Kota Sawahlunto yang lulus di Perguruan tinggi favorit mencapai 61,25 % dan siswa SMK 9,20 %. Angka kemiskinan tahun 2012 hanya 2,17% terendah di Sumatera Barat.

Ditengah ketatnya persaingan di era globalisasi ini, serta kebutuhan penduduk yang semakin tinggi, untuk tetap melanjutkan pembangunan di Kota Sawahlunto menjadi suatu kesinambungan, dibutuhkan perencanaan

yang strategis, sistematis dan terstruktur untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan ini akan diimplementasikan dalam realisasi pembangunan secara infrastruktur, sarana, prasarana, dan pembangunan sosial ekonomi lainnya. Perencanaan pembangunan jangka panjang ini selanjutnya dijadikan landasan bagi penyusunan tahapan pembangunan lima tahunan, yaitu periode 2005 – 2008; 2008–2013; 2013–2018; 2018–2023; dan 2023–2025 serta menjadi arah bagi para calon kepala daerah dalam merumuskan visi misi 5 (lima) tahunan. RPJPD yang ditetapkan melalui peraturan daerah mengikat seluruh komponen masyarakat Kota Sawahlunto, baik itu pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat umum lainnya.

Kedudukan RPJPD dalam perencanaan pembangunan sangat penting dan strategis, karena ketiadaan dokumen RPJPD akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap arah dan sasaran pokok pembangunan dimasa 20 tahun mendatang, sekaligus sulit untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari setiap periode pemerintahan. Selain itu, untuk merumuskan tahapan rencana pembangunan lima tahunan maupun tahunan jika tidak ada landasan pijakannya, akan menyebabkan pembangunan terkesan tidak pernah selesai. Substansi RPJPD Kota Sawahlunto memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah selama 20 tahun kedepan. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang dilaksanakan melalui beberapa misi dan dijabarkan melalui berbagai strategi serta arah kebijakan pembangunan. Perumusan dan penyusunan RPJPD menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis serta top-down dan bottom-up.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto tahun 2012-2032

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sawahlunto dalam kurun waktu 20 tahun. Penyusunannya mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat serta dalam penyusunannya memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera

Barat dan RTRW daerah tetangga lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Kota Sawahlunto dalam jangka panjang, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kota Sawahlunto. RPJPD kota Sawahlunto berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, bagi Pemerintah Kota Sawahlunto, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pelaku bisnis dan sektor swasta serta seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keserasian pembangunan dan kemajuan kota di segala bidang.

Secara hubungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. RPJPD Kota Sawahlunto 2005–2025 disusun mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025. Keterkaitan dengan RPJPD Kota Sawahlunto disamping dengan dokumen lainnya, adalah guna memahami posisi kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional dan menyelaraskan antara visi, misi arah dan kebijakan pembangunan serta tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang sehingga muatan RPJPD Kota Sawahlunto tercipta sinkronisasi dan sinergi baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun arah pembangunan dengan tetap memperhatikan visi dan misi RPJP Nasional 2005-2025, dengan harapan akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
2. RPJPD Kota Sawahlunto 2005–2025 disusun mengacu pada RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, yang merupakan pola dasar utama yang

tidak terpisahkan dari visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2005-2025. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi Sumatera Barat tersebut ditempuh melalui 5 (Lima) misi pembangunan yaitu :

- a. Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*",
 - b. Mewujudkan sistem hukum dan tata-pemerintahan yang baik,
 - c. Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,
 - d. Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,
 - e. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.
3. RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025 disusun berpedoman dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Barat, RTRW Kota Sawahlunto serta RTRW daerah lainnya, mempunyai kepentingan saling terkait, agar penyusunan kebijakan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan RPJPD Kota Sawahlunto
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Dokumen Satu Tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk

Skala Daerah, dan Renja SKPD

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I

PENDAHULUAN,

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH,

BAB III

ANALISIS ISU-ISU TRATEGIS,

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH,

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH,

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN,

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005–2025 ditetapkan dengan maksud untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan masyarakat serta sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Sawahlunto.
2. Menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta

penggunaan sumber daya secara efisien.

3. Menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat.
4. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, melalui rangkaian kegiatan secara terpadu dan terarah sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan indikasi yang ditetapkan.

RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 bertujuan untuk:

1. Memberikan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk periode 20 Tahun kedepan. Sekaligus, sebagai acuan bagi seluruh komponen kota sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, dalam tatanan masyarakat yang mandiri, bebas, maju dan sejahtera lahir batin.
2. Mendukung koordinasi dan saling melengkapi antar pelaku pembangunan Kota Sawahlunto, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat, menjamin penggunaan sumber daya Kota Sawahlunto secara efektif, efisien, berkeadilan, adil, transparan, akuntabel, partisipatif, kedilan sosial dan berkelanjutan, serta menjaga kesinambungan pembangunan di Kota Sawahlunto.

BAB. II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan regional maupun nasional, merupakan upaya berkelanjutan menuju perubahan yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas manusia khususnya masyarakat Kota Sawahlunto sesuai potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global.

Perencanaan pembangunan jangka panjang didasarkan pada analisis terhadap kondisi awal perencanaan, kajian atas tantangan yang akan dihadapi selama jangka waktu perencanaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Wilayah

Kota Sawahlunto di kenal sebagai kota tambang dengan luas wilayah sebesar 27.345 ha atau 273,45 km², secara administrasi terdiri dari 4 kecamatan, 10 kelurahan dan 27 desa.

Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Silungkang dengan luas 32.93 km² sedangkan kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas 99.39 km², selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
Kecamatan Silungkang	32,93
Kecamatan Lembah Segar	52,58
Kecamatan Barangin	88,55
Kecamatan Talawi	99,39
Jumlah	273.45

Sumber: BPS Tahun 2012

Secara Geografis Kota Sawahlunto berada pada posisi koordinat antara 100.41 dan 100.49 Bujur Timur, 0.34 - 0.46 Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Solok
- Sebelah Timur : dengan Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Barat : dengan Kabupaten Solok.

2.1.2 Potensi Penggunaan Lahan

a. Topografi dan Morfologi

Secara topografi wilayah Kota Sawahlunto terletak di perbukitan dengan ketinggian antara 250-650 meter dari permukaan laut, terbentang dari utara ke selatan. Bagian timur dan selatan memiliki topografi yang relative curam dengan kemiringan lebih dari 40%, yang keseluruhan luasnya mencapai 28,52% dari luas wilayah kota, sedangkan bagian utara bergelombang dan relatif datar, selengkapnya kelerengan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Kelerengan Lahan di Kota Sawahlunto

Kecamatan	Luas Lahan Dengan Kelerengan (Ha)					Jumlah (Ha)
	0 – 2%	2 – 15%	15 – 25%	25 – 40%	> 40%	
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653	9.939
Barangin	343	1.514	1.432	3.450	2.136	8.855
Lb. Segar	240	358	694	1.836	2.110	5.258
Silungkang	29	288	735	340	1.901	3.293
Jumlah	1.603	3.580	5.541	8.821	7.800	27.345

Sumber: BPN Kota Sawahlunto

b. Geologi dan Jenis Tanah

Kota Sawahlunto terletak di atas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman yang diberi istilah kala (epoch) Eocen sekitar 40 – 60 juta tahun yang lalu, serta berada di cekungan pra-tercier Ombilin yang berbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 km dan Panjang 47,00 km. Dalam cekungan ini diperkirakan 2,00 km, diisi oleh lapisan yang muda yang disebut dengan Formasi Brani, Formasi Sangkarewang, Formasi Sawahlunto, Formasi Sawah Tambang dan Formasi Ombilin. Formasi Ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman tersier atau berumur sekitar 2 juta tahun.

c. Iklim dan Meteorologi

Secara umum suhu rata-rata di Sumatera Barat tercatat antara 22°-28°C sedangkan perbedaan antar temperatur siang dan malam antara 5°-7°C, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Kota Sawahlunto berkisar antara 22°-28°C.

Peta Curah Hujan Indonesia memberikan gambaran bahwa Kota Sawahlunto berada di dalam isohyat (garis curah hujan) antara 1.500 – 2.000 mm per tahun dengan rata-rata curah hujan per tahunnya sebesar 1.716,37 mm dengan rata-rata hari hujan 130 hari.

d. Hidrologi dan Sumber Daya Air

Kota Sawahlunto dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) INDRAGIRI yang terdiri dari 5 (lima) buah sungai atau batang utama yaitu:

- *Batang Ombilin*

Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar yang mengalir dari utara ke selatan dari Desa Talawi Mudik ke Desa Rantih Kecamatan Talawi. Sungai ini berhulu dari Danau Singkarak dan bermuara di Batang Kuantan Riau, dengan debit sungai di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 m³/detik.

- *Batang Malakutan*

Sungai ini mengalir dari barat yang berhulu di Desa Siberambang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok ke timur melewati Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin.

- *Batang Lunto*

Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah barat menuju timur dan membelah kota dan bermuara di Batang Ombilin.

- *Batang Sumpahan*

Sungai ini berhulu di Kubang Utara Sikabu di Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin.

- *Batang Lasi*

Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan Nasional Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang, dan keluar di perbatasan Kota Sawahlunto – Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Sungai Kuantan atau Indragiri.

e. Air Tanah

Keberadaan air tanah terbatas pada kedalaman dibawah 400 m sementara celahan batuan batu pasir penyusun Formasi Sawah Tambang dan Formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan adanya lapisan pembawa air sehingga potensi air tanah sangat kecil.

f. Mata Air

Mata air ini muncul pada lereng bukit, dimana debit kurang dari 2 lt/detik terdapat di Sikalang, yang mengalir sepanjang tahun, sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai salah satu sumber air bersih penduduk setempat dan PDAM. Mata air lain dijumpai ke arah tenggara Sawahlunto di Bukit Sibantar Desa Sikalang, sementara itu sumber mata air dengan debit cukup besar yaitu lebih 5 lt/detik dan mengalir sepanjang musim terdapat di Desa Balai Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih Kota Sawahlunto.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi, litologi, struktur geologi (patahan) kemiringan lereng, geomorfologi, air

tanah dan daya dukung tanah. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa bencana alam yang sering terjadi berupa tanah longsor dan patahan (sesar).

Morfologi dan kemiringan lereng dapat menentukan potensi tingkat bahaya bencana gempa bumi dan longsor. Pertambangan batubara yang ada berperan cukup besar dalam pembentukan bentang alam atau morfologi saat ini sehingga sewaktu waktu bentang alam tersebut berubah setiap saat terutama dalam kemiringan lerengnya.

- *Struktur Geologi (Patahan)*

Di Sawahlunto terdapat dua buah sesar geser yaitu sesar geser Sawahlunto dan sesar geser Batu Tajam berarah barat laut - tenggara, mengikuti arah sesar besar Sumatera, jalur kedua sesar tersebut berada di daerah pebukitan sebelah barat daya jalan raya Sawahlunto-Santur.

Secara regional struktur geologi yang berkembang di cekungan Ombilin berarah barat laut-tenggara dan timur laut - barat daya, baik itu berupa sesar/patahan maupun perlipatan. Cekungan Ombilin ini terbagi menjadi dua bagian oleh sesar normal Tanjung Ampalu/sesar Pamuatan yaitu bagian timur merupakan blok yang turun (mengarah kebawah) sedangkan bagian barat yaitu daerah Sawahlunto dan sekitarnya merupakan blok yang relatif naik.

Sesar turun Ombilin terlihat pada kontrol arah aliran Sungai Ombilin yaitu Barat Laut-Tenggara, sedangkan sesar turun lainnya yaitu sesar Padang Malintang, sesar Batukunit, Sesar Sugar, Sesar Salak dan Sesar Sipang berarah Timur Laut-Barat Daya.

Berdasarkan analisa struktur mikro yaitu dengan pengamatan langsung dilapangan menunjukkan adanya bidang sesar (gores garis) dan arah kekar/retakan yang dapat memberikan petunjuk arah umum dan jenis patahan. Sedangkan identifikasi adanya seretan (*drag fold*) akibat patahan dengan skala kecil, terlihat pada pemotongan tebing-tebing jalan raya propinsi, jalan raya kota dan jalan desa, serta dalam skala besar seretan pebukitan.

Beberapa sesar geser (*thrust fault*) diantaranya adalah sesar Sawahlunto merupakan sesar utama (orde pertama) yang berarah Barat Laut - Tenggara dan Sesar Sugar berarah Utara Selatan telah mempengaruhi pola aliran sungai Batang Lunto, sedangkan sesar Padang Malintang dan sesar Parambahan telah mempengaruhi pola aliran sungai Batang Ombilin dan anak-anak sungainya yang membentuk pola aliran Sungai Menangga (*trellis*).

- *Gerakan Tanah atau Longsoran (Mass Movement).*

Berdasarkan data, informasi, dan kenampakan di lapangan daerah Kota Sawahlunto dan sekitarnya kendala geologi yang dominan umumnya berupa bencana alam yang disebabkan oleh proses bersifat alami, seperti gerakan tanah, zona lemah patahan dan erosi. Lebih lanjut, kendala geologi yang berupa bahaya lingkungan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

Longsoran tanah tipe rayapan terjadi yang menyeret jalan Santur - Talawi atau tepatnya disekitar Washing Plant Sawah Rasau V pada km.7, terjadi pada lapisan batulempung (Formasi Sawahlunto) disebabkan karena kestabilan lereng bagian bawah terganggu oleh erosi Sungai Lurah Gadang.

- *Gempa Bumi*

Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi yaitu gempa bumi. Kegempaan di Daerah Cekungan Ombilin berdasarkan catatan episenter (pusat gempa) dengan radius 400 km dari Kota Sawahlunto dari tahun 1973 sampai tahun 1999 telah terjadi sebanyak 420 kali kejadian gempa bumi. Dari catatan gempa bumi tersebut menunjukkan bahwa daerah Sawahlunto dan sekitarnya banyak terjadi gempa bumi dangkal yang rata-rata mempunyai kedalaman 33 km, dengan intensitas antara 4,5 sampai 5,5.

Berdasarkan atas Peta Zonasi gempa-gempa yang bersifat merusak di Indonesia, menunjukkan posisi wilayah Ombilin atau Sawahlunto berada pada zone 3 dan 4 dengan besaran intensitas berkisar antara 0,13 - 0,25 g. Bencana alam geologi merupakan peristiwa alam dimana proses terjadinya merupakan bagian dari dinamika bumi baik itu kaitannya secara langsung yaitu berupa pergerakan patahan/sesar maupun gempabumi, sedangkan yang tidak langsung berupa gerakan tanah/ longsoran.

2.1.4 Demografi

Dengan luas wilayah Kota Sawahlunto sekitar 273,45 km², kepadatan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2012 adalah sebanyak 212,35 jiwa/km². Berikut perbandingan tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan pada tahun 2002 sampai tahun 2012 :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
menurut Kecamatan Tahun 2008 – 2012

No	Kecamatan	Rincian	TAHUN				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Talawi	Jumlah Penduduk	17.237	17.388	17.683	17.945	18.143
		- Laki-laki	8.731	8.801	8.885	9.017	9.117
		- Perempuan	8.506	8.587	8.798	8.928	9.026
		Luas wilayah	99,39	99,39	99,39	99,39	99,39
		Kepadatan	173,43	174,95	177,92	180,55	182,54
2	Barangin	Jumlah Penduduk	16.158	16.304	16.912	17.174	17.377
		- Laki-laki	7.942	8.020	8.338	8.457	8.547
		- Perempuan	8.216	8.284	8.574	8.717	8.830
		Luas wilayah	88,55	88,55	88,55	88,55	88,55
		Kepadatan	182,47	184,12	190,99	193,95	196,24
3	Lembah Segar	Jumlah Penduduk	12.034	12.044	12.145	12.150	12.111
		- Laki-laki	5.839	5.851	5.881	5.876	5.849
		- Perempuan	6.195	6.193	6.264	6.274	6.262
		Luas wilayah	52,58	52,58	52,58	52,58	52,58
		Kepadatan	228,87	229,06	230,98	231,08	230,33
4	Silungkang	Jumlah Penduduk	9.484	9.555	10.126	10.298	10.437
		- Laki-laki	4.533	4.569	5.057	5.158	5.243
		- Perempuan	4.951	4.986	5.069	5.140	5.194
		Luas wilayah	32,93	32,93	32,93	32,93	32,93
		Kepadatan	288,00	290,16	307,50	312,72	316,95
5	Kota Sawahlunto	Jumlah Penduduk	54.913	55.291	56.866	57.567	58.068
		- Laki-laki	27.045	27.241	28.161	28.508	28.756
		- Perempuan	27.868	28.050	28.705	29.059	29.312
		Luas wilayah	273,45	273,45	273,45	273,45	273,45
		Kepadatan	200,82	202,20	207,96	210,52	212,35

Sumber : BPS Kota Sawahlunto tahun 2012

Berdasarkan data diatas kecenderungan setiap kecamatan mengalami peningkatan kepadatan penduduk setiap tahunnya dengan kepadatan yang relative masih sangat rendah. Namun jika dibandingkan dengan luas wilayah kota yang memiliki kelerengan relatif landai, maka angka kepadatan akan meningkat karena hanya 39,2% wilayah yang memiliki kelerengan dibawah 25%.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Kriminalitas yang Tertangani

Perkembangan jumlah kasus pelanggaran hukum yang terselesaikan di kota Sawahlunto dari tahun 2009 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum
Tahun 2009-2012

No	Jenis Pelanggaran hukum	Jumlah perkara Dilaporkan				Jumlah Perkara tersisa				Jumlah Perkara Terselesaikan			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
1.	Pidana	24	88	97	109	10	10	13	18	14	78	84	91
2.	Perdata	2	10	16	8	0	5	1	6	2	5	15	2
3.	Politik dan Ham	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Lalu Lintas	65	1050	1438	1269	0	0	0	0	65	1050	1438	1269
5.	Tata Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Sawahlunto Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa Tahun 2012 jumlah perkara pidana yang dilaporkan 109 perkara, yang terselesaikan 91 perkara, pelanggaran lalu lintas 1269 perkara yang terselesaikan 1269, Perkara Perdata sebanyak 8 perkara terselesaikan 2 perkara, dengan

demikian setiap tahun perkara yang terselesaikan berada pada kisaran 90%.

2.2.1.2 Pertumbuhan PDRB

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun,

Berikut adalah nilai dan kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB Kota Sawahlunto yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) periode 2008-2012:

Tabel. 2.5
Perkembangan PDRB 2008-2012
(Rp.Juta)

No	Tahun	PDRB	
		Nilai	Pertumbuhan (%)
1	2008	861.957	13,97
2	2009	984.253	14,19
3	2010	1.121.634	13,98
4	2011	1.274.070	13,59
5	2012	1.425.280	11,87

Sumber: SDA, 2012, BPS

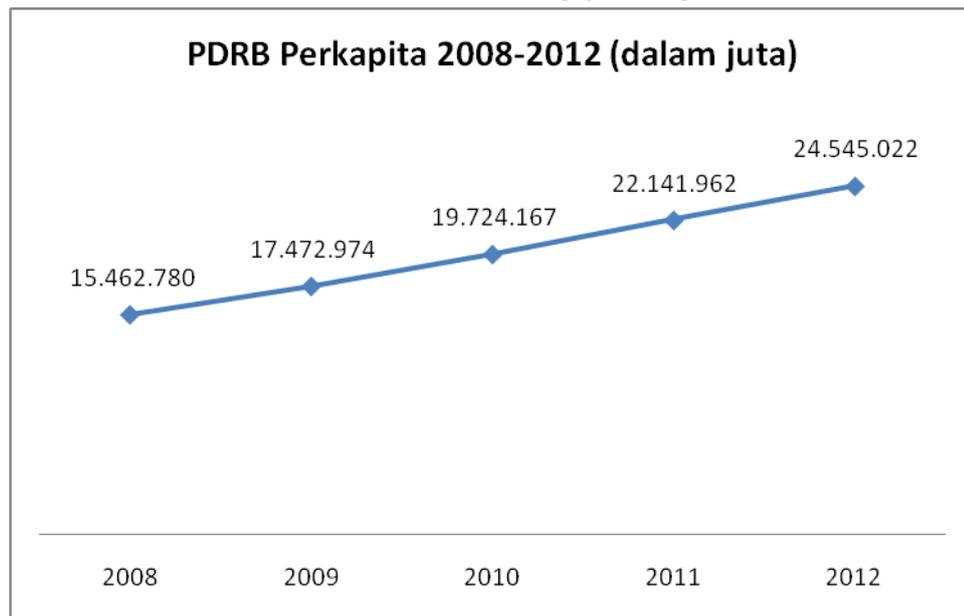
Data diatas memperlihatkan bahwa secara nominal nilai PDRB Kota Sawahlunto selalu meningkat setiap tahunnya dari 2008 sampai 2012, namun pertumbuhannya cenderung menurun dari 14,19% pada tahun 2009 menjadi hanya 11,87% pada tahun 2012. Kondisi ini

menggambarkan terjadinya pelambatan pertumbuhan nilai tambah yang dihasilkan yang bisa terjadi akibat menurunnya pertumbuhan output barang dan jasa atau memang pengaruh dari fluktuasi harga.

2.2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB per kapita menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap jiwa pertahun yang sekaligus sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Selama kurun waktu 2008-2012, rata-rata angka PDRB per kapita Kota Sawahlunto menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,25%.

Grafik. 2.1
PDRB Perkapita Kota Sawahlunto
Tahun 2008 – 2012 (Rp. Juta)



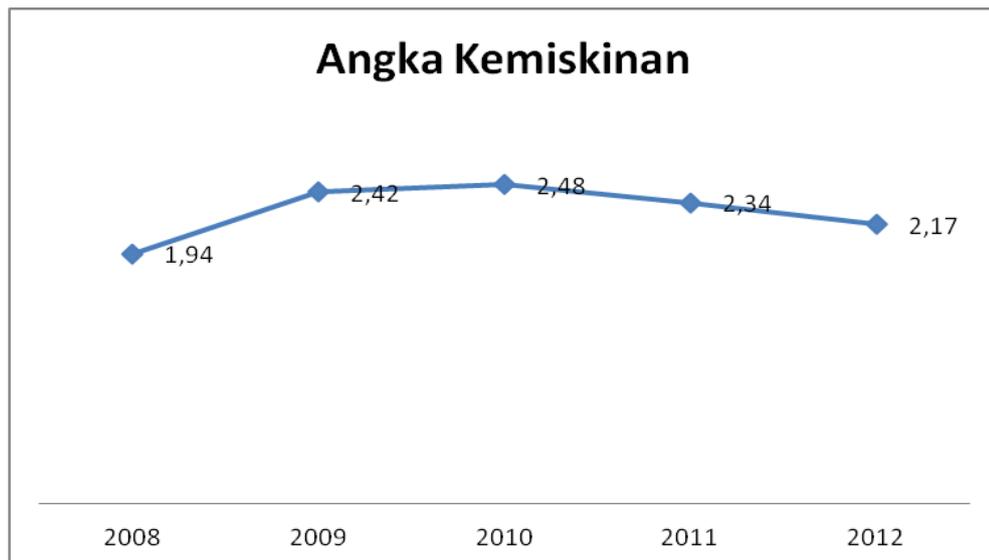
Sumber: SDA tahun 2012, BPS

2.2.1.4 Angka Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan merupakan parameter utama yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi persentase penduduk diatas garis kemiskinan memperlihatkan bahwa semakin banyak penduduk yang

mampu memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional pada kisaran 12%, maka tingkat kemiskinan kota Sawahlunto sangat rendah dengan kisaran 2%.

Grafik. 2.2
Angka Kemiskinan Kota Sawahlunto
Tahun 2008 – 2012



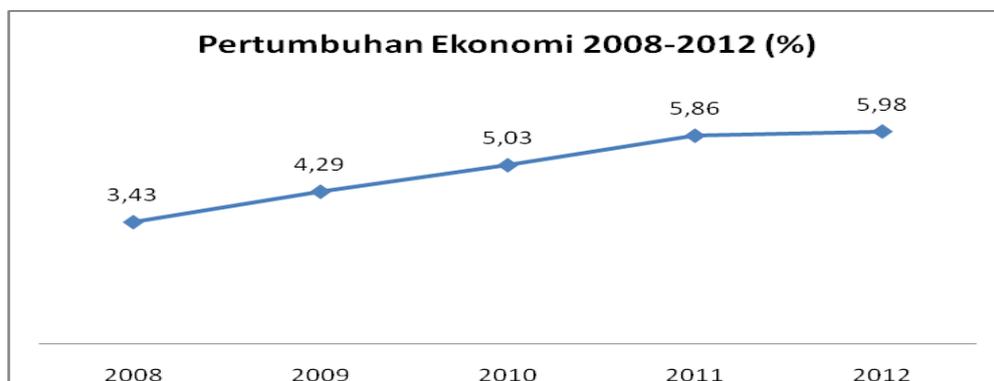
SUMBER: Badan Pusat Statistik

2.2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan pertumbuhan nilai produksi barang dan jasa dengan menghilangkan pengaruh dari fluktuasi harga produk barang dan jasa, karena itu pertumbuhan nilai produksi ini sangat tergantung pada peningkatan kapasitas produksi dan tentu saja dipengaruhi oleh investasi.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto periode 2008-2012 selalu memperlihatkan trend meningkat, namun masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi , selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut

Grafik 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto
Tahun 2008 – 2012



Sumber data : PDRB Kota Sawahlunto 2012

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan setiap sector usaha pembentuk PDRB, karena pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. Berikut ini dapat dilihat pertumbuhan semua sector usaha pembentuk PDRB pada kurun waktu 2008-2012.

Tabel 2.6
Pertumbuhan Sektor Pembentuk PDRB
2008-2012 dalam Persen

NO	Sektor	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	7,40	5,26	7,28	3,12	9,90
2	Pertambangan dan Penggalian	0,89	-10,32	-15,02	-3,88	-7,66
3	Industri Pengolahan	-1,74	12,60	10,32	6,81	4,33
4	Listrik, Gas & Air Bersih	5,22	14,67	8,20	6,20	10,68
5	Bangunan	5,73	6,09	15,46	8,81	8,85
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	6,24	9,19	8,91	7,49	7,11
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4,80	7,08	8,12	8,07	8,64
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,86	5,28	7,95	6,88	7,48
9	Jasa-Jasa	4,78	7,86	9,42	8,82	9,46

Sumber: PDRB Kota Sawahlunto 2012

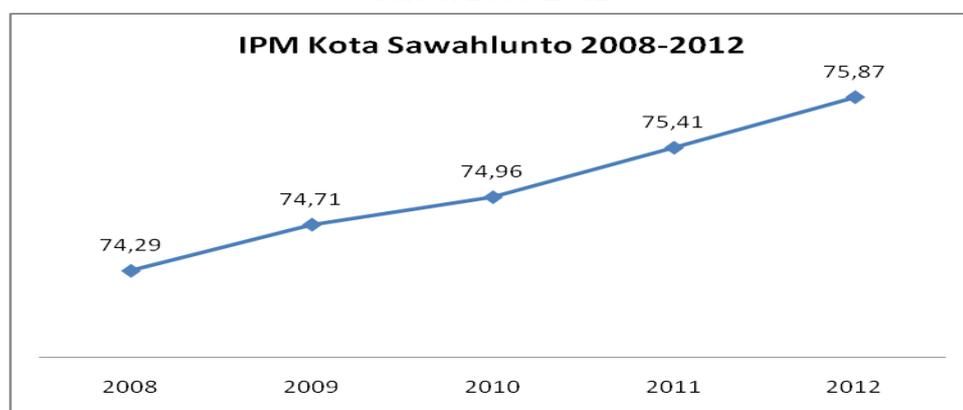
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa semua sector kecuali sector pertambangan dan penggalian memperlihatkan pertumbuhan yang positif walaupun dengan angka yang fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi 2012 pada sektor listrik gas dan air bersih.

Beberapa sector unggulan seperti pertanian dan jasa-jasa serta perdagangan hotel dan restoran memperlihatkan kinerja yang cukup baik dengan pertumbuhan diatas 7%, namun pertumbuhan sector industry pengolahan cenderung menurun.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak. Perkembangan Angka IPM kota Sawahlunto dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 2.4
Indeks Pembangunan Manusia Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012



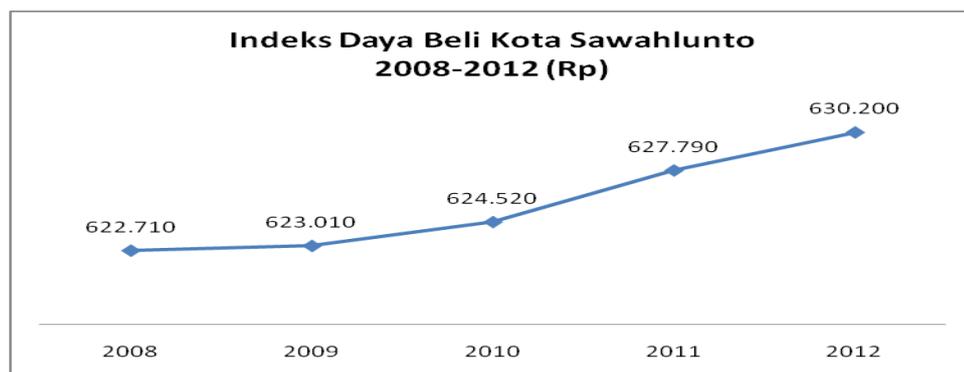
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

Perkembangan IPM Kota Sawahlunto 2008-2012 memperlihatkan peningkatan yang sangat baik dan hal ini tidak terlepas dari peningkatan semua komponen pembentuk IPM

2.2.1.7 Indeks Daya Beli

Indeks daya beli diukur dari jumlah pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan, dan selama periode 2008-2012 selalu mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 2.5
Indeks Daya Beli Masyarakat Kota Sawahlunto
Tahun 2008 – 2012



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012

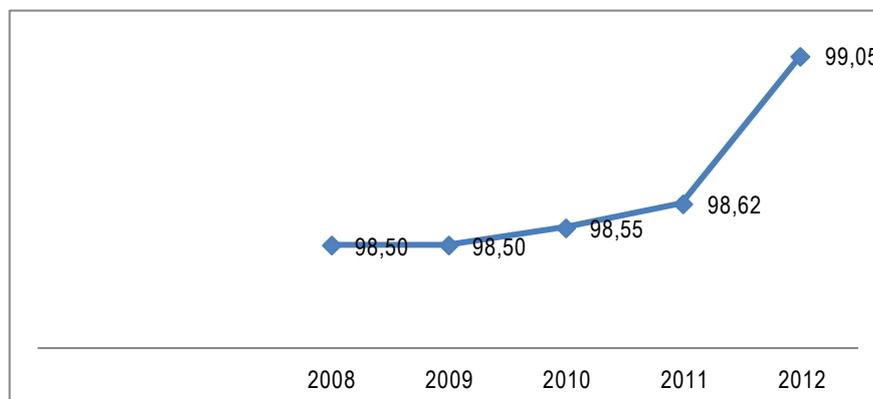
Meskipun terjadi peningkatan indeks daya beli setiap tahun namun jika dibandingkan dengan peningkatan PDRB perkapita maka indeks daya beli ini masih sangat kecil.

2.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.2.2.1 Angka Melek Huruf (AMH)

Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) di Kota Sawahlunto dari tahun 2008 sampai 2012 seperti terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.6
Angka Melek Huruf Kota Sawahlunto
Tahun 2008 - 2012



Sumber: Soseknaker Kota Sawahlunto Tahun 2012

Dilihat dari grafik angka melek huruf dari tahun 2008 – 2012 mengalami peningkatan, tahun 2012 menjadi 99,05, walaupun rata-rata kenaikannya relatif masih kecil. Grafik di atas menunjukkan pencapaian Kota Sawahlunto dalam pemberantasan buta huruf sudah cukup baik dimana angka melek huruf mencapai 99,05 persen dan angka buta huruf hanya sebesar 0,95 persen.

2.2.2.2 Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Usia 15 Tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal yang mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat disuatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Sawahlunto tahun 2012 baru mencapai 9,42, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan warga kota Sawahlunto adalah baru sampai duduk di bangku kelas I SLTA.

2.2.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan berapapun usianya terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Jumlah siswa yang tidak sama dengan jumlah penduduk berusia sesuai dengan jenjang pendidikan ini dapat disebabkan oleh adanya siswa yang berusia kurang dari yang seharusnya atau yang berusia melebihi yang seharusnya serta pengaruh penduduk yang bersekolah di luar daerah dan siswa yang berasal dari luar daerah, serta adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah.

Tabel 2.7
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
Di Kota Sawahlunto 2008 – 2012

No	Tahun	TK (%)	SD/MI/Paket A (%)	SMP/MTs/Paket B (%)	SMA/SMK/MA/Paket C (%)
1.	2008	53,30	97,43	64,93	76,13
2.	2009	54,37	109,25	99,27	74,54
3.	2010	56,40	109,4	92,13	76,76
4.	2011	58,63	109,4	92,46	96,07
5.	2012	-	107,26	89,92	101,2

Sumber : Dinas pendidikan Kota Sawahlunto

Dilihat dari tabel di atas pada jenjang pendidikan SD sederajat dan SMA sederajat sudah melampaui 100%, yang berarti jumlah siswa SD sederajat melebihi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan jumlah siswa SMA sederajat melebihi jumlah penduduk usia 16-18 tahun, sedangkan APK SMP sederajat yang hanya 89,92% menunjukkan

bahwa jumlah siswa SMP sederajat lebih kecil dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

2.2.2.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Dari tahun 2008 sampai 2011 Angka Partisipasi Murni dari tiap jenjang pendidikan mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun pada tahun 2012 terjadi penurunan pada semua jenjang pendidikan. Tahun 2012 pada jenjang SD sederajat APM sebesar 95,69%, jenjang SMP sederajat 65,8% dan SMA sederajat 73,67%.

Tabel 2.8
Angka Partisipasi Murni Menurut jenjang Pendidikan
Kota Sawahlunto Tahun 2008-2012

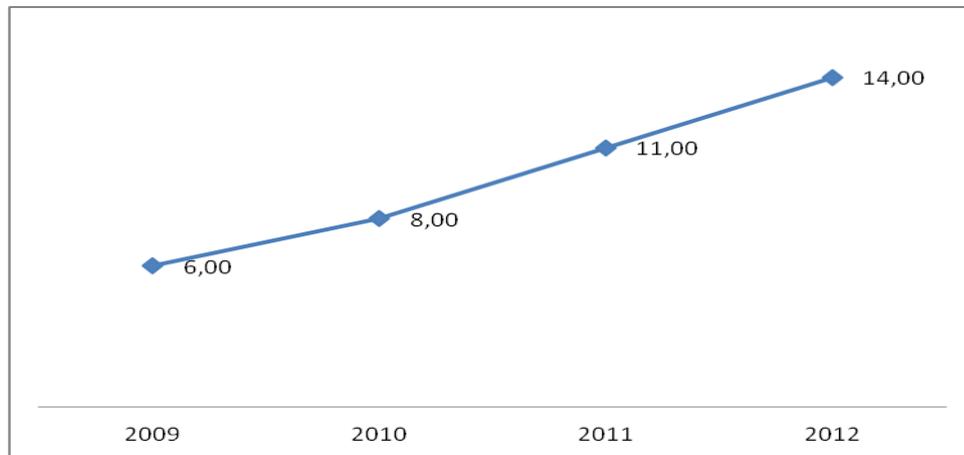
No	Tahun	SD/MI/Paket A (%)	SMP/MTs/Paket B (%)	SMA/SMK/MA/Paket C (%)
1.	2008	97,43	73,26	75,39
2.	2009	96,27	73,45	76,13
3.	2010	97,43	64,93	76,13
4.	2011	96,53	73,26	76,17
5.	2012	95,69	65,8	73,67

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

2.2.2.5 Jumlah Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi adalah jumlah bay yang meninggal sebelum berusia satu tahun.

Grafik 2.7
Jumlah Kematian Bayi Kota Sawahlunto
Tahun 2009 – 2012



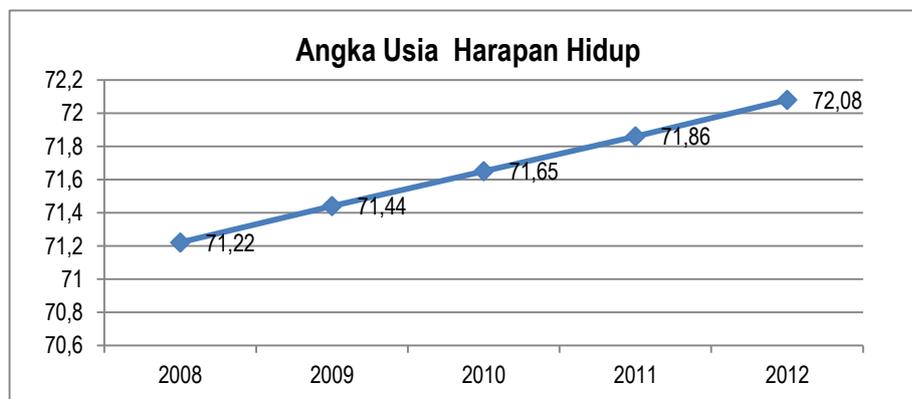
Sumber : Data Olahan Bappeda

Dilihat dari grafik diatas Jumlah kematian bayi di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti Asphiksia (terlambat mendapatkan pertolongan serta kehamilan yang telah lewat bulan/serotinus), Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang disebabkan asupan gizi ibu kurang pada waktu hamil/ibu hamil anemia, Ibu yang tidak memeriksakan kehamilannya pada petugas kesehatan dan Penyakit kelainan jantung, kelainan kongenital dan aspirasi paru.

2.2.2.6 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka ini mencerminkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir.

Grafik 2.8
Angka Harapan Hidup Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012



SUMBER : Badan Pusat Statistik 2012

Angka usia harapan hidup masyarakat Kota Sawahlunto sejak tahun 2008 – 2012 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini mencerminkan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat seiring dengan membaiknya tingkat pendapatan.

2.2.3 Fokus Adat, Seni, Budaya Dan Olah Raga

Pembangunan Kebudayaan di kota Sawahlunto ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global.

Tantangan pembangunan di bidang kepemudaan adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Tantangan pembangunan di bidang olahraga adalah perlunya pembinaan keolahragaan yang komperensif dan berkesinambungan agar seluruh potensi olahraga dapat dikembangkan secara baik, penguatan peran dan tanggung jawab masyarakat beserta pemangku pembangunan.

Pembangunan di bidang seni dan budaya sudah mengalami kemajuan dengan ditandainya peningkatan terhadap pemahaman keanekaragaman budaya, pentingnya toleransi dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa adanya kekerasan serta mulai berkembangnya interaksi budaya.

Tabel 2.9
Perkembangan Fasilitas Seni Budaya dan Olahraga Kota Sawahlunto
Tahun 2008 – 2012

No	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah Klub Olahraga	85	88	90	91	67
2.	Jumlah Gedung Olahraga	10	11	11	11	11
3.	Jumlah Grup Kesenian	53	39	33	35	35
4.	Jumlah Gedung Kesenian	7	8	8	10	10

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Dilihat dari tabel diatas ternyata untuk klub olahraga pada tahun 2011 berkurang dibandingkan tahun sebelumnya dari 91 klub menjadi 67 klub, sedangkan untuk gedung olahraga yang ada di Kota Sawahlunto mengalami penambahan 1 buah gedung menjadi 11 gedung olahraga. Grup kesenian juga mengalami penurunan dari 53 grup tahun 2008 menjadi 35 grup kesenian pada tahun 2011, namun gedung kesenian meningkat menjadi 10 gedung kesenian pada tahun 2011.

Perubahan jumlah klub olahraga dan grup kesenian ini karena hanya klub ataupun grup yang benar-benar memiliki kepengurusan yang aktif yang dilaporkan, sedangkan yang tidak aktif tidak lagi dilaporkan.

2.2.4 FOKUS PENGAMALAN AJARAN AGAMA

Penduduk Kota Sawahlunto memiliki keberagaman multietnis dengan beberapa agama yang dianut, dan pembangunan disektor agama didorong untuk menciptakan kondisi terbaik dalam pengamalan nilai-nilai agama dilingkungan komunitas rancangan terkecil yaitu keluarga dan tidak terlepas dari perkembangan lingkungan. Komposisi penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Menurut Agama
Tahun 2008 – 2012

No	Agama	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1.	Islam	54.599	54.973	55.817	57.778
2.	Khatolik	138	152	152	133
3.	Protestan	150	150	192	157
4.	Hindu	-	-	-	-
5.	Budha	-	-	-	-

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Pemeluk agama Islam dari tahun 2009 sebanyak 54.599 orang mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 57.778 orang, yang disebabkan oleh pertumbuhan secara alami penduduk yang mayoritas Islam. Penganut agama Katolik mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2009, sedangkan penganut agama Protestan sedikit meningkat.

2.2.4.1 Jumlah Penyuluh Agama dan Mubaligh

Selain tempat pendidikan agama, peranan mubaligh dan penyuluh agama sangat berpengaruh terhadap pengamalan ajaran agama bagi masyarakat, di mana perkembangan jumlah mubaligh dan penyuluh agama dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Perkembangan Jumlah Mubaligh dan Penyuluh Agama
Kota Sawahlunto Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Mubaligh	170	170	81	141	141
2.	Jumlah Penyuluh Agama	103	103	103	103	103

Sumber : Data profil Kota Sawahlunto 2012

Jumlah mubaligh mengalami penurunan dari tahun 2008 sampai 2012, dan tahun 2012 kembali bertambah menjadi 141 mubaligh. Jumlah penyuluh agama tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun tetap sebanyak 103 orang.

2.2.4.2 Jumlah Tempat Ibadah

Agama mayoritas penduduk Kota Sawahlunto adalah Agama Islam, agama lain yang dianut sebagian penduduk Kota Sawahlunto adalah Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Perkembangan kehidupan beragama sangat ditentukan oleh pemahaman dan pengamalan ajaran agama oleh penganutnya serta tidak terlepas dari keberadaan sarana ibadah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.12
Jumlah Tempat Ibadah Di Kota Sawahlunto
Tahun 2008 – 2012

No	Tempat Ibadah	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Mesjid	46	46	46	46	48
2.	Musala/Langgar	219	228	203	203	220
3.	Gereja	2	2	2	2	2

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Dilihat dari Jumlah tempat Ibadah Di Kota Sawahlunto, untuk agama yang mayoritas yaitu Islam, mesjid bertambah 2 dari tahun 2008 menjadi 48 di tahun 2012 demikian juga musalla/langgar yang sempat berkurang kembali meningkat di tahun 2012, sedangkan gereja tidak mengalami perubahan.

2.2.4.3 Tempat Pendidikan Agama

Agama Islam mempunyai tempat pendidikan agama Islam untuk meningkatkan pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri, di Kota Sawahlunto ada beberapa tempat pendidikan agama sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
Jumlah Tempat Pendidikan Agama Islam Di Kota Sawahlunto
Tahun 2008 – 2012

No	Tempat Pendidikan Agama	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	TPA	158	158	158	158	172
2.	TPSA	9	9	9	9	9
3.	MDA	15	15	15	15	15
4.	Pondok Taman alquran	4	4	4	4	4
5.	Pondok Pesantren	2	2	2	2	2

Sumber : Data profil Kota Sawahlunto 2012

Taman Pendidikan Alquran (TPA) mengalami penambahan pada tahun 2012, menjadi 172 TPA di Kota Sawahlunto seiring dengan meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan penganutnya.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Bidang pendidikan

Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan yaitu, yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah ini memperlihatkan seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Pada tabel berikut dapat dilihat Perkembangan APS Kota Sawahlunto berdasarkan jenjang pendidikan dari tahun 2008 -2012 :

Tabel 2.14
Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Kota Sawahlunto
Tahun 2008 – 2012

No	Tahun	Kelompok Umur		
		7 - 12 tahun	13 - 15 tahun	16 - 18 tahun
1.	2008	98,25	92,68	76,52
2.	2009	99,56	95,82	78,65
3.	2010	99,09	92,90	68,35
4.	2011	98,95	94,65	77,17
5.	2012	99,52	89,62	70,54

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka tahun 2012

Dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Sawahlunto dari tahun 2008 – 2012, mengalami peningkatan pada umur 7 – 12 tahun, sedangkan pada usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun menurun dibandingkan tahun 2011.

2.3.1.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.15
Rasio ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Kota sawahlunto tahun 2008 – 2012

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Sekolah	65	65	65	65	65
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	6852	6897	6987	7087	7160
1.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12	1 :105,42	1 :106,11	1 :107,49	1 :109,03	1 :110,15
2	SMP/MTs					

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
2.1	Jumlah Sekolah	13	13	13	13	14
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	3431	3458	3240	3223	3190
2.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15	1 :263,92	1 :266	1 :249,23	1 :247,92	1 :227,86
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Sekolah	9	9	9	9	9
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18	3457	3490	2852	2836	2750
3.3	Perbandingan Jumlah Sekolah Dengan Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18	1 :384,11	1 :387,7	1 :316,8	1 :315,1	1 :306

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka tahun 2012

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa tahun 2012 ditingkat SMP, SMU dan SMK mengalami penurunan jumlah murid disetiap sekolah, sedangkan jumlah sekolah yang tersedia masih tetap dari tahun sebelumnya. Tahun 2012 untuk tingkat SMP, SMU dan SMK rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah mengalami penurunan yang disebabkan pertumbuhan penduduk tidak disertai dengan peningkatan jumlah sekolah.

2.3.1.1.3 Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.16
Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid
Kota Sawahlunto Tahun 2008 - 2012

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	TK					
1.1	Jumlah Guru	161	192	197	203	195

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.2	Jumlah Murid	1121	1379	1222	1241	1231
1.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1 :6,96	1 :7,18	1 :6,20	1 :6,11	1 : 6,31
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Guru	732	716	815	627	751
2.2	Jumlah Murid	7233	6858	7216	7668	7951
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1 :9,88	1 :9,57	1 :8,85	1 :12,2	1 : 10,59
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Guru	382	407	334	319	280
3.2	Jumlah Murid	3008	3526	2716	2517	2045
3.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1 :7,87	1 : 8,68	1 : 8,13	1 :7,89	1 : 7,30
4	SMA/MA					
4.1	Jumlah Guru	188	210	204	188	185
	Jumlah Murid	1269	1390	1226	1240	1288
	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1 : 6,75	1 : 6,61	1 : 6,00	1 : 6,59	1 : 6,96
5	SMK					
5.1	Jumlah Guru	166	167	173	174	179
5.2	Jumlah Murid	1160	1192	1260	1271	1340
5.3	Perbandingan Jumlah Guru Terhadap Jumlah Murid	1 :6,98	1 :7,13	1 :7,28	1 :7,30	1 : 7,49

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka tahun 2012

Selama 2008 – 2012 rasio ketersediaan guru mengalami peningkatan untuk setiap jenjang pendidikan, tahun 2012 kondisi ketersediaan guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan TK adalah 1:6,31; ini berarti untuk 1 guru melayani 6,31 murid TK, untuk tingkat SD/MI 1 guru melayani 10,59 murid SD, untuk SMP 1 guru melayani 7,30 murid SMP/MTs, untuk SMA 1 guru melayani 6,96 murid SMA dan untuk SMK 1 guru melayani 7,49 murid SMK.

2.3.1.1.4 Rasio Murid dan kelas

Rasio Murid dan kelas sangat penting untuk menentukan ketersediaan kelas terhadap murid yang ada.

Tabel 2.17
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Tahun 2008 – 2012
Kota Sawahlunto

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	TK					
1.1	Jumlah Murid	1121	1379	1222	1241	1231
1.2	Jumlah Kelas	58	70	82	69	67
1.3	Perband Jml Murid erhadap Jml Kelas	19,32: 1	19,7: 1	14,90: 1	17,98: 1	18,37 : 1
2	SD/MI					
2.1	Jumlah Murid	7233	6858	7216	7668	7951
2.2	Jumlah Kelas	405	364	384	411	435
2.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	17,85: 1	18,84: 1	18,79: 1	18,65: 1	18,28 : 1
3	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Murid	3008	3526	2716	2517	2045
3.2	Jumlah Kelas	116	106	105	106	90
3.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	25,93: 1	33,26: 1	25,86: 1	23,74: 1	22,72 : 1
4	SMA/MA					
4.1	Jumlah Murid	1269	1390	1226	1240	1288
4.2	Jumlah Kelas	49	49	49	51	58
4.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	25,89: 1	28,36: 1	25,02: 1	24,31: 1	22,21 : 1
5	SMK					
5.1	Jumlah Murid	1160	1192	1260	1271	1340
5.2	Jumlah Kelas	39	39	45	38	48
5.3	Perbandingan Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	29,74: 1	30,56: 1	28,0: 1	33,44: 1	27,92 : 1

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka tahun 2012

Dilihat dari tabel diatas dari tahun 2008 sampai 2012 Kota Sawahlunto mengalami peningkatan jumlah murid disetiap jenjang pendidikannya. Tahun 2012, pada jenjang pendidikan TK 1 kelas mempunyai 18,37 murid, SD 1 kelas dengan 18,28 murid, SMP 1 kelas dengan 22,72 murid, SMU 1 kelas dengan 22,21 murid dan SMK 1 kelas dengan 27,92 murid.

2.3.1.1.5 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil atau tidaknya pembangunan dibidang pendidikan.

Tabel 2.18
Angka Putus Sekolah Kota Sawahlunto
Tahun 2008 – 2012

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Putus Sekolah	0	0	18	8	5
1.2	Jumlah Murid	7233	6858	7216	7668	7023
1.3	Angka Putus sekolah (%)	0	0	0,002	0,001	0,0007
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Putus Sekolah	33	5	20	17	40
2.2	Jumlah Murid	3008	3526	2716	2517	2260
2.3	Angka Putus sekolah (%)	0,01	0,001	0,007	0,006	0,01
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah Putus Sekolah	0	0	0	14	19
3.2	Jumlah Murid	2429	2582	2486	2511	2207
3.3	Angka Putus sekolah (%)	0	0	0	0,005	0,008

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka tahun 2012

Untuk tingkat SD/MI angka putus sekolah mengalami penurunan dari tahun 2010-2012, ini dapat disebabkan sudah pahamnya masyarakat akan pentingnya pendidikan. Tingkat SMP/MTs angka putus sekolah mengalami peningkatan, ini bisa disebabkan karena banyaknya yang memilih bekerja daripada sekolah dan merasa cukup dengan pendidikan yang sudah ada dan tingginya biaya pendidikan sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan. Tingkat SMA/MA/SMK angka putus sekolah menurun dari tahun sebelumnya.

2.3.1.1.6 Angka Kelulusan Siswa

Angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun mencerminkan kemampuan dan penguasaan siswa atas materi pelajaran yang disampaikan serta kemampuan dalam menghadapi evaluasi belajar. Jumlah kelulusan siswa perjenjang pendidikan di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.19
Persentase Kelulusan Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kota Sawahlunto tahun 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	SD	100	100	100	100	100
2.	MI	-	100	100	100	100
3.	SLTP	89,22	83,69	94,37	96,84	94
4.	MTs	-	61,86	95,58	91,30	97
5.	SMU	89,74	97,82	99,45	98,53	100
6.	MA	-	21,05	91,49	100	91
7.	SMK	94,88	92,02	99,41	100	99

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Tingkat SD/MI pada tahun 2012 kelulusan siswa sudah mencapai 100%. Tingkat SMP kelulusan siswa tahun 2012 sebesar 94% menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan kelulusan MTs tahun 2012 sebesar 97%. Tingkat SLTA, kelulusan untuk SMU tahun 2012 sebesar 100%, untuk MA kelulusan siswa mencapai 91% tahun 2012 dan SMK kelulusan siswa tahun 2012 sebesar 99%. Secara umum kelulusan siswa di setiap jenjang pendidikan di Kota Sawahlunto sangat baik sekali mendekati 100%, namun pada tingkat SLTP perlu menjadi perhatian karena angkanya baru mencapai 94%.

2.3.1.2 Kesehatan

2.3.1.2.1 Rumah Sakit

Rumah Sakit Sawahlunto merupakan rumah sakit tipe C yang mempunyai tenaga dokter spesialis yang tetap sebanyak 9 orang, yaitu, kebidanan, penyakit dalam, bedah umum, mata, patologi klinik, anak, kulit dan kelamin serta anestesi, sedangkan reveral meliputi dokter spesialis syaraf dan spesialis telinga hidung dan tenggorokan. Dokter umum 17 orang serta dokter gigi 3 orang diperkuat oleh tenaga paramedis 124 orang, tenaga penunjang 84 orang dan tenaga administrasi 50 orang.

2.3.1.2.2 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per satuan balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.20
Jumlah Posyandu dan Balita
Kota Sawahlunto Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Posyandu	94	96	97	97	98
2.	Jumlah Balita	5.618	5.761	5.965	5.965	5.969
3.	Rasio Posyandu per jumlah balita	1 : 59,77	1 : 60,01	1 : 61,49	1 : 61,49	1 : 60,91

Sumber: Profil tahun 2012

Jumlah posyandu pada tahun 2008 – 2012 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah balita. Dilihat dari rasio posyandu dan balita mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 1 : 61,49, ini berarti bahwa setiap posyandu pada tahun 2010 dan 2011 rata-rata melayani 61 sampai 62 balita. Pada tahun 2012 rasio posyandu terhadap balita 1 : 60,91, ini berarti bahwa rata-rata setiap posyandu yang ada pada tahun 2012 dapat melayani sebanyak 60 sampai 61 balita.

2.3.1.2.3 Rasio Puskesmas, Praktik Dokter dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan Penduduk

Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu merupakan salah satu penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Tabel 2.21
Rasio Puskesmas, Praktik Dokter dan Pustu
Kota Sawahlunto Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6	6
2.	Jumlah Praktek Dokter	34	37	37	13	16
3.	Jumlah Pustu	25	25	25	25	23
	Jumlah Puskesmas, Praktek Dokter, Pustu	65	68	68	44	45
4.	Jumlah Penduduk	54.913	55.291	56.866	57.567	58.068
	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	1 : 9.152	1 : 9.215	1 : 9.478	1 : 9.595	1 : 9.678
	Rasio Praktek Dokter persatuan penduduk	1 : 1.615	1 : 1.494	1 : 1.537	1 : 4.428	1 : 3.629
	Rasio Pustu persatuan penduduk	1 : 2.197	1 : 2.212	1 : 2.275	1 : 2.303	1 : 2525
	Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu persatuan penduduk	1 : 844	1 : 813	1 : 836	1 : 1.308	1 : 1290
5.	Jumlah Kecamatan	4	4	4	4	4
6	Jumlah Desa/Kelurahan	37	37	37	37	37

Sumber: Sawahlunto Dalam Angka 2012

Rasio Puskesmas, Praktek Dokter dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kota Sawahlunto pada tahun 2012 mencapai 1 : 1.290,40, ini artinya bahwa 1 puskesmas/praktek dokter/pustu harus melayani jumlah penduduk sebanyak 1.291 jiwa. Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan mencapai 3 : 2, ini artinya bahwa dalam dua kecamatan terdapat 3 unit puskesmas.

Jumlah penduduk yang harus dilayani Puskesmas/Praktek Dokter/Pustu tahun 2012 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, karena berkurangnya jumlah praktek dokter. Pada tahun 2008 setiap satu Puskesmas/Praktek Dokter/Pustu harus melayani 844 penduduk, pada tahun 2009 harus melayani 813 penduduk, tahun 2010 harus melayani 836 penduduk dan untuk tahun 2011 harus melayani 1.308 penduduk. Berkurangnya praktek dokter tidak terlepas dari semakin meningkatnya kualitas dan fasilitas pelayanan yang ada pada Pusekesamas/Pustu serta RSUD dan bertambahnya jumlah penduduk yang tercover jaminan pemeliharaan kesehatan.

2.3.1.3 Kependudukan dan Cakil

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

2.3.1.3.1 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk positif jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar kedalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Tabel 2.22
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan
Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2012

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)			Laju Pertumbuhan (%)
		2010	2011	2012	2012
1.	Silungkang	10.126	10.298	10.437	1,34
2.	Lembah Segar	12.145	12.150	12.111	0,32
3.	Barangin	16.912	17.174	17.377	1,18
4.	Talawi	17.683	17.945	18.143	1,10
Total		56.866	57.567	58.068	0,87

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Dilihat dari tabel diatas pertumbuhan penduduk selalu bervariasi dari tahun 2010 sampai 2012 dimana tahun 2012 hanya sebesar 0,87%. Kecamatan Silungkang merupakan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi, hal ini tidak terlepas dari posisinya yang berada di jalan lintas nasional yang sangat potensial dalam pengembangan usaha perdagangan dan jasa.

2.3.1.3.2 Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tertib administrasi kependudukan yang dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, Akte kelahiran dan Akte Nikah. Berikut disajikan data mengenai kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai berikut:

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, Akta Catatan Sipil
Kota Sawahlunto Tahun 2008 – 2012

No	Kepemilikan	2008	2009	2010	2011	2012
1.	KTP					
	Sudah Memiliki (jiwa)	40.240	39.080	41.200	42.590	40.110
2.	Jumlah Bayi Lahir ber Akte Kelahiran					
	Sudah Memiliki (bayi)	235	537	508	414	585
	Belum Memiliki (bayi)	795	558	559	760	334
3.	Surat Nikah					
	Sudah Memiliki (pasangan)	13.010	12.746	13.012	13.273	-
	Belum Memiliki (pasangan)	284	532	149	410	-

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Pada tahun 2012 jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP tercatat sebanyak 40.110 jiwa atau sekitar 92,7% dari keseluruhan penduduk usia wajib KTP sebanyak 43.282 jiwa.

Sebanyak 585 bayi atau 63,65 % bayi yang lahir pada tahun 2012 juga telah memiliki akta kelahiran. Dibandingkan tahun sebelumnya hanya 35,26% yang memiliki akta kelahiran, sedangkan pasangan yang sudah memiliki akta nikah tahun 2011 sebanyak 13.273 pasangan atau sekitar 97% dari keseluruhan 13.682 pasangan nikah.

2.3.1.3.3 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari indicator kinerja sebagai berikut :

Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran didalam kehidupan berumah tangga. Data tentang Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.24
Jumlah KDRT di Kota Sawahlunto
Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	2010	2011	2012
1.	Jumlah KDRT	8	2	5
2.	Jumlah Rumah Tangga	14.051	14.244	17.642
3.	Rasio KDRT	1 : 1756,38	1 : 7122,00	1 : 3528,4

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Jumlah kejadian KDRT di Kota Sawahlunto pada tahun 2012 sebanyak 5 kasus KDRT dari jumlah rumah tangga yang ada. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 8 KDRT, namun meningkat tajam dibandingkan tahun 2011 dengan 2 kasus.

2.3.1.4 Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

2.3.1.4.1 Rata-rata Jumlah Anak per keluarga

Tujuan Program Keluarga Berencana secara demografi adalah untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

Tabel 2.25
Rata-rata Jumlah Anak per Rumah Tangga
di Kota Sawahlunto Tahun 2008 – 2011

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah Rumah Tangga	13.615	14.379	14.395	14.051	14.244
2.	Jumlah Penduduk	53.686	54.913	55.291	56.866	57.567
3.	Rata – rata jumlah anak perumah Tangga	1,94	1,82	1,84	2,05	2,04

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Dilihat dari data di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga di Kota Sawahlunto mengalami fluktuatif. Tahun 2007 rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga 1,94 orang. Tahun 2011 rata-rata jumlah anak setiap rumah tangga mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,04 orang. Jika dibandingkan dengan target 2 orang anak setiap rumah tangga pada program Keluarga Berencana tingkat nasional, maka dapat dikatakan program Keluarga Berencana di Kota Sawahlunto sudah berjalan.

2.3.1.4.2 Rasio Akseptor KB

Program KB dimaksudkan untuk menciptakan keluarga kecil yang berkualitas sekaligus menekan laju pertumbuhan penduduk disamping itu juga mengurangi resiko tingkat kematian anak serta tingkat kematian ibu.

Tabel 2.26
Rasio Akseptor KB di Kota Sawahlunto
Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah PUS	9.524	9.460	9.697	9.575	9.528
2.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	6.763	6.830	7.210	6.841	6.911
3.	Jumlah Tidak ber KB	2.761	2.630	2.487	2.487	2.617
4.	Rasio Akseptor KB	71,01	72,20	74,35	71,45	72,53

Sumber : PMPKB

Rasio akseptor KB tahun 2012 sebesar 72,53 ini berarti sudah cukup tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya KB.

2.3.1.5 Sosial Budaya

Kebudayaan merupakan salah satu kekayaan daerah yang harus dijaga dan dilestarikan, sekaigus sebagai salah satu asset pusaka yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Sebagai kota yang telah eksis sejak zaman Belanda, Sawahlunto memiliki banyak benda cagar budaya yang perlu dikelola dengan baik dan dijadikan sebagai salah satu keunggulan local yang dimiliki.

Berikut ini dapat dilihat tabel sarana penyelenggara seni dan budaya dan benda cagar budaya yang dilestarikan sebagai berikut :

Tabel 2.27
Perkembangan Sarana Seni dan Pelestarian Cagar Budaya
Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah sarana Penyeleng garaan kesenian (Set)	9	9	9	9	9
2.	Jumlah Penyelenggaraan Seni	2	2	2	2	2

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
	(Kali)					
3.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan	10	13	20	23	23
4.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah	73	74	74	74	74
5.	Presentase jumlah Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan (%)	13,69	17,57	27,03	31,08	31,04

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Sampai tahun 2011 sebanyak 31,08 % benda situs dan kawasan cagar budaya telah dikelola dan dilestarikan dengan sangat baik, karena itu dalam rangka pelestarian budaya salah satu langkah yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi kawasan cagar budaya. Dalam konteks pelestarian budaya, Pemerintah kota juga telah memelihara Benda Cagar Budaya (BCB) seperti bangunan tua dengan arsitektur Eropa peninggalan Belanda yang direhabilitasi dengan mempertahankan keaslian bentuknya dan dijadikan sebagai objek wisata.

2.3.1.6 Kepemudaan dan olah Raga

Berkaitan dengan urusan kepemudaaan dapat dilihat dari organisasi pemuda dan olahraga. Semakin banyak organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam membudayakan pemuda.

Organisasi kepemudaan berperan dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang dibidang olahraga dan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.28
Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga
Tahun 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	11	11	14	14	14
2.	Jumlah Organisasi Olahraga	22	23	23	24	24

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka tahun 2012

Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Sawahlunto dari Tahun 2008 sampai Tahun 2012 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2008 11 organisasi dan Tahun 2012 menjadi 14 Organisasi Pemuda di Kota Sawahlunto. Begitu juga dengan jumlah Organisasi Olahraga di Kota Sawahlunto juga mengalami peningkatan.

2.3.1.7 Ketenagakerjaan

Dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, salah satu indikator yang sering digunakan adalah jumlah penduduk yang bekerja. Banyaknya penduduk yang bekerja pada suatu wilayah, secara umum dapat menggambarkan tingginya kesejahteraan masyarakat pada wilayah tersebut, karena angka tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan yang berpengaruh pada pemenuhan kehidupan yang layak serta stabilitas ekonomi.

Persentase penduduk Kota Sawahlunto usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan usaha secara rinci mulai tahun 2008 – tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 2.29

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Kota Sawahlunto Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012 (%)

NO	LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	21,91	19,25	19,35	23,50	20,58
2	Pertambangan & Penggalian	8,59	7,80	9,46	13,10	11,85
3	Industri Pengolahan	10,89	9,10	10,13	4,40	6,82
4	Listrik, Gas & Air Bersih	0,99	1,89	1,42	1,50	2,92
5	Bangunan	8,53	5,78	6,53	6,70	3,56
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	17,79	19,13	15,84	21,10	22,00
7	Pengangkutan & Komunikasi	6,16	10,36	6,34	5,20	4,25
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,77	2,17	1,87	2,10	3,01
9	Jasa-Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	23,37	24,52	29,05	22,40	25,00
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Lapangan pekerjaan di Kota Sawahlunto pada tahun 2012 umumnya bergerak pada lapangan usaha sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebanyak 25% , disusul pada urutan kedua oleh sector Perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 22%. Serta diikuti oleh sektor pertanian pada urutan lapangan usaha terbanyak ketiga sebesar 20,58%. Selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2008 hingga tahun 2012, persentase penduduk 15 tahun keatas yang bekerja pada bidang usaha listrik, gas, dan air minum selalu yang terendah.

Tingkat Pengangguran

Berdasarkan publikasi International Labour Organization, penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu : tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan penduduk usia 15 tahun ke atas menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2008-2012.

Tabel 2.30
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2008-2012

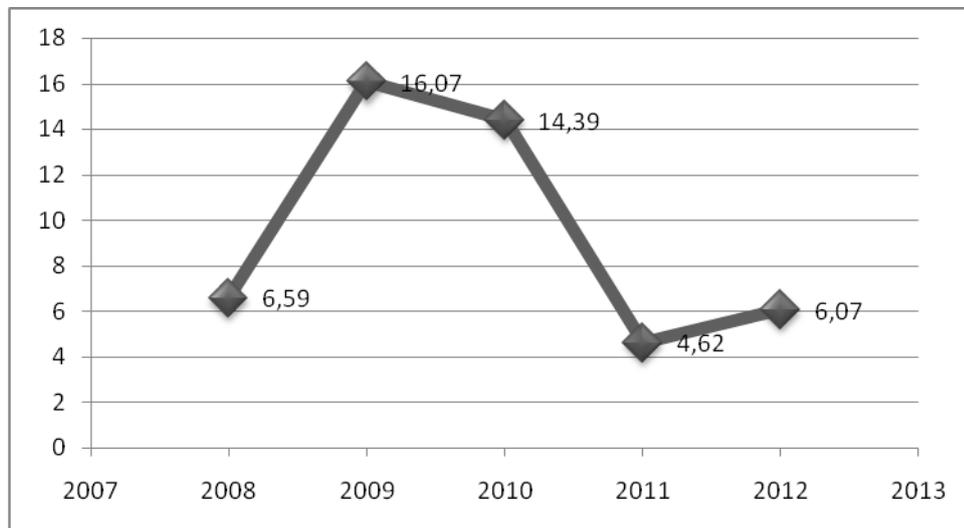
NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	ANGKATAN KERJA					
	a. Bekerja	47,79	49,21	64,05	64,45	68,35
	b. Pengangguran		9,42	10,76	3,12	4,42
	c. penduduk angkatan kerja (a+b)		58,63	74,81	67,57	72,77
	d. Rasio bekerja (a:b)		0,84	0,86	0,95	0,94
2	BUKAN ANKATAN KERJA					
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)		41,37	25,19	32,43	27,23
3	Jumlah penduduk usia kerja		100	100	100	100
4	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)		58,63	74,81	67,57	72,77
5	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	6,59	16,07	14,39	4,62	6,07

Sumber : SDA 2012

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa sejak 2008 sampai 2012 jumlah penduduk angkatan kerja lebih besar dari jumlah penduduk bukan angkatan kerja, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pada tahun 2012, persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja (menganggur) sebanyak 4,42%, sedangkan keseluruhan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2012 sebesar 6,07%.

Grafik 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012 (persen)



Sumber : SDA 2012

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara pencari kerja dengan angkatan kerja. Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa Persentase tingkat pengangguran terbuka di kota sawahlunto dari tahun 2008 hingga tahun 2012 cukup berfluktuasi dari 6,59 persen ke 16,07 persen. Peningkatan tajam terjadi dari tahun 2008 ke tahun 2009, dan penurunan yang cukup tajam juga terjadi tahun 2010 hingga tahun 2011, yakni dari 14,39 % menjadi 4,62 %.

2.3.1.8 Koperasi dan UMKM

Tabel 2.31
Jumlah Koperasi Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012 (persen)

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah koperasi aktif	71	70	70	74	65
2	Jumlah koperasi	77	78	79	74	76
3	Persentase koperasi aktif	92,21	89,74	88,61	100	85,53

Sumber : SDA 2012

Sejak tahun 2008 hingga 2012, persentase koperasi yang aktif selalu berada diatas 85 %, meskipun demikian pada tahun 2012 jumlah koperasi aktif berkurang hal ini tidak terlepas dari kemampuan manajerial para pengurus dalam mengelola koperasi.

Selain koperasi keberadaan Usaha Kecil dan Menengah serta Bank Perkreditan Rakyat dan lembaga Keuangan Mikro sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta dalam menyediakan modal bagi pelaku usaha local. Berikut ini perkembangan UKM, BPR dan LKM selama 2008-2011.

Tabel 2.32
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM dan Jumlah BPR/LKM
Tahun 2008 – 2011

NO	UKM NON BPR/LKM UKM	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah UKM NON BPR/LKM UKM	560	445	434	452
2	Jumlah BPR	7	7	7	6
3	Jumlah LKM	62	62	62	62

Sumber : SDA 2012 dan Dinas Perindagkopnaker 2012

Sejak tahun 2008 – 2011, jumlah LKM sebanyak 62 unit, dan tidak mengalami perubahan, sejalan dengan ini jumlah BPR yang ada mengalami pengurangan dari 7 unit menjadi 6 unit.

2.3.1.9 Penanaman Modal

Pelayanan Penanaman modal di kota Sawahlunto dilaksanakan oleh beberapa SKPD sesuai bidang masing-masing sehingga dalam pelaporan juga belum terlaksana secara baik. Investasi terbesar dilaksanakan oleh pemerintah melalui APBD atau APBN, sedangkan investasi swasta masih sangat kecil dengan nilai tidak terlalu besar.

2.3.1.10 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan sangat ditentukan oleh produksi bahan pangan utama yang dihasilkan para petani local dan perkembangan tingkat kebutuhan pangan yang dipengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk selaku konsumen. Berikut ini perkembangan ketersediaan pangan utama kota Sawahlunto tahun 2008-2012.

Tabel 2.33
Ketersediaan Pangan Utama
Tahun 2008-2012

NO	KETERSEDIAAN PANGAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Ton)	12.370,0	11.689,0	13.523,0	12.397,0	13.928
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	54.913	55.291	56.866	57.567	58.068
3	Ketersediaan pangan utama (ton/jiwa/Tahun)	0,225	0,211	0,238	0,215	0,240

Sumber : SDA 2012

Ketersediaan pangan utama penduduk di Kota Sawahlunto mengandung maksud untuk tahun 2012 satu orang penduduk tersedia bahan pangan sebesar 0,240 ton/tahun atau sebesar 240 kg/tahun. Angka ini dianggap cukup karena rata-rata kebutuhan pangan utama setiap penduduk adalah 135 kg/tahun.

2.3.1.11 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari tahun 2008 hingga saat ini berjumlah 37 buah, dengan masing-masing Desa/Kelurahan memiliki satu buah LPM yang merupakan mitra kepala desa/kelurahan dalam menjalankan pemerintahan di tingkat terdepan.

Disamping itu peranan PKK dalam pembinaan masyarakat diwujudkan dalam bentuk kelompok binaan yang berada dan meyebar ditengah masyarakat. Pembinaan yang dilakukan meliputi bidang pemberdayaan ekonomi keluarga serta kehidupan social rumah tangga. Jumlah unit PKK yang ada di Kota Sawahlunto sebanyak 42 unit, yakni 37 PKK Desa/Kelurahan, 4 PKK Kecamatan dan 1 PKK Kota Sawahlunto. Setiap PKK yang ada di Kota Sawahlunto memiliki kelompok binaan, yang total berjumlah 222 buah kelompok binaan. Perkembangan kelompok binaan PKK selama kurun 2008-2012 sebagai berikut :

Tabel 2.34
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Tahun 2008-2012

NO	KELOMPOK BINAAN PKK	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Kelompok binaan PKK	222	222	222	222	222
2	Jumlah PKK	42	42	42	42	42
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

Sumber : SDA 2012

Jumlah unit PKK yang ada di Kota Sawahlunto sebanyak 42 unit, yakni 37 PKK Desa/Kelurahan, 4 PKK Kecamatan dan 1 PKK Kota Keberradaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menjadi sangat penting sebagai perwujudan dan wadah masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan daerah dan pada tahun 2012 LSM di Kota Sawahlunto tercatat 11 buah LSM

2.3.1.12 Pekerjaan Umum

Aspek pelayanan umum terkait dengan bidang Pekerjaan Umum terdiri dari :

a. Jaringan Jalan

Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi social budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai panjang jaringan jalan Kota Sawahlunto berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2008-2012.

Tabel 2.35
Kondisi dan Panjang Jalan Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012

NO	URAIAN	TAHUN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kondisi Baik (Km)	234,14	209,99	214,4	288,48	291,27
2	Kondisi rusak ringan (Km)	87,82	89,32	89,35	89,37	88,82
3	Kondisi Rusak Sedang (Km)	73,22	50,15	50,12	34,65	33,45
4	Kondisi rusak berat (Km)	45,11	90,83	86,42	27,79	26,75
5	Jalan Kota secara keseluruhan (Km)	440,29	440,29	440,29	440,29	440,29
6	Proporsi kondisi baik (%)	53,18	47,69	48,70	65,52	66,15
7	Proporsi Kondisi rusak ringan (%)	19,95	20,29	20,29	20,30	20,17
8	Proporsi Kondisi Rusak Sedang (%)	16,63	11,39	11,38	7,87	7,60
9	Proporsi Kondisi rusak berat (%)	10,25	20,63	19,63	6,31	6,08

Sumber : BPS 2012

Kondisi jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kota Sawahlunto pada tahun 2008 mencapai 53,18% pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 66,15%, demikian halnya dengan proporsi kondisi jalan rusak berat mengalami penurunan yaitu dari 10,25% pada tahun 2008 menjadi 6,08% pada tahun 2012.

b. Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi padi adalah jaringan irigasi, Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya, Perkembangan jaringan irigasi selama 2008-2012 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.36
Jaringan Irigasi Kota Sawahlunto
Tahun 2008 – 2012

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah daerah irigasi (DI)	87	87	87	87	87
2	Luas Potensial (Ha)	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
3	Luas Terairi (Ha)	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
	a. 1/2 Teknis	166	419	503	534	508,88
	b. Sederhana	445	285	285	258	277,58
	c. Non-PU	195	168	84	20	-
	d. Tadah Hujan	966	900	900	960	-
4	Panjang Saluran (Km)	35,20	35,20	35,20	35,20	35,20

Sumber : BPS 2012

Jumlah Daerah Irigasi (DI) dari tahun 2008 sampai tahun 2012 tidak ada peningkatan yaitu sebanyak 87 DI, begitu juga dengan luas potensial daerah irigasi dari tahun 2008 sampai tahun 2012 seluas 1.772 ha. sedangkan untuk luas daerah irigasi yang terairi menggunakan sistem pengairan ½ teknis pada tahun 2008 seluas 166 ha meningkat pada tahun 2011 seluas 534 ha, sistem pengairan sederhana pada tahun 2008 seluas 445 Ha menurun pada tahun 2011 seluas 258 Ha, sistem pengairan Non-PU pada tahun 2008 menurun pada tahun 2011 seluas 20 Ha, sistem pengairan tadah hujan pada tahun 2008 seluas 966 ha menurun pada tahun 2011 seluas 960 Ha. Dan panjang saluran jaringan irigasi dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sepanjang 35,2 km.

c. Sanitasi

Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi dasar berhasil dicapai dengan adanya berbagai program yang telah digulirkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berikut tabel perkembangan proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Dasar di Kota Sawahlunto tahun 2008 s/d 2012 :

TABEL 2.37
PERSENTASE PROPORSI RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI DASAR
TAHUN 2008 s/d 2012

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Rumah Tangga	14.374	13.891	14.051	14.209	17.642
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Dasar	8.265	8.654	9.372	9.601	12.355
3	Persentase	57,5	62,3	66,7	67,57	70,03

Sumber: DKK Kota Sawahlunto

Kondisi Sanitasi terus mengalami peningkatan yaitu 57,5 % (2008), 62,3 % (2009, 66,7 % (2010), 67,57 % (2011), dan 70, 03 % (2012). Dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar (jamban keluarga) berdampak terhadap meningkatnya jumlah Desa / Kelurahan yang telah dinyatakan sebagai Desa/Kelurahan **ODF (Open Defecation Free)/SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)** yang semula 3 desa ditahun 2010, menjadi 19 desa di tahun 2012.

d. Tempat Pemakaman Umum (TPU)

Sebagai Kota kecil di Sumatera Barat, Pemerintah Kota Sawahlunto wajib menyediakan Tempat pemakamam umum bagi masyarakatnya. Untuk hal ini, Kota Sawahlunto diuntungkan dengan luasnya wilayah di Kota Sawahlunto. keberadaan tanah kaum yang menyediakan Pandam Pekuburan Khusus bagi kaumnya meringankan kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan Tempat Pemakaman umum. Berikut ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Sawahlunto kondisi 2011 s/d 2012 :

Tabel 2.38
Ketersediaan TPU Kota Sawahlunto
Tahun 2011 – 2012

NO	URAIAN	2011	2012
1	Ketersedian TPU (lokasi/ha)	7/2,5	7/2,5
2	Daya Tampung (kuburan/ha)	1.100	1.100
3	Ketersediaan TPU (kuburan/m ²)	2.750	2.750
4	Kebutuhan TPU (kuburan/m ²)	6.124	6.387
5	Kebutuhan TPU yang harus disediakan (kuburan/m ²)	3.374	3.637

Sumber: Buku Profil Daerah (Bappeda))

Jumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Sawahlunto sebanyak 7 lokasi dengan total luas 2,5 ha. Kebutuhan TPU untuk Kota Sawahlunto di Tahun 2012 adalah sebanyak 6.387 kuburan/ha, sementara yang teredia baru 2.750 kuburan/ha. Untuk memenuhi kebutuhan TPU harus tersedia sebanyak 3.637 kuburan/ha. Disamping itu masing-masing kaum dalam hubungan kekerabatan suku juga memiliki tempat pemakaman sendiri (kuburan keluarga) yang luasnya bervariasi dan tersebar di permukiman perdesaan.

e. Kebakaran

Bencana kebakaran di Kota Sawahlunto termasuk yang jarang terjadi. Keberadaan rumah penduduk yang tidak begitu rapat juga mempermudah jangkauan pelayanan pemadaman kebakaran. Hal ini berdampak positif dengan pelayanan prima terkait pemadaman kebakaran kepada masyarakat. Berikut data pemadaman kebakaran di Kota Sawahlunto dua tahun terakhir :

Tabel 2.39
Penanggulangan Bencana Kebakaran Kota Sawahlunto
Tahun 2011 – 2012

NO	URAIAN	2011	2012
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)	2	4
	Kebutuhan Mobil Pemadam (unit)	6	6
2	Jumlah Hidran Umum (unit)	0	0
	Kebutuhan Hidran Umum (unit)	±100	±100
3	Jumlah Kasus Kebakaran	36	17
4	Perkiraan Kerugian (Juta Rupiah)	438,568	413,833
5	Bantuan Pemerintah (Juta Rupiah)	18,5	52,254

Sumber: Bappeda (profil)

Khusus kebakaran rumah sebagian besar disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Oleh karena itu instalasi listrik rumah tangga setiap 5 (lima) tahun harus diganti. Jumlah sarana pemadam kebakaran masih kurang 2 unit pemadam kebakaran dimana pada tahun 2012 tersedia 4 mobil pemadam kebakaran (3 unit mobil besar dan 1 unit mobil kecil) untuk melayani daerah yang sempit. Selain itu kebutuhan akan hidran umum juga sangat dibutuhkan, dimana pada saat ini belum ada hidran umum yang siap dioperasikan untuk penanggulangan bencana kebakaran di Kota Sawahlunto.

f. Rasio Panjang Jalan per Luas Wilayah

Untuk melihat keberhasilan suatu Kota dalam penyediaan jalan kepada masyarakatnya, dapat dilihat dari rasio panjang jalan dengan luas wilayah. Berikut data panjang jalan di Kota Sawahlunto dengan perbandingan luas wilayah di Kota Sawahlunto

Tabel 2.40
Rasio Panjang Jalan Dengan Luas Wilayah
Tahun 2008 – 2012

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jalan Negara (Km)	8,15	8,15	30,59	30,59	30,59
2	Jalan Provinsi (Km)	27,09	27,09	4,65	4,65	4,65
3	Jalan Kota (Km)	440,00	440,29	440,29	440,29	440,29
	Total Panjang Jalan (Km)	476,05	476,34	476,34	476,34	476,34
	Luas Wilayah (Km ²)	273,45	273,45	273,45	273,45	273,45
	Rasio	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74

Sumber: Bappeda

Dalam kurun waktu 5 tahun kebelakang ini panjang jalan di kota Sawahlunto tidak mengalami penambahan yang cukup signifikan.

Hal ini dapat dilihat dari Luas wilayah Kota seluas 273,45 Km² dengan panjang jalan 476,34 Km sehingga rasio panjang jalan dengan luas wilayah adalah 1,74. atau untuk 1 jiwa penduduk, tersedia jalan seluas 820,31 M².

2.3.1.13 Perumahan Rakyat

a. Persentase Luas Permukiman Yang Tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Tabel 2.41
Persentase Luas Permukiman yang Tertata
di Kota Sawahlunto Tahun 2011-2012

No	Uraian	2011	2012
1	Luas area permukiman tertata (ha)	1.134	1.134
2	Total Luas area permukiman (ha)	3.063	3.240
3	Persentase Luas Permukiman yang Tertata	37,02	35,0

Sumber: RTRW, RP4D

b. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Pemerintah Kota Sawahlunto telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan ketersediaan perumahan layak dan sehat.

Tabel 2.42
Persentase Rumah Tidak Layak Huni Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah rumah tidak layak huni (unit)	2.702	2.421	2.112	1.904	1.829
2.	Jumlah rumah tangga (RT)	11.065	11.890	11.990	12.090	14.090
3.	Persentase rumah tidak layak huni	18,80	17,42	15,03	13,07	12,98

Sumber: RP4D, Laporan PNPM P2KP tahun 2011

Pada tahun 2008 jumlah rumah tidak layak huni mencapai 2.702 unit dan berkurang menjadi 1.829 unit rumah pada tahun 2012. Penurunan rumah tidak layak huni ditangani dari berbagai program dalam bentuk rehabilitasi dan bantuan biaya rehab rumah tidak layak huni.

2.3.1.14 Penataan Ruang

Kondisi Kota Sawahlunto terkait dengan urusan penataan ruang salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Kebutuhan luas RTH publik Kota Sawahlunto pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota 27.345 Ha. Terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat, sehingga kebutuhan RTH adalah 8.203 ha meliputi RTH privat adalah 2.734 ha, dan RTH publik seluas 5.469 ha,

Perkembangan RTH kota Sawahlunto sejak 2008-2012 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.43
Ketersediaan RTH di Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (ha)	1.146	1.621	2.096	2.571	2.946
2	Luas Wilayah (ha)	27.345	27.345	27.345	27.345	27.345
3	Persentase (%)	4,19	5,92	7,66	9,40	10,77

Sumber: Bappeda Kota Sawahlunto

Ketersediaan RTH di Kota Sawahlunto dari tahun 2008 seluas 1,146 ha atau sebesar 4,19% dari luas Kota dan terus meningkat hingga pada tahun 2012 terdapat RTH publik dan privat dengan luas keseluruhan 2,946 ha atau sebesar 10,77% dari luas kota, sehingga Kota Sawahlunto masih membutuhkan tambahan RTH minimal seluas 19,23% dari luas wilayah kota yang diupayakan dari keberadaan taman kota yang ada di Kota Sawahlunto beserta Kawasan Sempadan (Sempadan Sungai dan Rel Kereta Api).

b. Rasio Bangunan yang Memiliki IMB

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, Setiap orang/badan usaha di Kota Sawahlunto yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku harus memiliki izin membuat bangunan (IMB). Perkembangan rumah dan bangunan yang memiliki IMB dari tahun 2008 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Rasio Bangunan ber IMB Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Bangunan	11.065	11.890	11.990	12.090	13.117
2	Jumlah Bangunan ber-IMB	4.662	4.662	5.120	5.219	5.824
3	Rasio	0,42	0,40	0,43	0,44	0,45

Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Pada tahun 2008 jumlah bangunan yang memiliki IMB sebanyak 4.662 unit dari 11.065 unit bangunan dengan rasio bangunan ber IMB mencapai 0.42 sedangkan pada tahun 2012 jumlah bangunan yang telah memiliki IMB sebanyak 5.824 unit dari 13.117 unit rumah dengan rasio 0,44, hal ini memperlihatkan bahwa jumlah bangunan di Kota Sawahlunto yang memiliki IMB relatif masih rendah.

2.3.1.15 Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut;

a. Persentase Penanganan Sampah

Tantangan utama dalam penanganan persampahan adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis, karena selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan TPSA juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut.

Perkembangan persentase sampah yang tertangani dari tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45
Persentase Penanganan Sampah Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012

No	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Rata-rata volume sampah yang tertangani di TPA (m ³ /hari)	20,00	20,00	20,00	21,27	19,43
2	Rata-rata volume sampah yang dihasilkan (m ³ /hari)	94,72	95,38	98,09	99,30	100,16
3	Persentase Penanganan Sampah di TPA (%)	15,84	15,73	18,20	16,06	14,55

Sumber : BLH

Pada tahun 2008 sampai tahun 2010 rata-rata volume penanganan sampah di TPA sebesar 20 M³/hari, pada tahun 2011 sebesar 21,27 M³/hari dan tahun 2012 sebesar 19,43M³/hari. Persentase penanganan sampah di TPA masih sangat rendah yaitu pada tahun 2012 masih 14,55% yang dikelola di TPA Kayu Gadang.

b. Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)

Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Rasio Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.46
Rasio Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah TPSS (unit)	146	146	246	246	251
2	Jumlah Daya Tampung TPSS (m ³)	90,9	90,9	106,2	106,2	107,7
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	54.913	55.291	56.866	57.567	58.068
4	Rasio Daya Tampung TPSS thd Jumlah penduduk (m ³ /1000 jiwa)	1,7	1,6	1,9	1,8	1,9

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto

Jumlah TPSS di Kota Sawahlunto tahun 2008 sebanyak 146 unit dengan daya tampung 90,9 M³, rasio daya tampung TPSS terhadap jumlah penduduk 1,7 m³ di tahun 2008, meningkat menjadi 1,9 per 1.000 jiwa, artinya untuk setiap 1000 jiwa tersedia TPSS 1,9 m³. hal ini sudah mencukupi mengingat mengingat produksi setiap 1000 jiwa adalah 1,698 m³ per hari.

c. Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah

Pengangkutan sampah yang dihasilkan rumah tangga dan lainnya dari TPS menuju TPA menggunakan truk pengangkutan sampah setiap hari. Berikut disajikan data rasio truk pengangkut sampah terhadap jumlah penduduk di Kota Sawahlunto

Tabel 2.47
Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Truk Pengangkut Sampah (unit)	8	8	8	7	7
2	Jumlah Daya Tampung Truk (m ³)	32	32	32	28	28

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
3	Jumlah Penduduk (jiwa)	54.913	55.291	56.866	57.567	58.064
4	Rasio Daya Tampung Truk thd Jumlah penduduk	0,00058	0,00058	0,00056	0,00049	0,00048

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto

Jumlah truk pengangkut sampah yang ada di Kota Sawahlunto mengalami penurunan dari tahun 2008 sebanyak 8 unit menjadi 7 unit pada tahun 2012, dengan kapasitas 28 m³, sehingga rasio daya tampung truk terhadap 1000 penduduk tahun 2012 adalah 0,48 yang berarti kemampuan untuk mengangkut sampah dengan truk hanya sebanyak 480 kg untuk setiap 1000 penduduk. Kemampuan daya tampung ini dirasa sangat kurang karena setiap 1000 penduduk menghasilkan sampah 1.698 kg per hari.

2.3.1.16 Perhubungan

Pemerintah Kota Sawahlunto selalu meningkatkan kualitas dan potensi perhubungan sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan Angkutan Darat yang melitasi jaalan nasional di Kota Sawahunto terus meningkat. Hal ini menyebabkan beban jalan raya nasional semakin tinggi dan dalam jangka panjang berpotensi terjadinya kerusakan kondisi jalan. Untuk mengatasi hal ini perlu dimanfaatkan kembali jaringan kereta api yang menghubungkan Sawahlunto – Padang.

Kondisi daerah Kota Sawahlunto terkait dengan urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut.

a. Moda Transportasi

Tabel 2.48
Jumlah dan Jenis Moda Transportasi
Tahun 2009-2012

NO	JENIS ANGKUTAN	Satuan	2009	2010	2011	2012
1	Truck	Unit	216	222	236	281
2	Bus/Mikro Bus	Unit	19	20	25	19
3	Pick Up	Unit	324	246	353	303
4	Angkot	Unit	68	68	49	46
5	Sedan	Unit	114	124	119	128
6	Jeep	Unit	112	116	123	123
7	Kereta Api	Unit	2	2	2	2
8	Travel Biro	Buah	25	25	25	25
9	Sepeda Motor	Unit	9.338	9.972	10.980	11.631
10	Bus Pariwisata	Unit	2	2	2	2

Sumber: SAMSAT Kota Sawahlunto

Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa dalam 4 tahun terakhir jumlah sepeda motor dari tahun 2009 sebanyak 9.338 unit mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2012 sudah mencapai 11.631 unit. sedangkan angkutan kota terjadi penurunan pada tahun 2012 menjadi 46 unit dari 68 unit di tahun 2009.

b. Sarana Lalu Lintas

Dalam mendukung kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, maka disediakan berbagai sarana pendukung

antara lain rambu rambu lalu lintas, kaca tikungan, warning light dan sebagainya. Namun penyediaan sarana pendukung ini masih perlu ditingkatkan, khususnya pada ruas-ruas jalan utama, pada daerah yang ramai aktivitasnya dan pada daerah yang rawan kecelakaan lalu lintas. Ketersediaan sarana pendukung lalu lintas sangat diperlukan dengan semakin tingginya arus lalu lintas yang ada di ruas-ruas jalan di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.49
Sarana Lalu Lintas Jalan Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012

NO	SARANA LALU LINTAS	SATUAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kaca Tikungan	Unit	79	79	79	79	79
2	Warning Light	Unit	5	5	5	5	5
3	Trafic Light	Unit	-	-	-	-	-
4	Rambu-rambu	Unit	324	324	324	342	415
5	Guadril	Unit	163	163	163	123	167
6	Deliniatur	Unit	272	272	272	100	100
7	Trapikun	Unit	100	100	100	100	100
8	Marka Jalan	M ²	1650	1650	1650	1650	1650
9	Penyebrangan	Unit	-	-	-	-	-
10	Papan Penunjuk Arah	Buah	5	5	5	5	6
11	Papan Informasi Lalu Lintas	Buah	5	5	5	5	6

Sumber: Kantor Perhubungan Kota Sawahlunto

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana lalu lintas di Kota Sawahlunto dalam upaya mewujudkan visi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya selalu terus ditingkatkan baik rambu-rambu, guadril, deliniatur, marka dan lain-lain, namun ketersediaan sarana lalu lintas ini dirasakan masih kurang sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh jalan.

Selain sarana transportasi diatas, di Kota Sawahlunto juga terdapat 3 (tiga) buah stasiun Kereta Api. Panjang lintasan kereta api yang menghubungkan Pusat Kota Sawahlunto, Muaro Kalaban dan Silungkang ini mencapai 18 (delapan Belas) Km. Kedepannya, Pemerintah Kota Sawahlunto mendukung semua kebijakan PT. KAI dalam mengembangkan sarana transportasi ini. Saat ini, sarana angkutan massal ini tidak beroperasi lagi sebagai alat transportasi umum, akan tetapi pihak Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan PT. KAI Cabang Sawahlunto telah menyepakati Kereta Api yang ada digunakan sebagai kereta api Wisata dengan stasiun utamanya di Pusat Kota dijadikan sebagai Museum Kereta api.

2.3.1.17 Komunikasi informasi

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan komunikasi dan informatika dapat dilihat dari indikator kinerja tabel berikut;

Tabel 2.50
Layanan Komunikasi dan Informatika
Kota Sawahlunto Tahun 2008-2012

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Kantor Pos (unit)	4	4	4	4	4
2	Jumlah Sambungan Telepon (SST)	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
3	Jumlah Warnet (unit)	27	27	27	27	45

Sumber: Bappeda

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kantor Pos di Kota Sawahlunto sebanyak 4 unit sementara itu jumlah Warnet pada tahun 2008 sebanyak 27 unit mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 45 unit.

2.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.2.1 Pertanian

Padi merupakan komoditas pertanian tanaman pangan utama di kota Sawahlunto dan senantiasa menjadi salah satu subsector andalan yang menyerap cukup banyak tenaga kerja. Secara alami luas lahan sawah di kota Sawahlunto akan berkurang karena alih fungsi lahan sedangkan pencetakan lahan baru tidaklah memungkinkan, karena itu peningkatan produktivitas merupakan satu satunya pilihan untuk menaikkan produksi padi.

Perkembangan produktivitas lahan sawah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.51
Produktivitas Padi per Hektar Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012

NO	PRODUKTIVITAS PADI	2008	2009	2010	2011	2012
1	Produksi tanaman padi (Ton)	12.370	11.689	13.523	12.397	13.928
2	Luas panen tanaman padi (ha)	2.577	2.329	2.770	2.473	3.273.
3	Produktivitas padi (Ton/Ha)	4,8	5,01	4,88	5,01	4,26

Sumber : BPS 2012

Produktivitas tanaman padi per hektar kota Sawahlunto setiap tahunnya dari tahun 2008-2011 selalu berada pada angka diatas 4,8

ton/ha, namun pada tahun 2012 produktivitas padi perhektar mengalami penurunan pada angka 4,26 ton/ha.

Pada sub sector perkebunan program pendistribusian bibit gratis dari pemerintah telah menjadikan komoditas karet dan kakao sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat khususnya di wilayah pedesaan yang masih memiliki lahan potensial untuk usaha perkebunan.

Sebagai salah satu sector andalan maka sub sector tanaman pangan dan sub sector perkebunan selalu memberikan kontribusi yang semakin besar perkembangan ekonomi kota yang tercermin dalam PDRB sebagai berikut :

Tabel 2.52
Kontribusi Sub Sektor Pertanian dan Perkebunan
Terhadap PDRB Tahun 2008-2012 (Rp.milyar)

NO	PDRB	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman pangan dan hortikultura)					
	Atas Dasar Harga Berlaku	43.9	50.0	56.7	65.4	76.6
	Total PDRB	861.9	984.2	1121.6	1.274.0	1425.2
	Kontribusi (%)	5,10	5,08	5,06	5,13	5,38
2	Jumlah Kontribusi Sektor Perkebunan					
	Atas Dasar Harga Berlaku	4.0	4.6	7.1	7.7	8.0
	Total PDRB	861.9	984.2	1121.6	1274.0	1425.2
	Kontribusi (%)	0,47	0,48	0,63	0,61	0,57

Sumber : PDRB 2012

Sektor pertanian memberikan kontribusi yang nyata kepada PDRB Kota Sawahlunto yakni melalui sub sektor tanaman pangan dan hortikultura sebesar Rp. 43.951,59 juta atas dasar harga berlaku pada tahun 2008. Angka ini terus beranjak naik setiap tahun, hingga tahun 2012 mencapai Rp. 76.635,39 juta atas dasar harga berlaku. Pada sub

sektor perkebunan, peningkatan juga terjadi sangat pesat, tahun 2008, kontribusi sub sector ini sebesar Rp. 4.057,82 juta dan tahun 2012 mencapai Rp. 8.057,46 juta.

2.3.2.2 Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor energy dan sumberdaya mineral terutama didukung oleh keberadaan pertambangan batubara, namun menipisnya cadangan batubara pada tambang terbuka sangat mempengaruhi terhadap produksi batubara yang cenderung menurun, meskipun secara nominal nilai PDRB sector ini terus meningkat sebagaimana terlihat pada table berikut :

Tabel 2.53
Kontribusi Sub Sektor Non Migas Terhadap PDRB
Kota Sawahlunto Tahun 2008-2012

NO	PDRB	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Kontribusi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Non Migas)					
	Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.Milyar)	104.8	123.4	123.6	120.9	118.4
	Total PDRB (Rp.milyar)	861.9	984.2	1121.6	1274.0	1425.2
	Kontribusi (%)	12,17	12,55	11,03	9,50	8,31

Sumber : PDRB 2012

Kontribusi yang diberikan oleh sektor energi dan sumber daya mineral untuk sub sektor non migas cukup besar, yakni sebesar Rp. 104.895,98 juta pada tahun 2008, dan terus meningkat hingga menjadi Rp. 118.413,11 juta pada tahun 2012, namun peranan sector ini semakin berkecil dari 12,17% tahun 2008 menjadi hanya 8,31% tahun 2012.

2.3.2.3 Pariwisata

Pembangunan industri pariwisata kota Sawahlunto merupakan wujud dari keinginan untuk mencapai visi kota “ menjadi kota wisata tambang yang berbudaya tahun 2012” , karena itu semua sector pembangunan lain diarahkan guna menunjang percepatan pembangunan pariwisata. Inovasi dan kreativitas menjadi factor utama keberhasilan sector ini disamping potensi alam yang tersedia, karena konsep “heritage tourisme’ menjadi unggulan dan pembeda kota Sawahlunta dengan daeah tujuan wisata lain. Perkembangan kepariwisataan Kota Sawahlunto dapat terlihat angka kunjungan wisatawan sebagai berikut :

Tabel 2.54
Kunjungan Wisata Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012

NO	OBJEK WISATA	JUMLAH KUNJUNGAN				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Wisata Ziarah	2.320	8.185	9.952	11.247	*
2	Museum Gudang Ransum	6.250	6.381	5.640	8.014	9.359
3	Museum Kereta Api	978	2.069	2.477	2.569	4.034
4	Air Dingin / Waterboom	201.800	157.436	150.392	167.073	170.305
5	Kereta Api Wisata	-	40.456	42.854	38.648	*
6	Wisata MICE / Convensi	4.947	34.231	36.489	48.379	249.870
7	Taman Satwa Kandi	83.543	85.139	128.084	279.958	302.566
8	Even Pacu Kuda	175.000	192.000	169.601	25.000	*
9	Kereta Api Mak Itam	-	7.641	8.281	1.960	1.500
10	Even Motocross / Roadrace	12.356	58.865	63.123	92.464	*
11	Lobang Mbah Soero	1.330	3.307	2.801	3.891	*
12	Desa wisata rantih	-	-	865	907	3.447
13	Makan bajamba	-	-	16.000	20.000	*
14	Simfest	-	-	9.000	17.000	*

15	Pekan Muharam	-	-	3.000	12.000	*
16	Hotel/Penginapan	-	-	4.742	7.875	5.617
	Jumlah (Jiwa)	488.524	595.710	653.301	736.985	746.698

Sumber : SDA 2012

Keterangan : *) Data Tahun 2012 digabungkan ke Item Wisata MICE

Satu hal yang membanggakan karena sejalan dengan visi kota sawahlunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya, maka jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata kota sawahlunto selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2008 total pengunjung sebanyak 488.524 jiwa, dan pada tahun 2012, jumlah kunjungan menjadi hampir dua kali lipat yakni sebanyak 746.698 jiwa.

2.3.2.4 Kelautan dan Perikanan

Potensi bagi pengembangan perikanan di Kota Sawahlunto sangat terbatas akibat ketersediaan air bagi budidaya perikanan sangat kecil. Pada sisi lain seiring perkembangan jumlah penduduk kebutuhan atas ikan terus meningkat sehingga ketersediaan ikan produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Berikut ini perkembangan produksi dan konsumsi ikan tahun 2008-2012.

Tabel 2.55
Konsumsi Ikan Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012

No	Konsumsi Ikan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah produksi ikan (ton)	105,29	154,3	134,7	112,3	103,66
2	Jumlah target daerah produksi ikan (ton)	105	107	107	109	109
3	Jumlah Konsumsi Ikan (ton)	4.728	5.215	5.842	2.078	2.861

Sumber : SDA 2012

Kecilnya produksi ikan juga menyebabkan kontribusi sub sector ini terhadap PDRB juga sangat kecil sebagaimana terlihat tabel berikut :

Tabel 2.56
Kontribusi sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB
Tahun 2008-2012

NO	PDRB	2008	2009	2010	2011	2012
1	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)	857,93	1173,67	1252,54	1311,59	1497,1
2	Total PDRB (Milyar)	861.9	984.2	1121.6	1274.0	1425.2
3	Kontribusi (%)	0,10	0,12	0,11	0,10	0,11

Sumber : PDRB 2012

2.3.2.5 Perdagangan

Perkembangan sektor perdagangan sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi pada sector lain terutama sector pertanian, industry , pertambangan dan sumberdaya mineral serta perkembangan di bidang pariwisata. Perkembangan pesat di bidang kepariwisataan menumbuhkan banyak usaha penunjang lainnya seperti hotel dan restoran yang berkontribusi terhadap sector perdagangan.

Perkembangan kontribusi sektor Perdagangan, hotel dan restoran, dalam PDRB selama 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.57
Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Terhadap PDRB

No	Kontribusi	2008	2009	2010	2011	2012
1	Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar)	97.3	117.3	135.9	157.4	178.6
2	Total PDRB (Milyar)	861.9	984.2	1121.6	1274.0	1425.2
3	Kontribusi (%)	11,29	11,93	12,12	12,36	12,54

Sumber : PDRB 2012

Dari tabel diatas, terlihat bahwa atas dasar harga berlaku, selama lima tahun semenjak tahun 2008 hingga 2012, jumlah kontribusi dari sektor perdagangan, hotel dan restoran selalu meningkat baik itu dari jumlah maupun persentasenya.

2.3.2.6 Industri dan Ketransmigrasian

Sektor industry di kota Sawahlunto didominasi oleh industry kecil pada skala rumah tangga dengan berbagai produk yang dihasilkan. Salahsatu produk andalan adalah kerajinan songket yang dikerjakan menggunakan alat tenun bukan mesin yang brkembang sangat pesat seiring perkembangan sector pariwisata.

Perkembangan kontribusi sector industry terhadap PDRB selama tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Kontribusi Sektor Industri Terhadap
PDRB Tahun 2008-2012

NO	KONTRIBUSI	2008	2009	2010	2011	2012
1	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta)	91.546,17	108.799,80	127.256,28	145.486,87	157.232,03
2	Total PDRB (Juta)	861.957,22	984.252,63	1.121.634,47	1.274.070,67	1.425.280,34
3	Kontribusi (%)	10,62	11,05	11,35	11,42	11,03

Sumber : PDRB 2012

Dari tabel, terlihat bahwa kontribusi atas dasar harga berlaku dari sektor industri sub sektor industri tanpa migas selalu meningkat dari tahun 2008-2012.

Peningkatan kontribusi ini didukung oleh perkebangan jumlah unit usaha industry sebagaimana terlihat pada table berikut :

Tabel 2.59
Jumlah Industri di Kota Sawahlunto
Tahun 2012

No	Industri	Jumlah unit usaha	Nilai produksi/ omset
1	Industri Kecil (industri makanan dan kerajinan)	715	Rp. 61.208.759.000,-
2	Industri Menengah	4	Rp. 3.755.086.000,-

Sumber : Dinas Perindagkopnaker Kota Sawahlunto 2013

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Kondisi Kota Sawahlunto terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari : kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ Infrastruktur dan iklim berinvestasi.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan pengaruh bagi peningkatan daya saing daerah.

Kondisi Kota Sawahlunto terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari : pengeluaran perkapita atau

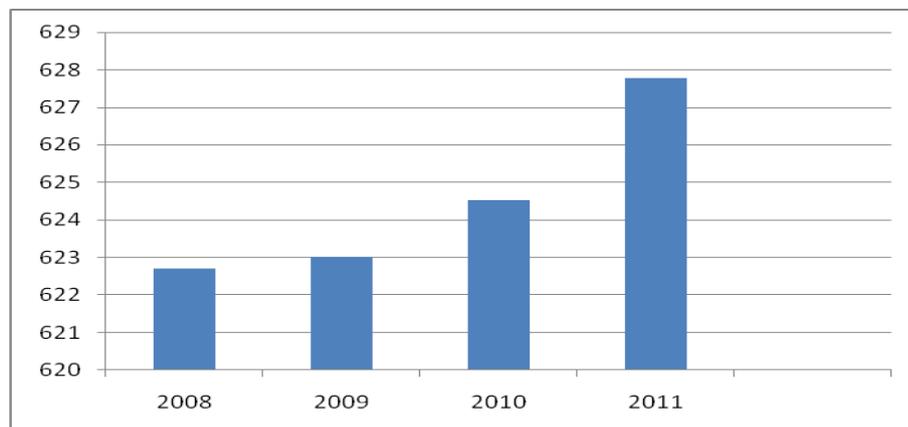
angka konsumsi rata-rata perkapita (pangan dan non pangan), dan produktivitas total daerah.

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

a. Pengeluaran Perkapita

Pada tahun 2011 pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga perkapita di Kota Sawahlunto mencapai Rp. 627.790,-. Angka ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Angka pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga perkapita selalu meningkat dari tahun ketahun. Semakin naik angka konsumsi rumah tangga, itu menunjukkan semakin besar pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.10
Angka Konsumsi Rata-rata Rumah Tangga Perkapita
di Kota Sawahlunto tahun 2008-2011 (ribu rupiah)



Sumber : BPS Kota Sawahlunto

2.4.1.2. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Hal ini tergambar melalui PDRB atas

dasar harga berlaku. Dari ke-9 sektor/ lapangan usaha tersebut, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sawahlunto adalah sektor/ lapangan usaha jasa-jasa, dan yang kontribusinya paling kecil sektor listrik, gas dan air bersih.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai produktivitas total daerah persektor/ lapangan usaha (ADH Berlaku) di Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2008-2012

Pada tahun 2012 secara nominal kontribusi sektor jasa-jasa tetap merupakan sektor ekonomi yang paling nilai tambahnya dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, yang mencapai Rp. 412.968.270.000,- (28,97%). Bila dibandingkan dengan kurun waktu 2008-2011 mengalami kenaikan rata-rata 1% dari PDRB tahun bersangkutan. Posisi berikutnya di tempati oleh sektor/ lapangan usaha perdagangan, Hotel dan Restoran dengan nilai sebesar Rp. 178.670.590.000,- meningkat dibanding tahun 2011 yang jumlahnya sebesar Rp. 157.427.400.000,-. Sektor/ lapangan usaha industri pengolahan menduduki urutan ketiga dalam kontribusinya terhadap Kota Sawahlunto, yakni dari Rp. 145.486.870.000,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 157.232.030.000,- pada tahun 2012.

Tabel 2.60
Produktivitas Total Daerah per Sektor di kota Sawahlunto
tahun 2008 – 2012 (Rp.milyar)

No	Sektor/ Lapangan Usaha	2008		2009		2010		2011		2012*	
		(Rp)	%								
1.	Pertanian	78.7	9,14	95.7	9,73	114.6	10,22	128.6	10,10	150.1	10,54
2.	Pertambang an dan	168.8	19,59	160.6	16,32	145.4	12,97	142.7	11,21	137.8	9,67

No	Sektor/ Lapangan Usaha	2008		2009		2010		2011		2012*	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
	Pengaliran										
3.	Industri Pengolahan	91.5	10,62	108.7	11,05	127.2	11,35	145.4	11,42	157.2	11,03
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	9.4	1,10	13.2	1,34	14.8	1,33	16.0	1,26	18.3	1,29
5.	Bangunan	62.5	7,26	72.8	7,40	97.0	8,65	114.5	8,99	131.8	9,25
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	97.3	11,29	117.3	11,93	135.9	12,12	157.4	12,36	178.6	12,54
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	91.1	10,57	105.5	10,72	120.7	10,76	141.0	11,07	159.4	11,19
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	45.7	5,30	52.0	5,29	61.5	5,48	69.8	5,49	78.7	5,53
9.	Jasa-Jasa	216.5	25,12	258.0	26,22	304.1	27,12	358.13	28,11	412.9	28,97
	PDRB	861.9		984.2		1121.6		1274.0		1425.2	

Sumber : BPS Kota Sawahlunto (PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2012)

Pada tahun 2012 secara nominal kontribusi sektor jasa-jasa tetap merupakan sektor ekonomi yang paling nilai tambahnya dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, yang mencapai Rp. 412.968.270.000,- (28,97%). Bila dibandingkan dengan kurun waktu 2008-2011 mengalami kenaikan rata-rata 1% dari PDRB tahun bersangkutan. Posisi berikutnya di tempati oleh sektor/ lapangan usaha perdagangan, Hotel dan Restoran dengan nilai sebesar Rp. 178.670.590.000,- meningkat dibanding tahun 2011 yang jumlahnya sebesar Rp. 157.427.400.000,-. Sektor/ lapangan usaha industri pengolahan menduduki urutan ketiga dalam kontribusinya terhadap Kota

Sawahlunto, yakni dari Rp. 145.486.870.000,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 157.232.030.000,- pada tahun 2012.

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.2.1 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas mempengaruhi investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah. Semakin rendah angka kriminalitas pada suatu daerah maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. Angka kriminalitas di Kota Sawahlunto dapat dijelaskan seperti tabel berikut :

Tabel 2.61
Angka Kriminalitas di Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Curat (Pencurian dan pemberatan)	24	38	9	21	43
2.	Penggelapan	6	9	2	3	3
3.	KDRT	3	8	8	2	5
4.	Penipuan	9	6	4	5	10
5.	Pengrusakan	4	5	1	6	7
6	Curanmor	4	3	7	8	17
7	Pembakaran/kebakaran	7	1	2	2	1
8	Anirat (Penganiayaan dan pemberatan)	9	3	5	0	10
9	Curas (pencurian dengan pemerasan)	2	1	0	0	3
10	Perkosaan/cabul	3	1	2	4	8
11	Pembunuhan	0	0	0	0	0
*	Total jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	71	75	40	51	107
**	Jumlah penduduk	54.913	55.291	56.866	57.567	58.068
	Angka kriminalitas (*)/(**) per 1.000 jumlah penduduk	1,29	1,36	0,68	0,89	0,184

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka 2012

Angka Kriminalitas selama periode 2008-2011 memeperlihatkan penruunan yang cukup tajam dari 1,29 menjadi 0,68 namun tahun 2012 kembali meningkat menjadi 1,84, yang didominasi oleh kasu pencurian dan pemberatan dan kasus pencurian kendaraan bermotor.

2.4.2.2 Jumlah Demo

Jumlah investasi yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah juga dipengaruhi oleh keamanan suatu daerah, yang salah satu indikatornya adalah jumlah demonstrasi. Semakin rendah jumlah demonstrasi pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanam investasi didaerah tersebut. Di Kota Sawahlunto jumlah demonstiran yang terjadi dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.62
Jumlah Demostrasi di Kota Sawahlunto
tahun 2008-2012

No	Jumlah demo dalam satu tahun	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah demonstrasi	-	-	2	2	-

Sumber : Sawahlunto Dalam Angka tahun 2012

2.4.2.3 Lama Proses Perizinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi yang

dibutuhkan investori. Jenis perizinan yang dilayani pada tahun 2012 terdiri antara lain : izin usaha perdagangan (SIUP), TDP, TDI, IMB, HO, IUP, IUJP, Izin Pengumpulan Bahan Tambang Industri, Izin Penumpukan Bahan Bakar Industri, Reklame . Lamanya waktu untuk pengurusan izin tersebut serta biaya resmi dalam mengurus izin tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.63
Lama Proses dan Biaya Perizinan di Kota Sawahlunto
Tahun 2012

No	Uraian	Lama Mengurus (Hari)	Biaya
1	SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)	1 Hari	Tanpa biaya
2	TDP (Tanda Daftar Perusahaan)	1 Hari	Tanpa biaya
3	TDI (Tanda Daftar Industri)	1 Hari	Tanpa biaya
4	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	7 Hari	Sesuai Perda
5	HO (Izin Gangguan)	10 Hari	Sesuai Perda
6	IUP (Izin Usaha Pertambangan)	30 Hari	Tanpa biaya
7	IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan)	30 Hari	Tanpa biaya
8	Izin Pengumpulan Bahan Tambang Industri	30 Hari	Tanpa biaya
9	Izin Penumpukan Bahan Bakar Industri	30 Hari	Tanpa biaya
10	Reklame	7 Hari	Sesuai Perda

Sumber : Dinas Perindagkopnaker

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto memberikan kemudahan kepada orang pribadi ataupun perusahaan dalam proses pengurusan perizinan yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi yang diperlukan dan sebagian besar dari proses perizinan tersebut tidak dipungut biaya seperti pengurusan SIUP,TDP,TDI dan lainnya.

2.4.2.4 Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan perusahaan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan/perusahaan.

Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah realisasi serta macam pajak dan retribusi di Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2008 – 2012.

Tabel 2.64
Jumlah Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
di Kota Sawahlunto
Tahun 2008 – 2012 (rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Pajak Daerah	1.535.693.645,-	1.595.546.610,-	1.932.701.833,-	2.320.146.288,-	2.969.920.454,-
	Pajak Hotel	31.379.546,-	30.067.925,-	33.195.768,-	27.700.167,-	89.961.390,-
	Pajak Restoran	448.773.864,-	443.512.934,-	457.767.176,-	565.254.594,-	580.219.684,-
	Pajak Hiburan	10.785.850,-	7.645.000,-	200.760.450,-	249.466.600,-	484.108.100,-
	Pajak Reklame	42.381.925,-	31.145.481,-	29.866.489,-	40.284.352,-	41.303.357,-
	Pajak Penerangan Jalan	952.643.103,-	1.058.779.295,-	1.190.329.195,-	1.371.716.755,-	1.475.439.589,-
	Pajak Parkir	-	-	3.948.500,-	1.661.400,-	2.610.160,-
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	49.729.357,-	24.395.975,-	16.834.255,-	42.810.120,-	8.084.734,-
	Pajak BPHTB	-	-	-	21.252.300,-	288.193.440,-
2	Jumlah Retribusi Daerah	13.611.889.452,-	13.891.964.054,-	11.781.537.158,-	3.822.298.255,-	2.295.581.904,-
	Retribusi Jasa Umum	9.811.243.365,-	10.423.814.730,-	9.743.779.557,-	1.099.628.057,-	1.432.525.135,-
	Retribusi Jasa Usaha	3.065.846.487,-	2.789.965.224,-	1.942.703.023,-	2.630.251.698,-	804.185.308,-
	Retribusi Perizinan Tertentu	734.799.600,-	678.184.100,-	95.054.578,-	92.418.500,-	58.871.461,-

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
3	Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak (PBB, PPh ps1 21, PPh 25/29, HPH, Eksplorasi dan Eksploitasi dll	15.213.304.412,-	15.213.304.412,-	18.462.028.627,-	22.708.276.757,-	28.439.344.012,-

Sumber : DPPKAD Kota Sawahlunto

Dari tabel diatas dapat terlihat rata-rata pertumbuhan pajak daerah dari kurun waktu 2008 – 2012 sebesar 18,28 %, dimana tahun 2008 pajak daerah Kota Sawahlunto sebesar Rp. 1.535.693.645,- menjadi Rp. 2.969.920.454,- pada tahun 2012, hal disebabkan oleh kenaikan pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak hiburan.

Penerimaan retribusi daerah selama kurun waktu 2008 – 2012 sangat menurun dari tahun 2008 sebesar Rp. 13.611.889.452,- berkurang menjadi Rp. 2.295.581.904,- tahun 2012 atau tumbuh minus 83,1%. Penurunan yang signifikan terjadi pada retribusi jasa umum dimana RSUD Kota Sawahlunto menjadi BLUD sehingga pencatatan retribusi pelayanan kesehatan dari RSUD dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan dana bagi hasil pajak/bukan pajak untuk tahun 2008 sebesar Rp. 15.213.304.412,- meningkat menjadi Rp. 28.439.344.012,- pada tahun 2012, atau sebesar 87%., yang disebabkan meningkatnya bagi hasil pajak penghasilan, bagi hasil iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty).

2.4.2.5 Persentase Desa yang Berstatus Swasembada

Berdasarkan statusnya desa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yakni Swadaya (tradisional), Swakarya (transisional) dan desa Swasembada (berkembang).

Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri : daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana sangat kurang, hubungan antarmanusia sangat erat dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah : kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi, desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian, telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain, alur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada : kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan, penduduknya padat-padat, telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain dan partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

Berikut disajikan data mengenai jumlah desa swadaya, swakarya dan swasembada di Kota Sawahlunto tahun 2008 – 2012.

Tabel 2.65
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa di Kota Sawahlunto

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Desa Swadaya	-	-	-	-	-
2	Jumlah Desa Swakarya	27	27	27	27	27
3	Jumlah Desa Swasembada	-	-	-	-	-
4	Jumlah Desa (1+2+3)	27	27	27	27	27
5	Persentase Desa Berstatus Swasembada Dibagi Jumlah Desa (3 / 4)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Sumber : Kantor PMPKB

Dari uraian dan tabel diatas terlihat bahwa dari kurun waktu 2008 – 2012 desa yang ada di Kota Sawahlunto tidak memiliki desa yang berstatus desa swadaya hanya ada desa swakarya yang dalam proses menuju desa swasembada.

2.4.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.3.1 Luas Wilayah Produktif

Tabel 2.66
Luas Wilayah Produktif Tahun 2008-2012

Tahun	Luas Wilayah Produktif (ha)
2008	15.250
2009	15.250
2010	15.250
2011	15.330
2012	15.330

Sumber : BPS (SDA 2012)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa sejak 2008 luas wilayah produktif di kota Sawahlunto tidaklah mengalami banyak perubahan sampai tahun 2012 pada kisaran 15.330 Ha.

2.4.3.2 Luas Wilayah Industri

Tabel 2.67
Luas Wilayah Industri
Tahun 2008-2012

Tahun	Luas Wilayah Industri(ha)
2008	70
2009	70
2010	70
2011	70
2012	70

Sumber : BPS (SDA 2012)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa sejak 2008 luas wilayah produktif di kota Sawahlunto tidaklah mengalami perubahan sampai tahun 2011 pada kisaran 70 Ha yang tersebar diseluruh wilayah kota

2.4.3.3 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Menurut fungsinya, bank dibagi 2 (dua) bagian, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat dan berdasarkan kegiatan usahanya bank dibagi menjadi : bank konvensional dan bank syariah.

Tabel 2.68
Jenis, Jumlah Bank Serta Kantor Pelayanan di Kota Sawahlunto
Tahun 2012

NO.	URAIAN	2012
1.	Bank Umum	9

NO.	URAIAN	2012
	1.1. Konvensional	7
	1.2. Syariah	2
2.	BPR	6
	2.1. Konvensional	5
	2.2. Syariah	1
Jumlah		15

Sumber : Profil Kota Sawahlunto Tahun 2012

Pada tahun 2012, jumlah bank umum di Kota Sawahlunto seluruhnya berjumlah 9 unit, terdiri dari; 7 unit bank umum konvensional dan 2 unit bank umum syariah. Adapun jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) seluruhnya berjumlah 6 unit, terdiri dari 5 unit BPR konvensional dan 1 unit BPR syariah.

2.4.3.4 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Ketersediaan restoran dan rumah makan pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi pada suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkan.

Tabel 2.69
Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kota Sawahlunto

No.	Uraian	2012
1.	Restoran	0
2.	Rumah Makan/ Cafe sejenisnya	56

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto

Rumah makan yang tersedia di Kota Sawahlunto pada umumnya belumlah memenuhi standar restoran yang ditentukan PHRI, sehingga belum dapat dikatakan sebagai restoran.

2.4.3.5 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Ketersediaan penginapan sangat menunjang dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian suatu daerah, banyaknya penginapan dapat menunjukkan perkembangan aktivitas ekonomi pada suatu daerah selengkapnya ketersediaan penginapan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.70
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/ Hotel di Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012

NO.	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Hotel Bintang 5	0	0	0	0	0
2.	Hotel Bintang 4	0	0	0	0	0
3.	Hotel Bintang 3	0	0	0	0	0
4.	Hotel Bintang 2	0	0	0	1	1
5.	Hotel Bintang 1	0	0	0	0	0
6.	Hotel Non Bintang dan Penginapan lainnya	69	69	69	69	69
	Jumlah	69	69	69	70	70

Sumber : Bappeda Kota Sawahlunto

Pada tahun 2012 jumlah penginapan di Kota Sawahlunto sebanyak 70 buah, terdiri dari ; hotel bintang dua sebanyak 1 unit dan hotel non bintang dan penginapan lainnya sebanyak 69 unit. Kondisi ini cenderung tetap dibandingkan kondisi tahun sebelumnya sebanyak

70 unit, yang terdiri dari hotel bintang 2 sebanyak 1 unit dan hotel non bintang dan penginapan lainnya sebanyak 69 unit.

2.4.3.6 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Sarana pendukung dalam peningkatan aksesibilitas daerah antara lain adalah jalan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian kota. Infrastruktur jaringan transportasi yang tersedia di Kota Sawahlunto meliputi berbagai akses perhubungan yang menghubungkan Kota Sawahlunto ke kota dan kabupaten tetangga dan kemudahan akses perhubungan antar kecamatan, antar desa/kelurahan bahkan ke sentra produksi.

Dilihat dari kondisi Georafis Kota Sawahlunto merupakan jalur lintas Sumatera yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Kota Sawahlunto memiliki panjang jalan 502,62 km yang terdiri dari jalan kota 440,29 km, jalan nasional 35,24 km dan jalan propinsi 4,65 km dengan kondisi jalan yang terus meningkat untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat kota, dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel rasio panjang jalan berikut ini.

Tabel 2.71
Rasio panjang jalan dan jumlah kendaraan

NO.	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Panjang Jalan Kota (km)	440.29	440.29	440.29	440.29	440.29
2.	Panjang Jalan Nasional (km)	8.15	8.15	30.59	30.59	30.59
3.	Panjang Jalan Propinsi (km)	27.09	27.09	4.65	4.65	4.65
4.	Jumlah Kendaraan (unit)	9.637	11.419	12.112	13.222	14.038
5.	Rasio Jalan Kota	0.045	0.038	0.036	0.033	0.031

Sumber : BPS 2012 Kota Sawahlunto

Untuk kemudahan akses transportasi di Kota Sawahlunto terdapat 2 buah terminal tipe C yang dapat membantu dalam kemudahan akses transportasi di Kota Sawahlunto. Jika dilihat dari rasio panjang jalan mengalami penurunan 0,045 di tahun 2008 menjadi 0,031 tahun 2012 berarti untuk satu unit kendaraan rata-rata tersedia jalan sepanjang 31 meter.

2.4.3.7 Ketaatan Terhadap RTRW

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto 2012-2032 yang mana Pola Ruang terdiri dari Kawasan Lindung Dan Kawasan Budidaya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72
Luas Dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

NO	POLA RUANG	LUAS (HA)
I	Kawasan Lindung	2,234.69
1	Daerah Hijau	936.66
2	Danau	28.98
3	Hutan Lindung	72.71
4	Taman	14.49
6	RTH taman	37.06
7	Hutan Kota Kolok	70.00
8	Hutan Kota	1,074.79
II	Kawasan Budidaya	25,110.32
7	Sawah	1,772.00
8	Tambang	2,024.08
9	Hutan Produksi	6,802.48
10	Hutan Produksi Konversi	4,113.18
11	Pemukiman	3,461.90

NO	POLA RUANG	LUAS (HA)
12	Pendidikan Tinggi	19.14
13	Perkantoran	127.48
14	Pertanian Lahan Kering	6,039.36
15	Wisata Kandih	400.00
16	TPA	25.54
	Total	27,345.00

Sumber: RTRW Kota Sawahlunto

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan strategis di Kota Sawahlunto, meliputi :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; Desa Muara Kalaban, Kecamatan Silungkang ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional didukung oleh pengembangan terminal Tipe B dan terminal bongkar muat barang
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - Kawasan Kota Lama, Kecamatan Lembah Segar sebagai kawasan pelestarian budaya atau cagar budaya;
 - Kawasan rencana pusat pemerintahan di Kawasan Kolok dan Sijantang, guna peningkatan pelayanan pemerintahan kota dan identitas kota
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- d. Kawasan Kandih, Kecamatan Barangin untuk pengembangan wisata

2.4.3.8 Luas Wilayah Kekeringan

Wilayah kekeringan umumnya terdapat di daerah perbukitan Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Barangin serta di daerah yang tidak memiliki sumber air permukaan seperti di Bukit Gadang, Batu Tanjung, Tumpuk Tengah, Datar Mansiang dan Kumbayau.

2.4.3.9 Luas Wilayah Kebanjiran

Topografi wilayah kota yang ada dengan tingkat kemiringan rata-rata diatas 15 %, tidak memungkinkan terjadi banjir di suatu kawasan karena kecepatan aliran air sangat tinggi.

Hanya saja terdapat beberapa kawasan yang tergenang disebabkan luapan sungai yang ada disekitar kawasan antara lain seperti sepanjang aliran sungai Batang Lasi di Silungkang Duo dan Silungkang Tigo, sepanjang aliran batang Ombilin di TaLawi Hilir dan Sijantang.

2.4.3.10 Luas Wilayah Perkotaan

Wilayah perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi. untuk lebih jelasnya luas wilayah perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73
Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2012

NO	NAMA WILAYAH PERKOTAAN	LUAS (Km2)	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
I	KECAMATAN LEMBAH SEGAR		6.837
1	Pasar	0,50	1.497
2	Kubang Sirakuk Utara	0,28	954
3	Kubang Sirakuk Selatan	0,27	1.094
4	Aur Mulyo	0,20	1.107
5	Tanah Lapang	0,16	1.218
6	Air Dingin	0,14	967
II	KECAMATAN BARANGIN		7.227
1	Saringan	0,81	1.747
2	Lubang Panjang	1,00	1.258
3	Durian I	1,17	2.179
4	Durian II	1,25	2.043
	Total	5.78	14.064

Sumber : BPS 2012

Luas wilayah perkotaan dibanding dengan luas wilayah kota adalah sebesar 2,11% dengan total jumlah penduduk sebanyak 14.064 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama masyarakat kota Sawahlunto masih bertumpu pada sektor pertanian yang berada di wilayah pedesaan yang mencakup 97,89% dari luas wilayah kota. Namun apabila melihat tingkat perkembangan kegiatan pembangunan sepuluh tahun belakangan ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan dan jasa sudah sangat meningkat di wilayah pinggiran perkotaan seperti Muaro Kalaban, Santur, Talawi Hilir, Sijantang.

2.4.3.11 Persentase RT yang Menggunakan Air Bersih

Dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih, masyarakat memiliki keragaman akses terhadap sumber air sesuai dengan kemampuan aksesibilitasnya dan ketersediaan sarana dan prasarananya. Sistem penyediaan air minum yang digunakan rumah tangga dapat dibedakan menjadi sistem perpipaan (unit air baku, unit produksi, transmisi, dan distribusi) dan sistem non-perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air). Selengkapnya cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.74
Persentase Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Rumah Tangga	14.374	13.891	14.051	14.209	17.642
2	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih	7.994	9.156	9.987	10.581	15.040
3	Persentase	55,61	65,91	71,08	74,47	85,25

Sumber: Bappeda 2012

Proporsi rumah tangga dengan akses air bersih dengan adanya berbagai program yang telah digulirkan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terus mengalami peningkatan yaitu 55,61% tahun 2008, menjadi 85,25% pada tahun 2012. Capaian ini sudah melewati target MDGs tahun 2015 yaitu sebesar 68,5%, namun dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas masih perlu ditingkatkan.

2.4.3.12 Persentase RT yang Menggunakan Listrik

Pada saat ini listrik merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya pemakaian listrik setiap tahunnya seperti tabel berikut;

Tabel 2.75
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Rumah Tangga (RT)	14.374	13.891	14.051	14.209	15.247
7	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik (RT)	11.024	12.632	13.425	13.619	13.619
8	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	76,69	90,94	95,54	95,85	95,85

Sumber: SDA 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat dari 76,69% pada tahun 2008 menjadi 95,85% pada tahun 2012, hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat sekitar 4,15% rumah tangga yang belum teraliri aliran listrik.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

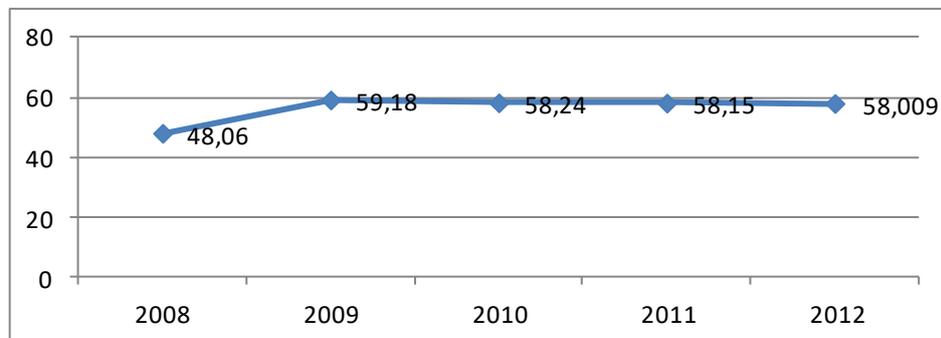
2.4.4.1 Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pension, penduduk usia 15

- 64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk tidak produktif lagi disamping membiayai dirinya sendiri. Berikut ini perkembangan rasio ketergantungan penduduk 2008-2012.

Grafik 2.11
Rasio Ketergantungan Kota Sawahlunto
Tahun 2008-2012



Sumber : Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2012

Rasio ketergantungan penduduk Kota Sawahlunto tahun 2012 58,09%, ini berarti setiap 100 orang produktif menanggung 58 orang tidak produktif, rasio ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2011 sebesar 58,15%.

BAB. III

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1.1 Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan pada urusan pendidikan terlihat dengan masih ada penduduk Kota Sawahlunto yang belum melek huruf. Pada kualitas pelayanan pendidikan, nilai APM dan APK ditiap jenjang pendidikan harus segera ditingkatkan. Kurangnya alat dan media pembelajaran di sekolah belum memenuhi SPM juga menjadi permasalahan di bidang pendidikan ini. Dari segi kompetensi dan kualifikasi, belum semua tenaga kependidikan PAUD yang berijazah S1. Hal ini berimbas kepada rendahnya kesejahteraan pendidik dan pengelola PAUD. Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, persentase guru yang telah tersertifikasi sebagai pendidik belum kesleuruhan. Permasalahan tersebut harus ditangani secara serius agar tidak terjadi penurunan kualitas pendidikan. Keberadaan sekolah unggulan di daerah lain menyebabkan keinginan siswa terbaik di kota ini bersekolah keluar daerah sehingganya berpengaruh pada kualitas input peserta didik di Kota Sawahlunto.

3.1.2 Urusan Kesehatan dan Sosial

Permasalahan kesehatan dan sosial di kota Sawahlunto terlihat pada pelayanan prima belum dapat dilaksanakan dengan baik

karena letak geografis kurang mendukung. Selain itu, permasalahan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat relative rendah. Hal ini terlihat pada belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit menular, masih banyaknya air limbah masyarakat yang belum memenuhi syarat dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hygiene dan sanitasi. Tenaga kesehatan jumlah Dokter Spesialis masih belum lengkap demikian juga ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit perlu terus ditingkatkan disertai sistem/Instalasi pengelolaan limbah yang belum memadai.

3.1.3 Urusan PU

Pada urusan Pekerjaan umum, belum semua ruas jalan dalam kondisi mantap, dan belum semua slini memiliki masterplan pembangunan infrastruktur kota. Standar pelayanan air minum belum tercapai aspek kualitas, kontinuitas dan cakupan layanan yang tidak terlepas dari keterbatasan sumber air baku serta topografi kota yang bergelombang. Sistem pengolahan sampah di TPA cenderung open dumping dengan sarana prasarana kurang memadai menyebabkan pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat

3.1.4 Urusan Perumahan

Kawasan permukiman padat dan tidak teratur pada pusat kota dan sub pusat kota menjadi permasalahan utama dalam pembangunan perumahan di Kota Sawahlunto. Pola permukiman masih belum sesuai dengan peruntukkan penggunaan lahan disebabkan belum ada regulasi penetapan kawasan perumahan. Saat ini masih terdapat terdapat backlog perumahan tidak layak huni. Selain itu, sulitnya memperoleh tanah untuk perumahan karena tanah banyak dikuasai oleh kuasa penambangan PT.BA dan PT.KAI, juga banyaknya tanah ulayat berakibat rendahnya partisipasi swasta dalam investasi perumahan

3.1.5 Urusan Penataan Ruang

Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal. Hal ini terlihat dari masih banyak pembangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan. Dari segi perencanaan, dokumen penataan ruang masih belum lengkap, keterbatasan SDM pengawasan dan penataan ruang ikut mempengaruhi. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang menyebabkan kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan sebelum melakukan pembangunan masih rendah

3.1.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada kurangnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan, dan masih rendahnya pemahaman aparatur perencana tentang penyusunan dokumen perencanaan. Keterbatasan SDM perencana belum menyebabkan proses perencanaan khususnya pada tahapan monitoring dan evaluasi belum terlaksana sebagaimana mestinya.

3.1.7 Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan untuk urusan perhubungan terlihat dari aksesibilitas transportasi yang belum merata, masih banyaknya tempat-tempat yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi dan kebutuhan tempat parkir yang belum memadai. Masih kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas seperti belum adanya terminal angkutan penumpang yang layak. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan keikutsertaan dalam memelihara sarana dan prasarana lalu lintas perlu menjadi perhatian. Topografi wilayah kota dan beberapa lokasi rawan patahan juga menjadi permasalahan dalam mengembangkan sektor perhubungan khususnya lalu lintas jalan raya.

3.1.8 Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan di sektor lingkungan hidup terlihat dari penurunan kualitas air sungai, pencemaran lingkungan akibat aktifitas industri dan pertambangan serta dampak pemanasan

global semakin meningkat. Kurangnya SDM pengelola lingkungan hidup ditambah lagi dengan kurangnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup juga menjadi permasalahan dalam pembangunan lingkungan hidup di Kota Sawahlunto

3.1.9 Urusan Pertanian

Pembebasan tanah masyarakat untuk kepentingan umum menjadi salah satu permasalahan yang dapat menghambat akselerasi pembangunan, disamping status kepemilikan tanah ulayat, penguasaan lahan oleh perusahaan penambangan. Permasalahan tapal batas dengan daerah tetangga juga menjadi permasalahan rutin yang harus segera diselesaikan secara tepat

3.1.10 Urusan Kependudukan dan Capil

Permasalahan pembangunan pendudukan terlihat dari kualitas SDM aparatur pengelola SIAK masih kurang. Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum optimal, semestinya dapat disiasati dengan inovasi dan kreativitas dalam memberikan pelayanan kependudukan.

3.1.11 Urusan PMPKB

Kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan belum optimal karena terbatasnya

sumber daya aparatur pengeloa, juga menjadi kendala dalam pemberdayaan perempuan. Kurangnya kesadaran masyarakat dan kemandirian untuk melaksanakan pelayanan atau pemasangan alat kontrasepsi menjadi hambatan dalam meningkatkan keikutsertaan PUS dalam program keluarga.

3.1.12 Urusan Tenaga Kerja

Kualitas pencari kerja yang belum memadai dan tidak memiliki skill dan keterampilan khusus serta terbatasnya jumlah penawaran kerja dari dunia usaha menyebabkan kesempatan kerja di Kota Sawahlunto relatif rendah. Dari segi pelayanan, Sistem informasi dan data ketenagakerjaan belum optimal serta rendahnya transparansi penerimaan tenaga kerja juga beberapa hal yang perlu dibenahi. Pada sisi lain produktivitas tenaga kerja harus teru ditingkatkan agar tetap data bersaing dalam dunia usaha.

3.1.13 Urusan Koperasi dan UKM

Permasalahan pembangunan di sektor Koperasi dan UMKM Masih rendahnya kualitas SDM pelaku UMKM dalam berinovasi dan pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan kualitas produk UMKM yang dihasilkan belum memenuhi standar nasional, karena itu tingkat ketergantungan sektor ini terhadap dukungan pemerintah masih sanat yang tinggi. Kemampuan pengelola koperasi dan UMKM juga belum profesional dan belum memiliki kretivitas tinggi dalam merebut peluang yang ada.

3.1.14 Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan untuk penanaman modal utamanya adalah belum adanya kebijakan insentif mengenai penanaman modal yang menjadi daya tarik investor. Selain itu, terbatasnya potensi daerah untuk menarik investor juga menjadi kendala dalam menarik investor dalam menanamkan modalnya di Kota Sawahlunto. Belum tersedianya system pelayanan perizinan terpadu menjadi kendala dalam memberikan kemudahan bagi calon investor.

3.1.15 Urusan Kebudayaan

Dalam upaya pelestarian nilai budaya daerah, budaya luar yang memberikan pengaruh negatif terhadap budaya daerah perlu diantisipasi. Hal ini untuk menjaga agar apresiasi masyarakat terhadap budaya dan seni daerah tetap terpelihara . Dari segi akhlak mulianya, pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan adat mulai berkurang sehingganya perlu penerapan pendidikan berkarakter yang tepat

3.1.16 Urusan Pemuda dan Olah Raga

Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan olahraga menjadi permasalahan utama dalam pengembangan keolahragaan di Kota Sawahlunto. Selain itu, belum optimalnya pembinaan dan pengelolaan kelembagaan pemuda dan olahraga juga turut mempengaruhi aktivitas pemuda dan olahraga. Dampak

negative dari adanya media sosial dan IT terhadap generasi muda semakin terasa, dengan berkurangnya nilai kekeluargaan dan semangat gotong

3.1.17 Urusan Kesbangpol dan PBD

Ancaman melemahnya paham kebangsaan dan rasa cinta tanah air di masyarakat menjadi permasalahan utama dalam pengembangan wawasan kebangsaan saat ini, akibatnya cenderung terjadi ketidakpedulian terhadap bangsa dan negara. Dalam bidang politik, pemahaman terhadap peraturan dibidang politik, kesadaran berpolitik di kalangan di tengah masyarakat ditengarai penyebab partisipasi pemilih dalam pemilu belum maksimal. Sedangkan dalam masalah penanganan bencana, sistem koordinasi penanganan bencana masih rendah dan belum memiliki dokumen kontigensi. Faktor penting lainnya adalah belum tersedianya sistem dan teknologi informasi dalam mendukung penanganan bencana

3.1.18 Urusan Otonomi daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, rendahnya perana Pendapatan Asli Daerah terhadap keuangan daerah menjadi tantangan utama sehingga meskipun saat iniketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan pemerintah tinggi tetap harus menjadi focus di masa depan. Kompetensi pegawai, mutu dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan teruatam

pemahaman terhadap peraturan dan merubah pendekatan dari kekuasaan kepada pelayanan.

3.1.19 Urusan Ketahanan Pangan

Permasalahan pembangunan disektor ketahanan pangan terjadi pada konsumsi masyarakat belum sesuai dengan pola pangan harapan. Jika dilihat dari ketersediaan pangan, ketersediaan pangan lokal belum mencukupi sepenuhnya kecuali beras, sehingga kota Sawahlunto harus mendatangkan pasokan pangan daari daerah tetangga. SDM pengelola ketahanan pangan masih kurang secara kuantitas terutama dalam hal pengawasan keamanan pangan. Fluktuasi harga komoditas pangan dan alih fungsi lahan pertanian juga merupakan permasalahan yang harus dibenahi dalam membangun ketahanan pangan Kota Sawahlunto.

3.1.20 Urusan Statistik

Sistem pengelolaan data yang masih manual menjadi tantangan utama dalam urusan statistik ini, akibatnya, belum ada dokumen data yang ber series dan terintegrasi yang dapat diakses semua orang dalam waktu cepat. Perbedaan metode penghitungan data antara BPS dan pemerintah daerah serta pemahaman data yang belum sama merupakan permasalahan lain yang perlu dicarikan solusinya.

3.1.21 Urusan Kearsipan dan Perpustakaan

Dalam pengembangan kearsipan dan perpustakaan dibutuhkan solusi untuk menangani rendahnya system dan fasilitas dalam mengelola kearsipan dan perpustakaan. Kurangnya kualitas pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang kearsipan dan perpustakaan ditambah lagi koleksi buku belum sebanding dengan kebutuhan pengguna menyebabkan kurangnya minat pengunjung ke pustaka. Kesadaran/tertib SKPD terhadap pentingnya pengelolaan arsip/dokumen menyebabkan penanganan arsip daerah menjadi terkendala. Pada masa mendatang penggunaan aplikasi IT dalam kearsipan menjadi hal yang harus segera dimulai.

3.1.22 Urusan Komunikasi dan Informatika

Sistem komunikasi dan informatika Kota Sawahlunto masih terkendala sarana dan prasarana teknologi informasi yang belum merata. Sistem informasi manajemen yang tersedia pun belum dimanfaatkan secara optimal baik di kalangan birokrasi pemerintah maupun disektor privat.

3.1.23 Urusan Pertanian

Untuk meningkatkan kuantitas produksi pertanian jangka panjang, masalah alih fungsi lahan pertanian perlu menjadi perhatian utama. Meskipun demikian masih ada lahan pertanian yang belum tergarap. Motivasi dan keterampilan petani untuk meningkatkan produktifitas pertanian juga harus terus ditingkatkan disertai

upaya untuk menjaga pemasaran dengan harga yang layak. Pola pikir masyarakat terutama generasi muda yang mengatakan petani merupakan pekerjaan kurang berkelas juga menjadi tantang di masa depan. Industri pengolahan hasil pertanian di Kota Sawalunto relatif masih sangat sedikit dan perlu terus dikembangkan.

3.1.24 Urusan Kehutanan

Rendahnya kesadaran masyarakat akan fungsi hutan di Kota Sawahlunto menyebabkan potensi hutan di Kota Sawahlunto belum termanfaatkan dengan optimal. Masalah Illegal Logging belumlah menjadi permasalahan besar, akan tetapi alih fungsi lahan hutan dan ancaman kebakaran hutan menjadi kendala dalam menjaga hutan di Kota Sawahlunto. Tata batas kawasan hutan juga belum sepenuhnya disepakati bersama masyarakat disamping itu, kuantitas Polisi hutan masih kurang dengan serta sarana dan prasarana pengawasan hutan juga masih belum memadai. Pengolahan hasil hutan non kayu harus lebih didorong dalam upaya meningkatkan peranan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

3.1.25 Urusan Energi dan Mineral

Pencegahan terhadap kemungkinan munculnya penambang liar harus senantiasa ditingkatkan agar tidak merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan penambang dan masyarakat sekitar.

Potensi penambangan mineral di kota Sawahlunto belum sepenuhnya termanfaatkan karena sangat tergantung pada investor dari luar yang memiliki modal dan teknologi, karena keberadaan perusahaan daerah di bidang pertambangan harus didorong agar dapat berkerjasama dengan investor yang memiliki modal dan teknologi. Kesadaran masyarakat untuk penghematan energi masih rendah belum tercermin dalam pemanfaatan peralatan hemat energy maupun dalam sikap dan perilaku penggunaan energy.

3.1.26 Urusan Pariwisata

Tantangan utama pembangunan pariwisata Kota Sawahlunto adalah menciptakan obyek wisata dengan daya saing tinggi dan terintegrasi , memiliki kekhasan yang sulit ditiru daerah lain, karena itu kreativitas dan inovasi terus menerus menjadi kata kunci. Permasalahan utama adalah ketersediaan sumberdaya aparatur dalam merancang konsep wisata yang mampu menarik investasi dalam mengexploitasi keindahan alam, kekayaan budaya dan nilai historis yang dimilikinya. Keterbatasan sarana transportasi umum yang menghubungkan simpul obyek wisata, fasilitas akomodasi menjadi permasalahan bagi pengunjung.

3.1.27 Urusan Kelautan/Perikanan

Perikanan memiliki banyak kendala terutama terbatasnya ketersediaan sumber air, tetapi, jika dikelola dengan baik, dapat

dijadikan salah satu alternatif pendapatan masyarakat. Permasalahan yang ada saat ini adalah produksi benih ikan masih rendah dan volume air tidak mencukupi untuk budidaya perikanan. Dari segi pelayanannya, Kuantitas SDM yang masih kurang mejadi hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

3.1.28 Urusan Perdagangan

Masalah dalam pengembangan perdagangan di Kota Sawahlunto adalah ketersediaan jenis barang kurang beragam dan harga relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal salah satunya keberadaan pedagang grosir belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Keberadaan pedagang keliling mampu mendekatkan pasar kepada konsumen namun dapat menjadi ancaman dalam pengembangan perdagangan di Pasar Sawahlunto dan pasar lainnya.

3.1.29 Urusan Industri

Permasalahan yang dihadapi dalam membangun sektor industri di Kota Sawahlunto adalah keterampilan teknis, kemampuan pengembangan desain, serta kemampuan manajemen perajin dan pelaku IKM masih belu merata. Keterbatasan sarana daan prasarana, rendahnya kualitas teknologi dan peralatan pendukung proses produksi yang dimiliki pengrajin dan pelaku IKM menyebabkan mutu produk yang dihasilkan belum standar.

Pemanfaatan bahan baku lokal yang belum maksimal juga akan menyebabkan pendeknya mata rantai ekonomi untuk sektor industri di Kota Sawahlunto.

3.2 ANALISIS ISU STRATEGIS

3.2.1 Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Adat

Kesiapan akhlak, mental dan keagamaan masyarakat perlu diberikan perhatian lebih untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan global di era kemajuan teknologi informatika. Dekadensi moral ditengah masyarakat akan membuat semua upaya pembangunan menjadi sia-sia. Terjadi berbagai kasus criminal, penyakit masyarakat penyalahgunaan narkoba berimplikasi langsung dengan sikap moral dan akhlak masyarakat dan khususnya bagi generasi muda yang masih rentan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama, akhlak mulia dan adat istiadat kedalam mata pelajaran setiap jenjang pendidikan ditingkat pelajar. Kualitas dan kuantitas jam pelajaran keagamaan secara khusus akan ditambah baik mulai dari kurikulum sampai pada penarapannya di sekolah dan di keluarga. Selain itu peran keluarga dan masyarakat dalam penerapan dan aplikasi nilai agama, akhlak mulia dan adat dalam kehidupan sangat menentukan keberhasilan pembinaan pendidikan keagamaan.

3.2.2 Peningkatan Mutu setiap Jenis dan Jenjang Pendidikan

Pendidikan masyarakat merupakan modal dasar utama dalam membangun suatu daerah utamanya dalam menghadapi tantangan dan kompetisi di era globalisasi dan pasar bebas. Perlu lebih ditekankan pembangunan pendidikan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan di tiap jenjang dan jenis pendidikan untuk menjamin keberlangsungan lama sekolah masyarakat mencapai 12 tahun pada akhir periode perencanaan ini. Pembinaan dan pengembangan budaya menjadi sangat penting dalam mempertahankan jati diri bangsa sehingga tidak kehilangan identitas akibat pengaruh budaya asing yang belum tentu cocok dengan nilai local yang dijiwai nuansa religious.

3.2.3 Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Angka harapan hidup masyarakat Kota Sawahlunto sebesar 71,86 tahun yang merupakan tertinggi di Sumatera Barat harus selalu dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Pelayanan kesehatan akan diprioritaskan pada peningkatan kualitas tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.2.4 Penyediaan infrastruktur dasar yang bermutu

Dalam mewujudkan visi Kota menjadi Kota Wisata pada tahun 2020, infrastruktur menjadi modal utama yang sangat menentukan bagi pencapaiannya. Infrastruktur yang berkualitas akan menjadi

jaminan kenyamanan beraktivitas masyarakat utamanya pengunjung Kota Sawahlunto. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, drainase dan pelayanan air bersih harus terus diupayakan pada standar Kota Pariwisata Nasional. Selain itu, pembukaan akses baru ke daerah tetangga juga akan dijadikan issue strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah selain infrastruktur dasar yang merupakan kewajiban utama pemerintah daerah.

3.2.5 Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang

Ketaatan terhadap RTRW juga akan dijadikan perhatian dalam pembangunan kota agar tercipta struktur kota yang teratur sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Pemenuhan target Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota sebesar 30 % dari luas daerah, menjadi prioritas utama dalam penyesuaian ruang kota. Rasio bangunan ber-IMB yang masih rendah harus selalu ditingkatkan untuk mengantisipasi permasalahan pembangunan dimasa yang akan datang. Pengawasan pemanfaatan ruang juga sangat diperhatikan mengingat kerawanan Kota Sawahlunto terhadap bahaya longsor dan patahan.

3.2.6 Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas

Kekeliruan dalam perencanaan sama artinya dengan merencanakan kegagalan, berakibat pemborosan anggaran dan tidak tercapainya manfaat yang diinginkan. Keterbatasan keuangan

daerah untuk pembangunan membutuhkan keefektif dan efisien daerah dalam mengelola uang tersebut. Perencanaan yang berkualitas akan berimplikasi pada efektivitas dalam penggunaan anggaran. Jika daerah sudah mempunyai perencanaan pembangunan yang berkualitas, akan mempermudah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, disamping itu juga dalam menjaga keberlanjutan pembangunan setiap periode.

3.2.7 Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup

Transformasi Kota dari daerah tambang ke kota wisata membutuhkan strategi khusus daerah, untuk meminimalkan kesalahan dalam kebijakan pembangunan. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berimplikasi luas terhadap lingkungan harus selalu dipertimbangkan daya dukung lingkungan dengan memegang prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Keberadaan aktivitas penambangan harus selalu diawasi dari tahap awal sampai komitmen reklamasi lahan. Penanganan persampahan, limbah cair dan udara, serta penggunaan air tanah akan selalu diprioritaskan untuk menjaga daya dukung dan kualitas lingkungan terhadap aktivitas dan kenyamanan masyarakat.

3.2.8 Pengembangan Kepariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sector andalan dimasa depan mengingat multiplier efek yang dihasilkan sangat besar dalam meningkatkan aktivitas perekonomian. Pariwisata Sawahlunto difokuskan pada empat cluster : wisata heritage, wisata rekreasi, wisata kuliner dan wisata ziarah dengan keunikannya masing-masing dan pada masa mendatang wisata MICE mulai digarap seiring dengan meningkatnya ketersediaan sarana prasarana penunjang. Peranan dunia usaha harus terus ditingkatkan dalam menciptakan peluang dan mendatangkan wisatawan sementara masyarakat diharapkan memanfaatkan kunjungan wisatawan melalui produksi industri kreatif berbahan baku local.

3.2.9 Pemberdayaan Masyarakat dan Kesetaraan Gender

Keberadaan masyarakat multi etnis yang hidup berdampingan dan masih menjaga khasanah budaya gotong royong akan dijadikan kekuatan dalam pembangunan Kota Sawahlunto. Membangun sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat akan tetap diprioritaskan. Keberadaan LPM, kelompok Masyarakat, Karang Taruna dan tokoh masyarakat akan dimanfaatkan untuk mempermudah pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, penyeteraan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan akan terus ditingkatkan untuk menjaga konsistensi perempuan dalam pembangunan.

3.2.10 Penyediaan Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Pengangguran

Penduduk yang bekerja atau menganggur menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Keadaan ini berdampak pada besaran pendapatan masyarakat yang berpengaruh pada pemenuhan kehidupan yang layak serta stabilitas ekonomi. Perhatian pada ketenagakerjaan tidak hanya terhadap penurunan jumlah pengangguran juga upaya peningkatan produktiitas tenaga kerja. Selain itu, penyediaan lapangan kerja yang layak juga akan selalu diprioritaskan untuk memberikan jaminan dan motivasi pada generasi muda khususnya calon tenaga kerja

3.2.11 Iklim Investasi yang Kondusif

Akselerasi pembangunan suatu daerah akan sangat lamban jika hanya mengandalkan pemerintah saja ditengah keterbatasan kapasitas keuangan daerah. Dibutuhkan kebersamaan dari pihak swasta untuk mengembangkan usaha dan perekonomian di Kota Sawahlunto. Penciptaan Iklim usaha yang kondusif menjadi strategis untuk menarik perhatian investor berinvestasi di Kota Sawahlunto. Investasi yang diharapkan tidak terbatas dalam skala besar, akan tetapi pemberdayaan jiwa enterpreneur masyarakat untuk berusaha harus selalu diupayakan. Untuk mewujudkan hal ini, kemudahan perizinan dan fasilitasi investor, pemberian insentif dan dukungan dalam berusaha serta promosi dan kerjasama dengan instistusi terkait terus diperkuat.

3.2.12 Pelestarian Seni dan Budaya Daerah

Upaya pelestarian kesenian dan budaya daerah akan mendapatkan perhatian khusus dalam karena merupakan salah satu asset yang dapat dijadikan daya tarik wisata sehingga akan berimplikasi langsung dengan pencapaian target visi kota menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Keberadaan budaya asli Minangkabau akan tetap dilestarikan dengan memberikan ruang khusus dalam pengembangan budaya lain. Perlombaan pidato adat, pidato pasambahan, randai, dan paket manikah akan digiatkan untuk merangsang pelestarian adat dan budaya daerah. Selain itu, kesenian wayang golek, wayang orang, reog kuda lumping, serta seni budaya lainnya juga akan diperhatikan untuk menampilkan keberagaman etnis yang hidup harmonis di Kota Sawahlunto.

3.2.13 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis lainnya yang juga menentukan keberlanjutan pembangunan di Kota Sawahlunto adalah penatalaksanaan pemerintahan yang baik. Memberikan pelayanan yang optimal, pengelolaan pemerintah yang bersih, inovatif dan profesional yang dirumuskan dalam standar pelayanan dan standar operasional prosedur dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, Konsep Good Governance and Clean Government harus dijadikan prioritas dalam melaksanakan birokrasi pemerintahan ini disertai peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

3.2.14 Pemantapan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan ini tidak hanya dalam penyediaan pangan yang berkualitas, tetapi juga diarahkan pada konsumsi pangan sehat dan seimbang serta keterjangkauan masyarakat terhadap pangan tersebut. Ketergantungan terhadap pangan utama beras akan diupayakan melalui diversifikasi bahan pangan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan hal yang perlu menjadi perhatian di masa mendatang agar produksi pangan tetap terjaga disamping meningkatkan kelancaran dan distribusi barang.

3.2.15 Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan tetap dijadikan isue strategis dalam pembangunan kota Sawahlunto. Peningkatan kesejahteraan tidak hanya mengangkat perekonomian penduduk miskin juga meningkatkan pendapatan seluruh masyarakat sehingga potensi kemiskinan masa depan dapat dikurangi. Upayanya dilakukan melalui pengutamaan penanganan penduduk miskin dalam pembangunan sosial dan ekonomi seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan penduduk.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI

Visi pembangunan jangka panjang pada dasarnya merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, dengan kata lain visi pembangunan jangka panjang merupakan aspirasi dan cita-cita masyarakat Kota Sawahlunto yang ingin diwujudkan di masa mendatang.

Visi Kota Sawahlunto mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota yaitu “**Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya**”,

Suatu keadaan pada tahun 2020 Kota Sawahlunto telah menjelma menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya dimana kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat Kota Sawahlunto dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata dengan karakteristik tambang, wisata rekreasi dan wisata lainnya. Disamping itu tata kehidupan masyarakat Kota Sawahlunto diwarnai oleh budaya asli Minangkabau serta pembauran budaya lain yang harmonis.

Pada tahun 2025 Kota Sawahlunto selain dikenal sebagai kota Wisata juga identik dengan kota yang nyaman untuk dihuni dan menarik untuk dikunjungi.

TABEL 4.1
PERWUJUDAN VISI KOTA SAWAHLUNTO 2005 – 2020 DAN 2021 – 2025

Visi	Perwujudan Visi	Penjelasan Visi	
		2005 – 2020	2021 - 2025
SAWAHLUNTO TAHUN 2020 MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA	Kota Wisata Tambang	Suatu keadaan dimana kegiatan sentra ekonomi dan sosial masyarakat Kota Sawahlunto dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata dengan karakteristik tambang	Kota Sawahlunto selain dikenal sebagai kota Wisata juga identik dengan kota yang nyaman untuk dihuni dan menarik untuk dikunjungi
	Kota Yang Berbudaya	Suatu keadaan dimana tata kehidupan masyarakat Kota Sawahlunto didasarkan pada budaya asli Minangkabau serta bauran budaya lainnya yang harmonis	

Disini terlihat bahwa sasaran utama visi pembangunan ini masih tetap terwujudnya masyarakat sejahtera yang sejalan dengan tujuan utama pembangunan nasional, pada sisi lain unsur spesifik yang akan dicapai adalah perwujudan tata kehidupan yang aman, nyaman dan damai dilandasi agama dan adat budaya minangkabau dengan pembauran budaya lain yang harmonis, serta keberadaannya sebagai sebuah kota yang maju dengan sarana dan prasarana yang cukup serta lingkungan yang menyenangkan sehingga menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Kota Sawahlunto. Terkait Visi Kota Sawahlunto yaitu Sawahlunto tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya, memiliki peran terhadap perwujudan Visi Nasional Tahun 2025, yaitu : **Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**, serta Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu : **Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025**. Jika lebih dirinci, keterkaitan antara

Visi Kota Sawahlunto, Visi Provinsi Sumatera Barat dan Visi Nasional terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.2
Sinkronisasi Visi dan Misi RPJPN, RPJP Daerah Sumbar dan RPJP Daerah Sawahlunto

No.	RPJPN 2005-2025	No.	RPJP Daerah 2005-2025 PROVINSI SUMBAR	No.	RPJP Daerah 2005-2025 KOTA SAWAHLUNTO
	<i>VISI</i>		<i>VISI</i>		<i>VISI</i>
	INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR		MENJADI PROVINSI TERKEMUKA BERBASIS SUMBERDAYA MANUSIA YANG AGAMAIS PADA TAHUN 2025		SAWAHLUNTO TAHUN 2020 MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA
	<i>MISI</i>		<i>MISI</i>		<i>MISI</i>
1	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	1	Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"	1	Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah-tengah masyarakat
2	Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	2	Mewujudkan sistem hukum dan tata-pemerintahan yang baik	2	Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum
3	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	3	Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi	3	Mengembangkan objek wisata tambang
4	Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	4	Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global	4	Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata
5	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	5	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan		
6	Mewujudkan Indonesia asri dan lestari				
7	Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional				
8	Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional				

4.2. MISI

Misi merupakan upaya umum yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Kota Sawahlunto tersebut yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh) tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Penjelasan Visi dan Turunan Misi RPJP Daerah Sawahlunto

VISI	POKOK-POKOK VISI	MISI	STAKEHOLDER PEMBANGUNAN		
			MASYARAKAT	PEMERINTAHAN DAERAH	PELAKU EKONOMI (DUNIA USAHA)
Sawahlunto tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang berbudaya	Kota Wisata Tambang	Mengembangkan objek wisata tambang	√ Masyarakat berperan dalam menciptakan rasa aman, damai dan kondusif guna mendukung iklim pariwisata di Kota Sawahlunto	√ Pemerintah daerah menyiapkan fasilitas, sarana prasarana, perangkat aturan dan hukum yang mendukung iklim pariwisata di Kota Sawahlunto	√ Peran serta pelaku ekonomi dibutuhkan untuk berinvestasi dalam menunjang kegiatan pariwisata seperti restoran, penginapan, souvenir dan handicraft serta investasi dalam pembangunan objek wisata
		Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata	Masyarakat berperan menjaga kebersihan lingkungan sehingga lingkungan tampak asri dan nyaman untuk dikunjungi		
		Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum	Masyarakat berperan dalam meningkatkan kapasitas diri untuk mengembangkan usaha dan erekonomian		
			Berperan serta mendukung kegiatan pemerintah dalam penyediaan sarana dan fasilitas umum		

Kota Yang berbudaya	Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah-tengah masyarakat	√	Memelihara aset pusaka Masyarakat berperan dalam penerapan nilai-nilai budaya minangkabau dalam setiap aspek kehidupan Masyarakat berperan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis antar kelompok masyarakat dan golongan	√	Pemerintah daerah menyiapkan perangkat atau aturan hukum serta penyediaan dan dukungan sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan sosial dan ekonomi	√	Berperan dalam penanaman investasi di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta membantu pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang kondusif Mengelola Inventariss dengan memperhatikan adat dan budaya daerah
------------------------	---	---	---	---	--	---	---

4.2.1. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah-tengah masyarakat

Mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat yang baik tidak terlepas dari tuntunan dan panduan dari agama dan kepercayaan masing-masing. Kehidupan masyarakat yang menerapkan nilai-nilai beragama akan menciptakan sikap toleransi yang tinggi antar sesama. Hal ini sejalan dengan Falsafah minangkabau yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau tersebut, dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah: taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun

dengan agama lain, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan. Selain itu, seiring dengan perkembangan era globalisasi dan perdagangan bebas, dibutuhkan pemahaman yang kuat untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan, serta membentengi diri dari pengaruh budaya luar, dengan mempertahankan budaya dan adat istiadat yang berlandaskan agama di Kota Sawahlunto. Penetapan visi Kota Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang yang berbudaya, perlu membangun budaya masyarakat yang kuat untuk mengantisipasi pengaruh negatif dari luar.

4.2.2. Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum

Tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia serta dibutuhkan fasilitas, sarana dan prasarana untuk mempermudah akses masyarakat dalam mengembangkan berbagai macam usahanya. Dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana itu, maka diharapkan kegiatan perekonomian masyarakat akan semakin tumbuh dan berkembang dimasa mendatang, sehingga akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan sekaligus peningkatan pendapatan masyarakat kota. Semua itu harus didukung oleh pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance*) yang merupakan persyaratan penting untuk dapat mewujudkan upaya pembangunan daerah yang terarah, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4.2.3. Mengembangkan objek wisata tambang

Kota Sawahlunto memiliki keindahan alam, nilai historis dan budaya yang spesifik sehingga mempunyai daya tarik tersendiri yang tercermin dalam setiap obyek wisata yang memiliki nilai historis serta tetap tumbuh dan berkembang budaya multi etnis yang ada, dengan ciri khas daerah Kota Sawahlunto tersebut diatas perlu dikemas sedemikian rupa sehingga dapat menarik jumlah wisatawan berkunjung ke Kota Sawahlunto.

Daya tarik daerah yang demikian harus dapat dimanfaatkan oleh Kota Sawahlunto untuk menjadi salah satu daerah tujuan wisata di Sumatera dengan wisata tambang dan budaya dengan segala ciri khasnya.

4.2.4. Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata

Pembangunan kepariwisataan Kota Sawahlunto didukung oleh berbagai sektor baik pendidikan, pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa, hiburan, olahraga, kuliner maupun sektor lainnya.

Pengembangan sektor wisata juga sangat didukung dengan kegiatan olah raga dan hobbi, karena dimasa mendatang program dan kegiatan olah raga dan hobi yang dapat menarik minat wisatawan harus lebih ditingkatkan. Misalnya olah raga pacuan kuda, balap sepeda dan mungkin juga pertandingan Tenis Internasional dengan mengundang peserta dari Belanda dalam rangka menelusuri kisah masa lalu, disamping itu olahraga hobi dan rekreasi seperti : berburu, lomba burung berkicau, petualangan, memancing, aktivitas bertanam padi, proses pengolahan biji kopi dan kakao, Proses bertenun tradisional, proses pembuatan makanan

tradisional, festival marching band suasana tempo dulu, dapat dikemas dalam paket wisata minat khusus dan bukan hal yang mustahil untuk dapat mendukung pengembangan pariwisata di kota Sawahlunto. Disamping itu, pengembangan dan peningkatan program kegiatan UMKM yang berbasis potensi local juga perlu ditingkatkan, sehingga dapat menghasilkan produk yang menarik bagi para wisatawan untuk dijadikan barang souvenir, sebagai tanda bahwa mereka memang telah berkunjung ke kota Sawahlunto.

Pengembangan potensi ini perlu didukung dengan kegiatan promosi, baik didalam maupun luar negeri secara terus menerus sehingga kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya benar-benar diminati oleh para wisatawan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Sawahlunto adalah :

“Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya “.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskan tujuan, sasaran pokok serta indikator target yang hendak dicapai dalam 20 tahun mendatang. Setiap misi dijabarkan kedalam tujuan jangka panjang yang akan dicapai dan setiap tujuan ditetapkan sasaran pokok yang merupakan hasil utama yang ingin dicapai guna mewujudkan tujuan itu sendiri. Sebagai tolok ukur pencapaian sasaran, juga dirumuskan indikator pencapaian kinerja pembangunan jangka panjang, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.1
Capaian Kinerja Pembangunan Jangka Panjang

Misi Pembangunan Jangka Panjang	Tujuan Jangka Panjang	Sasaran Pokok	
Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah-tengah masyarakat	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang baik dengan berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabbullah	1	Terlaksananya syariat agama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing
		2	Menurunkan tingkat penyakit masyarakat
		3	Masyarakat multi etnis yang hidup berdampingan secara harmonis
		4	Terpeliharanya benda-benda keagamaan yang bersejarah dan bangunan rumah adat
Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	1	Terpenuhinya semua kebutuhan infrastruktur kota dan pelayanan dasar yang berkualitas
		2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup

Misi Pembangunan Jangka Panjang	Tujuan Jangka Panjang	Sasaran Pokok	
		3	Terlaksananya pembangunan berkelanjutan sesuai daya dukung lingkungan
		4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat	1	Tersedianya pelayanan kesehatan dan sosial yang berkualitas dan terjangkau
		2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
		3	Meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat
		4	Meningkatnya pendapatan masyarakat
		5	Tersedianya jaminan perlindungan dalam rumah tangga
	Meningkatkan mutu, pelayanan serta daya saing masyarakat dalam bidang pendidikan	1	Tersedianya pelayanan pendidikan yang berkualitas
		2	Terciptanya lulusan pendidikan yang berdaya saing
	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan	1	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan yang baik
	Meningkatkan sinergitas dalam menuju Good Government and Clean Governance	1	Terseleenggaranya Good Governance dan Clean Government
		2	Meningkatnya jumlah Investasi
	Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kepentingan daerah	1	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam politik
Mengembangkan objek wisata tambang	Menegaskan spesifikasi wisata tambang dan heritage city sebagai ikon wisata kota	1	Tersedianya objek wisata yang terkait dengan sejarah penambangan
		2	Terwujudnya penataan dan pelestarian sebagai kota pusaka
Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata	Mewujudkan kota Sawahlunto sebagai suatu paket lengkap kota wisata.	1	Berkembangnya usaha penunjang industri pariwisata
		2	Tersedianya Objek Pariwisata yang nyaman, dan berdaya Saing dan terbangunnya kerjasama dengan daerah lain dan institusi kepariwisataan
		3	Tersedianya sarana dan prasana olahraga dan hobbi minat khusus yang mendukung pariwisata
		4	Tersedianya pusat promosi dan pemasaran produk unggulan daerah
		5	Tercapainya Produk Pertanian yang berdaya Saing

Tabel 5.2
Indikator RPJPD Kota Sawahlunto
Tahun 2005-2025

Misi Pembangunan Jangka Panjang	Sasaran Pokok		Indikator
Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah-tengah masyarakat	1	Terlaksananya syariat agama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing	Jumlah Kunjungan dan aktivitas peribatan di rumah Ibadah meningkat
			Jumlah Kelompok Remaja Masjid atau kelompok aktivitas keagamaan
			Jumlah zakat yang di himpun lembaga amil zakat meningkat
			Jumlah tempat ibadah berkualitas
			Jumlah TPA/TPSA aktif dan berkembang
			Jumlah muballigh
	2	Menurunkan tingkat penyakit masyarakat	Jumlah Penyakit Masyarakat
			Rendahnya kasus kriminalitas
	3	Terwujudnya Masyarakat multietnis yang hidup berdampingan secara harmonis	Jumlah Konflik antar Etnis dan konflik terkait sara
			Adanya Bangunan Rumah yang spesifik dengan budayanya masing-masing
	4	Terpeliharanya benda-benda keagamaan yang bersejarah dan bangunan rumah adat	Meningkatnya jumlah asset pusaka bernuansa religius dan rumah adat yang dipelihara
			Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata bernuansa religius
Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum	1	Terpenuhinya semua kebutuhan infrastruktur kota dan pelayanan dasar yang berkualitas	Persentase Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (Nasional, Provinsi dan Kota)
			Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik
			Trayek Transportasi Angkutan Penumpang Umum yang menghubungkan dari pusat pelayanan utama ke sub pusat pelayanan kegiatan
			Rasio Penerangan Jalan Umum (PJU) terhadap panjang jalan dalam Kota
			Rumah Tangga sudah terlayani Air Minum
			Rumah tangga dengan sanitasi baik
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni
			Persentase Panjang Jalan Yang

Misi Pembangunan Jangka Panjang	Sasaran Pokok	Indikator	
		mempunyai Drainase	
		Rumah Tangga terlayani listrik sebagai sumber energi penerangan	
		Luas Sawah yang terairi dengan sarana irigasi teknis	
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang mengelola sampah menjadi produk akhir
			Jumlah rumah tangga yang melakukan 3R
			Cakupan pelayanan persampahan
	3	Terlaksananya pembangunan berkelanjutan sesuai daya dukung lingkungan	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan
			Terkendalinya aktivitas pertambangan, industri dan pertanian yang berwawasan lingkungan
			Terjaganya kawasan lindung
			Meningkatnya kesadaran dan perilaku hemat energi dan air
	4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dari ancaman bencana
	5	Tersedianya pelayanan kesehatan dan sosial yang berkualitas dan terjangkau	Fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang sesuai standar
			Akses masyarakat terhadap sarana kesehatan
			Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
	6	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu melahirkan dan angkakematian bayi
			Angka harapan hidup
			Prevalensi balita gizi kurang
			Jumlah kasus penyakit menular
			Angka kesakitan
	8	Meningkatnya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat	Meningkatnya rumahtangga dengan PHBS
			Meningkatnya cakupan peserta jaminan kesehatan
9	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatnya PDRB	
		Menurunnya tingkat pengangguran	
		Stabilnya Pertumbuhan ekonomi	

Misi Pembangunan Jangka Panjang	Sasaran Pokok		Indikator
			Menurunnya angka kemiskinan
			Pemerataan pendapatan
	10	Tersedianya Jaminan Perlindungan dalam rumah tangga	Menurunnya jumlah kasus KDRT
			Adanya lembaga perlindungan ibu dan anak
			Terkendalinya Tingkat kelahiran
	11	Tersedianya pelayanan pendidikan berkualitas	Persentase pelayanan pendidikan sesuai standar
			Kualifikasi Guru berpendidikan Minimal S1
			Angka Melek Huruf
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah
			APM/APK SD
			APM/APK SLTP
			APM/APK SLTA
			Jumlah Sekolah yang terakreditasi
	12	Terciptanya lulusan pendidikan yang berdaya saing	Meningkatnya persentase siswa SMU yang diterima di Perguruan Tinggi terakreditasi A atau B
			Meningkatnya persentase siswa SMK yang langsung bekerja di bidangnya
			Nilai rata-rata UN
	13	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Baik	Indeks kepuasan masyarakat atas Pelayanan Kependudukan
			Persentase Penduduk Ber KTP
			Persentase Keluarga ber KK
			Persentase Penduduk yang mempunyai Akta Kelahiran
			Persentase Pasngan Nikah mempunyai Akta Nikah
14	Terselenggaranya Good Governance dan Clean Government	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
		Hasil Audit Laporan Keuangan	
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	
		Terjadinya Pemerataan Pembangunan di tiap tiap desa/Kelurahan	
		Kinerja dan disiplin aparatur	

Misi Pembangunan Jangka Panjang	Sasaran Pokok		Indikator
			Realisasi penyerapan anggaran
			Persentase PAD terhadap APBD
			Implementasi IT dalam Birokrasi Pemerintah
			Jumlah Hasil Penelitian yang diterapkan
	15	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi PMA/PMDN
			Jumlah Investor / Perusahaan
			Meningkatnya Kemampuan Berwiraswasta bagi para pelaku UMKM
			Tersedianya Pelayan Pemerintah Berupa Pelayanan Satu Pintu
			Terwujudnya Pelayanan Investasi yang mudah, murah, cepat dan pasti
	16	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam politik	Tingkat Partisipasi pemilih dalam pemilu
Mengembangkan objek wisata tambang	1	Tersedianya objek wisata yang terkait dengan sejarah penambangan	Terpeliharanya Benda Cagar Budaya
	2	Terwujudnya penataan dan pelestarian sebagai kota pusaka	Meningkatnya Jumlah Objek Wisata Spesifik Tambang Yang menjadi Unggulan di Kota Sawahlunto
			Terdaftar kedalam Warisan Dunia (UNESCO)
			Diakui sebagai kota pusaka nasional
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan ke Objek Wisata Kota Pusaka	
Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata	1	Berkembangnya usaha penunjang industri pariwisata	Meningkatnya produk lokal yang berkualitas dan layak menjadi souvenir
			Meningkatnya jumlah rumah makan dan restoran yang layak
			Meningkatnya Jumlah Lembaga Ekonomi dan UMKM yang Sehat
			Meningkatnya ketersediaan kamar hotel dan homestay
			Pengembangan Kemitraan Usaha Hulu Hilir secara Terintegrasi
	2	Tersedianya Objek Pariwisata yang nyaman, dan berdaya Saing dan terbangunnya kerjasama dengan daerah lain dan institusi	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kawasan Pariwisata di Kota Sawahlunto

Misi Pembangunan Jangka Panjang	Sasaran Pokok		Indikator
		kepariwisataan	
	3	Tersedianya sarana dan prasana olahraga dan hobbi minat khusus yang mendukung pariwisata	Meningkatnya Pengelolaan obyek Wisata
			Meningkatnya Keanekaragaman Objek Wisata selain Wisata Tambang
			Meningkatnya Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Objek Wisata Kota Sawahlunto disertai peningkatan lama kunjungan
			Meningkatnya jumlah wisatawan minat khusus yang berkunjung ke obyek wisata
			Meningkatnya Pola Kerja Sama, Kemitraan dan Promosi wisata Daerah
	4	Tersedianya pusat promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	Meningkatnya aktivitas ekonomi di pasar yang representatif dan pedagang informal yang tertata
			Meningkatnya Pemasaran Hasil Produk Unggulan Lokal di Kawasan Objek Wisata dan tempat strategis lainnya
			Meningkatnya Jumlah Sentra Perdagangan Produk Unggulan
	5	Tercapainya Produk Pertanian yang berdaya Saing	Produktivitas hasil pertanian setara standar nasional
			Pendapatan Perkapita Petani
			Adanya kawasan Agro Wisata
			Jumlah Industri Pengolahan Hasil Pertanian

5.2. Tahapan dan Prioritas

Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pembangunan yang menunjukkan langkah-langkah setiap periode lima tahunan yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam rangka mencapai Kota Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya Tahun 2020. Tahapan dan prioritas

yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan pengalokasian dana. Prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun tetap harus berkesinambungan dari satu periode keperiode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pokok dan perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pentahapan pembangunan dalam RPJPD dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah, yaitu setiap 5 tahun. Dengan demikian dalam jangka waktu 20 tahun kedepan, terdapat 5 tahapan pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 5.3

Misi 1 : Memelihara Dan Mengembangkan Nilai-Nilai Dasar Agama Dan Adat Istiadat Ditengah – Tengah Masyarakat
Tujuan Pembangunan Misi 1: Untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang baik dengan berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Terlaksananya Syariat Agama sesuai Agama dan Kepercayaan Masing-masing	<p>1 Jumlah Kunjungan dan aktivitas peribatan di rumah Ibadah meningkat</p> <p>2 Jumlah Kelompok Remaja Masjid atau kelompok aktivitas keagamaan</p> <p>3 Jumlah tempat ibadah berkualitas</p>	<p>1 Belum Optimalnya Pemanfaatan Rumah Ibadah untuk sarana beribadah dan kemasyarakatan</p> <p>2 Belum Optimalnya Peran dan keterlibatan remaja masjid dalam Kegiatan kemasyarakatan</p> <p>3 Rasio Jumlah rumah ibadah berkualitas dengan jumlah penduduk masih rendah</p>	<p>1 Memantapkan Fungsi Peran, kedudukan agama, dan adat di tengah masyarakat</p> <p>2 Meningkatkan Rasio Jumlah Tempat Ibadah dengan Jumlah Penduduk</p>	<p>1 Memantapkan Fungsi Peran, kedudukan agama, dan adat di tengah masyarakat</p>	<p>1 Mendalami pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan adat istiadat</p> <p>2 Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan YME</p>	<p>1 Memfasilitasi pengamalan ajaran agama dan adat istiadat ditengah kehidupan bermasyarakat</p>	<p>1 Membudayakan kehidupan bermasyarakat yang dilandasi kultur keagamaan</p>	<p>1 Aktivitas peribadatan di rumah ibadah meningkat</p> <p>2 Kelompok Remaja Masjid dan kelompok aktivitas keagamaan berkembang seiring munculnya kader muballigh</p> <p>3 Meningkatnya Jumlah tempat ibadah yang berkualitas</p>

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3 Jumlah zakat yang di himpun lembaga amil zakat meningkat	4 Jumlah zakat pada lembaga amil zakat baru dari kalangan aparatur pemerintah	3 Meningkatkan Fasilitas Religius dan Toleransi Antar Umat Beragama	2 Meningkatkan Fasilitas Religius dan Toleransi Antar Umat Beragama				4 meningkat kesadaran masyarakat dalam menuaikan zakat
	5 Jumlah TPA/TPSA aktif dan berkembang	5 Standarisasi pola dan metode pengajaran baca tulis Alquran pada TPA/TPSA belum tersedia	4 Menerapkan Pendidikan Keagamaan dan Adat Istiadat di tiap jenjang pendidikan	3 Menyempurnakan Pendidikan Keagamaan dan Adat Istiadat	3 Meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai budaya dan agama			5 Lembaga pendidikan TPA/TPSA yang bermutu dan meningkatnya kemampuan tulis baca alquran masyarakat
	6 Jumlah muballigh	6 Pada daerah tertentu kesulitan menjalankan ibadah shalat jumat, penyelenggaraan jenazah karena terbatasnya muballigh						

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Menurunkan tingkat penyakit masyarakat	1 Jumlah Penyakit Masyarakat	1 Masih terdapatnya kasus kriminalitas dan penyakit masyarakat yang meresahkan masyarakat lainnya	1 Menganangkan pelaksanaan kerjasama pengamanan lingkungan antara masyarakat, pemerintah dengan aparat keamanan.	1 Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya penciptaan situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif.	1 Memantapkan pelaksanaan kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya penciptaan situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif.	1 Mempertahankan kualitas kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya penciptaan situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif.	1 Mempertahankan kualitas kerjasama dengan aparat keamanan lain dalam upaya penciptaan situasi kamtibmas	1 Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan kedamaian dilingkungan masyarakat
	2 Rendahnya kasus kriminalitas	2 Belum Optimalnya Daya Dukung Penciptaan Kondisi Aman, tentram dan Damai	2 Meningkatkan rasio Linmas dibandingkan dengan jumlah penduduk.	2 Mewujudkan penguatan Kelembagaan linmas yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.	2 Mewujudkan penguatan kelembagaan linmas yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.	2 Mewujudkan penguatan kelembagaan linmas yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.	2 Memantapkan penguatan kelembagaan linmas yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.	2 Meningkatnya Kerjasama dengan lembaga keamanan

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3 Belum Utuhnya Pemahaman Masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan	3 Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Akan Hak dan Kewajibannya Dalam Menjaga Kamtibmas 4 Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat dan Kepatuhan Hukum serta Meningkatkan Penegakan Hukum	3 Memantapkan Kesadaran Masyarakat Akan Hak dan Kewajibannya Dalam Menjaga Kamtibmas		3 Meningkatkan dan selalu menjaga situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif.	3 Mempertahankan situasi kamtibmas yang lebih baik dan kondusif.	3 Memperkuat kelembagaan Linmas yang lebih profesional terutama dalam pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas 4 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 Terwujudnya Masyarakat Multi etnis yang hidup berdampingan secara harmonis	1 Jumlah Konflik antar Etnis dan konflik terkait sara 2 Adanya Bangunan Rumah yang spesifik dengan budayanya masing-masing	1 Perlunya Peningkatan Jati Diri Masyarakat seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, mengakui keberagaman, dan budaya berperilaku positif 2 Belum terlihatnya keberadaan masyarakat yang multi etnis di Kota Sawahlunto dari segi bangunannya	1 Melakukan Inventarisasi Penyempurnaan Data Jumlah Suku, Budaya dan bangunan spesifik sesuai kebudayaan 2 Meningkatkan Pemahaman Siswa dan Masyarakat tentang keberagaman dan nilai-nilai budaya 3 Menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat	1 Memfasilitasi pelestarian budaya-budaya lokal dan bauran ditengah masyarakat 2 Meningkatkan Pemahaman Siswa dan Masyarakat tentang keberagaman dan nilai-nilai budaya 3 Menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat	1 Menjadikan Bangunan Yang mencerminkan keberagaman budaya sebagai salah satu daya tarik Wisata 2 Meningkatkan Pemahaman Siswa dan Masyarakat tentang keberagaman dan nilai-nilai budaya 3 Menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial, gotong royong dan kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat	1 Menjadikan Bangunan Yang mencerminkan keberagaman budaya sebagai salahsatu destinasi utama Wisata 2 Meningkatkan Pemahaman Siswa dan Masyarakat tentang keberagaman dan nilai-nilai budaya	1 Memfasilitasi pelestarian budaya-budaya lokal dan bauran ditengah masyarakat 2 Menjadikan Bangunan Yang mencerminkan keberagaman budaya sebagai salah satu destinasi utama Wisata	1 Meningkatnya Jati Diri Masyarakat seperti solidaritas sosial, kesetiakawanan sosial, gotongroyong, kekeluargaan, mengakui keberagaman, dan budaya berperilaku positif

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 Melestarikan nilai adat dan Budaya setiap suku sebagai ragam nilai budaya daerah	3 Melestarikan nilai adat dan Budaya setiap suku sebagai ragam nilai budaya daerah 4 Mengadakan Event-event dan acara pentas seni kebudayaan Kota Sawahlunto	3 Melestarikan nilai adat dan Budaya setiap suku sebagai ragam nilai budaya daerah 4 Mengadakan Event-event dan acara pentas seni kebudayaan Kota Sawahlunto	
4 Terpeliharanya Benda-benda keagamaan yang bersejarah dan rumah adat	1 Jumlah aset pusaka bernuansa religius dan rumah adat terpelihara	1 Belum Optimalnya Pemeliharaan aset pusaka bernuansa religi dan rumah adat	1 Inventarisasi dan pemeliharaan aset pusaka bernuansa religi dan rumah adat	1 Meningkatkan Profesionalisme manajemen pengelolaan dan pemeliharaan aset pusaka bernuansa religi dan rumah adat	1 Meningkatkan Profesionalisme manajemen pengelolaan dan pemeliharaan aset pusaka bernuansa religi dan rumah adat	1 Meningkatkan Profesionalisme manajemen pengelolaan dan pemeliharaan aset pusaka bernuansa religi dan rumah adat	1 Memantapkan Wisata Religi menjadi salah satu Ikon Kota Wisata Tambang yang berbudaya Kota Sawahlunto	1 Meningkatkan Kunjungan ke Objek-objek wisata religi khususnya aset pusaka dan rumah adat

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke objek wisata religi	2 Masih Rendahnya Tingkat Kunjungan Wisatawan dan masyarakat ke aset pusaka bernuansa religi			2 Menjadikan aset pusaka bernuansa religi dan rumah adat menjadi bagian agenda wisata Kota	2 Menjadikan Wisata Religi menjadi salah satu Ikon Kota Wisata Tambang yang berbudaya Kota Sawahlunto		

Tabel 5.4
MISI 2 : MENINGKATKAN FASILITAS DAN PELAYANAN UMUM
TUJUAN PEMBANGUNAN MISI 2 :

1. Untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Pelayanan dasar berkualitas

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
4	5	8	9	10	11	12	13	14
1 Terpenuhinya seluruh kebutuhan infrastruktur kota dan pelayanan dasar yang berkualitas	1 Persentase Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (Nasional, Provinsi dan Kota)	1 Belum mantapnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan	1 Menambah Ruas Jalan Baru dan Meningkatkan Kualitas Ruas Jalan	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	1 Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	1 Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	1 Persentase Jalan dan jembatan dalam kondisi Mantap (Nasional, Provinsi dan Kota) 90 %
	2 Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	2 Masih Rendahnya kualitas Jalan Lingkungan yang ada	2 Meningkatkan fasilitas bagi pejalan kaki	2 Meningkatkan Fasilitas Perhubungan				
	3 Rasio Penerangan Jalan Umum (PJU) terhadap panjang jalan dalam Kota	3 Masih Rendahnya rasio PJU terhadap Panjang Jalan di Kota Sawahlunto	3 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan (Penerangan Jalan Umum, Marka Jalan dsb)	3 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Prasarana dan fasilitas Perhubungan (Penerangan Jalan Umum, Marka Jalan dsb)	2 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Prasarana dan fasilitas Perhubungan (Penerangan Jalan Umum, Marka Jalan dsb)	2 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Prasarana dan fasilitas Perhubungan (Penerangan Jalan Umum, Marka Jalan dsb)	2 Mempertahankan dan meningkatkan Kualitas dan kuantitas Prasarana dan fasilitas Perhubungan (Penerangan Jalan Umum, Marka Jalan dsb)	2 Seluruh ruas jalan nasional, provinsi dan kota tersedia PJU

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
4	5	8	9	10	11	12	13	14
	<p>4 Persentase Panjang Jalan Yang mempunyai Drainase</p> <p>5 Trayek Transportasi Angkutan Penumpang Umum yang menghubungkan dari pusat pelayanan utama ke sub pusat pelayanan kegiatan</p>	<p>4 Masih rendahnya persentase jalan yang mempunyai drainase</p> <p>5 Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan penumpang umum.</p>	<p>4 Meningkatkan Sistem Jaringan Drainase</p> <p>5 Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana</p> <p>6 Meningkatkan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata</p>	<p>4 Meningkatkan Sistem Jaringan Drainase</p> <p>5 Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana</p> <p>6 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata</p>	<p>3 Meningkatkan Sistem Jaringan Drainase</p> <p>4 Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana</p> <p>5 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Pusat Pertumbuhan Pariwisata</p> <p>6 Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan</p>	<p>3 Memelihara dan Meningkatkan Sistem Jaringan Drainase</p> <p>4 Melakukan pemeliharaan dan Meningkatkan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana</p> <p>5 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur transportasi dan Pembangunan Jalan Ke Daerah Pusat Pertumbuhan, Wilayah Perbatasan dan Wilayah Terpencil</p>	<p>3 Melakukan pemeliharaan dan Mempertahankan Bangunan turap/talud/bronjong pada daerah rawan longsor dan bencana</p> <p>4 Mempertahankan pelayanan infrastruktur transportasi yang ada yang mendukung tumbuhnya pusat-pusat perekonomian</p> <p>5 Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan</p>	<p>3 Seluruh Ruas jalan yang berada pada posisi rawan longsor dilengkapi drainase</p> <p>4 Aksebilitas dan Persentase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik 100 %</p> <p>5 Moda dan Trayek Transportasi Umum dan wisata yang menjangkau serta memadai</p>

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
4	5	8	9	10	11	12	13	14
	6 Luas Sawah yang terairi dengan sarana irigasi teknis	6 Masih Adanya Sawah yang belum mendapat perairan teknis	7 Meningkatkan Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan yang dapat	6 Meningkatkan ketersediaan air untuk usaha pertanian	7 Meningkatkan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum 8 Mendorong Terwujudnya Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur 9 Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api	6 Melakukan penyempurnaan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum 7 Mendorong Terwujudnya Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur 8 Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api 9 Memelihara dan meningkatkan Jaringan Irigasi agar jangkauan Pelayanan	6 Mendorong Terwujudnya Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur 7 Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api 8 Memelihara dan meningkatkan Jaringan Irigasi	6 Luas sawah yang dilayani irigasi 80%.

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
4	5	8	9	10	11	12	13	14
	7 Rumah Tangga terlayani listrik sebagai sumber energi penerangan	7 Belum Optimalnya Pelayanan Listrik kepada masyarakat	dilakukan lebih luas	5 Memfasilitasi peningkatan layanan PLN dan mencari alternatif sumber energi listrik	1 Memfasilitasi peningkatan layanan PLN dan kajian penggunaan sumber energi listrik tergantikan	yang dapat dilakukan lebih luas		7 Seluruh Rumah Tangga di Kota Sawahlunto dapat menikmati fasilitas penerangan PLN
	8 Rumah Tangga sudah terlayani Air Minum	8 Belum Optimalnya Pelayanan air minum dan air bersih kepada masyarakat	8 Meningkatkan Pelayanan Air bersih kepada Masyarakat	8 Memperluas jangkauan pelayanan air bersih	1 Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih 2	10 Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih	9 Memperluas jangkauan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih	8 Persentase Layanan Air Minum 90 %
	9 Persentase Rumah Tidak Layak Huni	9 Masih Banyaknya masyarakat yang menempati rumah yang tidak layak huni		9 Memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	1 Percepatan pertumbuhan pembangunan perumahan dan perkantoran serta industri sesuai prospek pengembangan ekonomi ssecara proporsional 3			9 Persentase Pelayanan Perumahan 70 %
10 Rumah tangga dengan sanitasi baik			Menyediakan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	1 Menyediakan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) 4	11 Menyediakan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	10 Menyediakan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU)		
			7 Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial	1 Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial 5	12 Memelihara dan Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial	11 Memelihara dan Meningkatkan kualitas bangunan pemerintah dan fasilitas sosial		

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
4	5	8	9	10	11	12	13	14
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah	1 Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam mengelola Sampah	1 Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah	1 Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah	1 Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah	1 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah	1 Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah sehingga menghasilkan nilai tambah dari sisi ekonomi	1 Terciptanya Kondisi Lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan terkelolanya sampah dan limbah secara terstruktur dan baik
	2 Jumlah Rumah Tangga Yang melaksanakan 3R		2 Mengupayakan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan dan bernilai tambah	2 Mengupayakan pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan dan bernilai tambah	2 Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah	2 Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan Sampah sehingga menghasilkan nilai tambah dari sisi ekonomi	2 Pengoptimalan fungsi dan peran Lembaga Pengelola Sampah di tiap Desa/Kel	
	3 Cakupan pelayanan persampahan	2 Belum Optimalnya Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan di TPS dan TPA Kota Sawahlunto	3 Meningkatkan kemampuan masyarakat pengelola lingkungan hidup	3 Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang untuk kebersihan lingkungan	3 Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang untuk kebersihan lingkungan	3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan hidup	3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan hidup	
					4 Rintisan Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah	4 Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah di tiap Desa/Kel		

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025		
4	5	8	9	10	11	12	13	14	
3	Terlaksananya pembangunan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungan	1 Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	1 Masih adanya kasus pencemaran lingkungan akibat limbah udara, cair dan padat	1 Mengoptimalkan Sistem Drainase dan Penanganan Air Limbah	1 Melakukan pengendalian terhadap kegiatan pencemaran dan pengrusakan lingkungan	1 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1 Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan yang ramah	1 Memantapkan daya dukung lingkungan dalam pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan	1 Meningkatnya daya dukung lingkungan daan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
		2 Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 Meningkatkan Kapasitas dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	2 Meningkatkan Kapasitas dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	2 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup			2 Menguatnya sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik dibidang pertambangan dan lingkungan hidup	
		3 Belum Optimalnya Kelembagaan dan Sistem Penegakan Hukum terkait pengelolaan lingkungan Hidup	3 Mengarahkan penggunaan energi ramah lingkungan	3 Meningkatkan Sistem Informasi dan komunikai sumber daya lingkungan	2 Meningkatkan pengelolaan SDA dan Lingkungan yang berbasis manfaat untuk kepentingan daerah dan masyarakat	2 Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan	2 Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan	3 Terpeliharanya hutan lestari dan berkurang luas lahan kritis	
				4 Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan serta pengendalian tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan	3 Mengendalikan pencemaran daan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan				

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
4	5	8	9	10	11	12	13	14
	2 Terkendalinya aktivitas pertambangan , industri dan pertanian yang berwawasan lingkungan	4 Masih terdapatnya pertambangan mineral dan air tanah tanpa izin	4 Peningkatan Sistem Penegakan hukum bidang pertambangan 5 Memperkuat sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik terkait pengelolaan lingkungan hidup secara adil dan konsistensi 6 Memperkuat kelembagaan pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup	5 Peningkatan Sistem Penegakan hukum bidang pertambangan dan lingkungan hidup 6 Memperkuat sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik terkait pengelolaan lingkungan hidup secara adil dan konsistensi 7 Optimalisasi Potensi dibidang pertambangan dengan konservasi ramah lingkungan	4 Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan bekas tambang 5 Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang pertambangan dan lingkungan hidup	3 Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang pertambangan dan lingkungan hidup	3 Memantapkan sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik terkait pengelolaan lingkungan hidup secara adil dan konsistensi 4 Mengontrol sistem penegakan hukum dibidang pertambangan dan lingkungan hidup 5 Meningkatkan pengelolaan dan optimalisasi bidang pertambangan mineral, air dan kegeologian	4 Optimalnya produksi hasil bumi (mineral dan Air) yang ramah lingkungan

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
4	5	8	9	10	11	12	13	14
	3 Terjaganya kawasan lindung	5 Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam mentaati rencana geologi dan pencegahan bencana alam 6 Masih Belum teridentifikasi secara baik potensi Mineral selain batu bara di Kota Sawahlunto		8 Menganangkan usaha ekonomi produktif (Pertanian dan Perkebunan) dalam upaya stabilitas kualitas lingkungan hidup 9 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup 10 Meningkatkan potensi dan penanaman kebencanaan geologi	6 Mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam upaya stabilitas kualitas lingkungan dan hutan 7 Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan yang ramah 8 Meningkatkan pelaksanaan mitigasi bencana	4 Mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam upaya stabilitas kualitas lingkungan dan hutan 5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup 6 Meningkatkan pelaksanaan mitigasi bencana	6 Mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan dalam kehidupan masyarakat 7 Mengantisipasi kerusakan hutan dan lahan kritis	5 Berkurangnya kerugian akibat bencana kegeologian

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
4	5	8	9	10	11	12	13	14
	4 Meningkatnya kesadaran dan perilaku hemat energi dan air	7 Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan peralatan dan kebiasaan hemat energi dan air		11 Optimalisasi penggunaan teknologi ramah lingkungan			8 Mengupayakan pemanfaatan energi panas bumi, mikrohidro, biogas, surya dan bahan bakar nabati	
4 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dari ancaman bencana	1 Masih tingginya tingkat pencemaran lingkungan oleh limbah dan polusi 2 Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana (banjir, gerakan tanah, longsor dan gempa)	1 Melaksanakan penanganan terhadap lahan kritis 2 Menetapkan regulasi agar tidak terjadi penambahan luas lahan kritis 3 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lahan kritis	1 Menetapkan regulasi agar tidak terjadi penambahan luas lahan kritis 2 Meningkatkan penanganan lahan kritis di beberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana 3 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lahan kritis	1 Meningkatkan penanganan lahan kritis di beberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana secara terencana, sinergi dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan dan lintas sektor 2 Memberikan insentif dan penghargaan bagi masyarakat yang melakukan perbaikan lahan kritis secara mandiri	1 Meningkatkan penanganan lahan kritis di beberapa wilayah yang mengalami kondisi rawan bencana secara terencana, sinergi dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan dan lintas sektor	1 Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan dengan mengupayakan peningkatan penanganan lahan kritis dan yang potensial kritis di beberapa wilayah	1 Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis 2 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
4	5	8	9	10	11	12	13	14
				<p>4 Menetapkan daerah-daerah rawan bencana dan mensosialisasikan kepada masyarakat</p> <p>5 Membentuk Badan Penanggulangan bencana Daerah</p>	<p>3 Mengelola Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana</p> <p>4 Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>	<p>2 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang serasi, seimbang menuju pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana</p> <p>3 Optimalisasi Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>		

Tabel 5.5
MISI 2 : MENINGKATKAN FASILITAS DAN PELAYANAN UMUM
TUJUAN PEMBANGUNAN MISI 2 :

2. Untuk Mewujudkan Pola Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTRW

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Terwujudnya pembangunan berkelanjutan sesuai daya dukung lingkungan dan	1 Terpenuhinya RTH 30% dari luas wilayah kota	1 Masih Rendahnya Persentase RTH terhadap luas Kota	1 Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu dan konsisten	1 Memelihara dan meningkatkan ruang terbuka hijau serta taman-taman kota 2 Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan tata ruang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayahnya	1 Memelihara dan meningkatkan ruang terbuka hijau serta taman-taman kota 2 Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan tata ruang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayahnya	1 Sosialisasi Pemanfaatan dan pengendalian ruang 2 Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan tata ruang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayahnya 3 Memelihara dan meningkatkan ruang terbuka hijau serta taman-taman kota	1 Optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu dan konsisten 2 Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan tata ruang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik wilayahnya 3 Memantapkan pemeliharaan dan ruang terbuka hijau serta taman-taman kota	1 Tercapainya target 30 % RTH

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Meningkatnya jumlah green building dan green school.	2 Belum Optimalnya Sosialisasi Pemanfaatan dan Pengendalian ruang	<p>2 Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang rencana tata ruang</p> <p>3 Menyesuaikan struktur dan pola pemanfaatan ruang dengan mengacu kepada usaha pencapaian visi dan misi kota</p>	<p>3 Meningkatkan pengelolaan tata ruang kota</p> <p>4 Menyusun Rencana Tata Ruang wilayah</p> <p>5 Sosialisasi Pemanfaatan dan pengendalian ruang</p>	3 Sosialisasi Pemanfaatan dan pengendalian ruang	4 Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang secara terpadu dan konsisten		2 Bangunan pemerintah dan seklah menjadi menerapkan konsep ramah lingkungan

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>3 Masih minimya bangunan perkantoran dan sekolah yang ramah lingkungan</p> <p>4 Belum Tersusunnya Data Spasial yang lengkap untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan</p>	<p>4 Menciptakan kawasan prioritas dan andalan yang dapat memacu pembangunan dan pengembangan wilayah</p> <p>5 Meningkatkan Ketersediaan Data Spasial untuk perencanaan</p>	<p>6 Membangun infrastruktur di kawasan strategis</p> <p>7 Meningkatkan Ketersediaan Data Spasial untuk perencanaan</p>	<p>4 Membangun infrastruktur di kawasan strategis</p>	<p>5 Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang</p>		<p>3 Terciptanya ruang terbuka publik sebagai sarana interaksi sosial</p> <p>4 Meningkatnya ketersediaan data Spasial untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang</p>

Tabel 5.6
MISI 2 : MENINGKATKAN FASILITAS DAN PELAYANAN UMUM
TUJUAN PEMBANGUNAN MISI 2 :

3. Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Tersedianya pelayanan kesehatan dan sosial yang berkualitas dan terjangkau	<p>1 Fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang sesuai standar</p> <p>2 Akses masyarakat terhadap sarana kesehatan</p>	<p>1 Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan masih dirasa belum memenuhi kebutuhan</p> <p>2 Masih dijumpai masyarakat yang kesulitan mengakses sarana kesehatan terutama di daerah pedesaan dan tempat terpencil</p>	<p>1 Mengembangkan peran serta masyarakat/lembaga/badan usaha dengan pola kemitraan dibidang kesehatan</p> <p>2 Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau</p> <p>3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan</p>	<p>1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan</p> <p>2 Meningkatkan Kuantitas dan kualitas serta penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan</p> <p>3 Meningkatkan akses masyarakat kota terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas</p>	<p>1 Meningkatkan Sarana dan Prasarana kesehatan yang berkualitas</p> <p>2 Meningkatkan Kuantitas dan kualitas serta penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan</p> <p>3 Meningkatkan akses masyarakat kota terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas</p>	<p>1 Meningkatkan Sarana dan Prasarana kesehatan yang berkualitas</p> <p>2 Meningkatkan Kuantitas dan kualitas serta penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan</p>	<p>1 Meningkatkan Sarana dan Prasarana kesehatan yang berkualitas</p>	1 Semua fasilitas layanan kesehatan telah memenuhi standar

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat			
2 Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat	<p>1 Angka kesakitan</p> <p>2 Angka kematian ibu melahirkan dan angkakematian bayi</p> <p>3 Angka harapan hidup</p> <p>4 Prevalensi balita gizi kurang</p>	<p>1 Masih tingginya angka kunjungan ke fasilitas layanan kesehatan</p> <p>2 Angka kematian ibu melahirkan masih relatif tinggi</p> <p>3 Masih Rendahnya Umur Harapan Hidup</p> <p>4 masih ditemukannya kasus balita kekurangan gizi</p>	<p>1 Meningkatkan jumlah tenaga medis/kesehatan yang berkualitas</p> <p>2 Mengupayakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, ibu dan anak</p> <p>3 Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, balita serta usia produktif</p>	<p>1 Meningkatkan sistim surveilans, monitoring dan informasi kesehatan daerah</p> <p>2 Meningkatkan Cakupan pelayanan kesehatan bagi lansia ibu dan anak</p> <p>3 Meningkatkan Kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, balita serta usia produktif</p>	<p>1 Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia dibidang Kesehatan</p> <p>2 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Manajemen Kesehatan</p>	<p>1 Meningkatkan penyuluhan tentang gizi dan program imunisasi</p> <p>2 Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi tentang lingkungan dan budaya hidup yang sehat kepada masyarakat</p>	<p>1 Meningkatkan penyuluhan tentang gizi dan program imunisasi kepada ibu dan bayi yang baru lahir</p>	<p>1 Menurunnya Angka Kematian Bayi dan ibu melahirkan</p> <p>2 Meningkatnya Umur Harapan Hidup</p> <p>Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang</p>

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>5 Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial</p> <p>6 Jumlah kasus penyakit menular</p>	<p>5 Belum semua penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani</p> <p>6 Masih ditemukannya beberapa kasus penyakit menular</p>		<p>4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Pengendalian Kesehatan makanan</p>			<p>2 Memantapkan Kualitas Sumber daya Manusia Pelayanan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Management Kesehatan</p>	<p>3 penyebaran kasus penyakit menular dapat ditekan sehingga tidak terjadi KLB</p>
<p>3 Meningkatnya Kesadaran, Kemauan dan Kemampuan Hidup Sehat setiap orang</p>	<p>1 Rumah tangga dengan PHBS</p>	<p>1 masih banyak rumah tangga yang belum memenuhi PHBS</p>	<p>1 Mensosialisasikan prilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat</p>	<p>1 Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat kota untuk hidup sehat</p>	<p>1 Meningkatkan penyuluhan/sosialisasi tentang lingkungan dan budaya hidup yang sehat kepada masyarakat</p>		<p>1 Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian terhadap pelayanan kesehatan dan kesadaran masyarakat akan gizi dan pola hidup sehat</p>	

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Cakupan peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	2 Belum semua penduduk memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan		2 Meningkatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Penyelenggaraan asuransi kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat	2 Meningkatkan Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Penyelenggaraan asuransi kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat	1 Menjamin setiap masyarakat memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Penyelenggaraan asuransi kesehatan	2 Meningkatkan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin, obat dan perbekalan kesehatan,	1 Seluruh penduduk memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan
4 Meningkatnya pendapatan masyarakat	1 Tingkat pengangguran	1 Terbatasnya kesempatan kerja dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja	1 Penyempurnaan data pengangguran dan ketenagakerjaan sesuai potensi	1 Penyempurnaan data pengangguran dan ketenagakerjaan sesuai potensi	1 Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, kompetensi dan keahlian pengangguran	1 Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, kompetensi dan keahlian pengangguran	1 Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, kompetensi dan keahlian pengangguran	1 Berkurangnya Tingkat Pengangguran menjadi 1 %
	2 Pemerataan pendapatan	2 Adanya potensi kesenjangan pendapatan		3 Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, kompetensi dan keahlian pengangguran				

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>3 PDRB perkapita</p> <p>4 Stabilitas pertumbuhan ekonomi</p> <p>5 Menurunnya tingkat kemiskinan</p>	<p>3 PDRB perkapita masih dibawah rata-rata nasional</p> <p>4 Laju Pertumbuhan ekonomi masih dibawah nasional dan provinsi</p> <p>5 Masih cukup banyak rumah tangga yang rentan menjadi miskin</p>	<p>2 Meningkatkan program kerjasama dengan lembaga dan instansi swasta lainnya dalam penyerapan tenaga kerja</p>	<p>3 Meningkatkan program kerjasama dengan koperasi, lembaga dan instansi swasta lainnya dalam penyerapan tenaga kerja</p>	<p>2 Meningkatkan program kerjasama dengan lembaga dan instansi swasta lainnya dalam penyerapan tenaga kerja</p> <p>3 Mengupayakan penciptaan jiwa interpreneur bagi masyarakat</p>	<p>2 Meningkatkan program kerjasama dengan lembaga dan instansi swasta lainnya dalam penyerapan tenaga kerja</p> <p>3 Mengupayakan penciptaan jiwa interpreneur bagi masyarakat</p> <p>4 Memberikan kemudahan bagi masyarakat penyediaan modal dan peningkatan kemampuan</p>	<p>2 Mengupayakan penciptaan jiwa interpreneur bagi masyarakat</p> <p>3 Memberikan kemudahan bagi masyarakat penyediaan modal dan peningkatan kemampuan</p>	<p>2 PDRB perkapita mencapai Rp.35 juta dengan kesenjangan yang tidak jauh</p> <p>3 Angka kemiskinan tidak melebihi 1,5%</p>
5 Tersedianya jaminan perlindungan dalam rumah tangga	1 Menurunnya kasus KDRT	1 Belum Optimalnya Penanganan Kasus KDRT di Kota Sawahlunto	1 Membentuk lembaga pemberdayaan perempuan, anak dan keluarga	1 Penguatan Kelembagaan dan Dukungan Program dan Kegiatan Perempuan, anak dan pengendalian kelahiran	1 Penguatan Kelembagaan dan Dukungan Program dan Kegiatan Perempuan, anak dan pengendalian kelahiran	1 Penguatan Kelembagaan dan Dukungan Program dan Kegiatan Perempuan, anak dan pengendalian kelahiran	1 Memantapkan program Penguatan Kelembagaan dan Dukungan Program dan Kegiatan Perempuan, anak dan pengendalian kelahiran	1 Jumlah KDRT 0 Kasus

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>2 Adanya lembaga perlindungan ibu dan anak</p> <p>3 Terkendalinya Tingkat kelahiran</p>	<p>2 Belum Optimalnya Pengendalian Kelahiran di Kota Sawahlunto</p>	<p>2 Mengupayakan kepastian hukum perlindungan anak, kesetaraan gender, penurunan tingkat kekerasan dalam keluarga</p>	<p>2 Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, kesetaraan gender, penurunan tingkat kekerasan dalam keluarga</p>	<p>2 Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, kesetaraan gender, penurunan tingkat kekerasan dalam keluarga</p> <p>3 Meningkatkan Kualitas Kehidupan, peran perempuan dan kesetaraan gender</p>	<p>2 Mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, kesetaraan gender, penurunan tingkat kekerasan dalam keluarga</p>	<p>2 Memantapkan program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, kesetaraan gender, penurunan tingkat kekerasan dalam keluarga</p>	<p>2 Terkendalinya angka kelahiran di Kota Sawahlunto</p> <p>3 Terwujudnya peran perempuan dalam pemerintah minimal 20 %</p> <p>4 Terkendalinya angka kelahiran di Kota Sawahlunto</p>

Tabel 5.7
MISI 2 : MENINGKATKAN FASILITAS DAN PELAYANAN UMUM
TUJUAN PEMBANGUNAN MISI 2 :

4. Untuk Meningkatkan Mutu dan Daya Saing Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Terwujudnya pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan	1 Pelayanan pendidikan sesuai standar 2 Jumlah Sekolah yang terakreditasi 3 Kualifikasi Guru berpendidikan Minimal S1	1 Belum optimalnya Pelayanan Pendidikan ditingkat Dasar, Menengah dan Atas di Kota Sawahlunto 2 Masih lemahnya kreativitas dan inovasi dalam pengembangan pendidikan	1 melengkapi sarana dan prasarana pendidikan 2 Meningkatkan Mutu Pendidikan di semua tingkatan di sarana daan prasarana yang berkualitas	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan 2 Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan	1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai 2 Meningkatkan harkat, martabat, dan insan berkarakter, berilmu pengetahuan dan menguasai sains, teknologi, seni dan budaya	1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang memadai	1 Mewujudkan kualitas sekolah berstandar internasional 2 Mempertahankan kualitas SMK berbasis lifeskill sesuai kebutuhan pasar	1 Meningkatnya Nilai APM setiap jenjang pendidikan

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4 Angka Melek Huruf	3 Belum Optimalnya Pelaksanaan Program Peningkatan Angka Melek Huruf	3 Perluasan ruang otonomisasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip goodgovernance	3 Mendorong tumbuh dan berkembangnya perguruan tinggi	3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan		3 Membuat rintisaan pembangunan Perguruan tinggi yang bermutu	2 Meningkatkan kualitas pendidikan terutama WAJAR 12 Tahun
	5 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	4 Belum Optimalnya Pelaksanaan Program Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah		4 Melaksanakan Wajar 12 Tahun	4 Mewujudkan Wajar 12 Tahun yang berkualitas	2 Mewujudkan Wajar 12 Tahun yang berkualitas		
	6 APM/APK SD	5 Masih Rendahnya APM setiap jenjang pendidikan Kota Sawahlunto	4 Mencanangkan Pendidikan anak usia dini	4 Memperluas Kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat baik formal maupun non formal	5 Membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin	3 Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan	4 Meningkatkan pelaksanaan program beasiswa	3 Meningkatnya angka IPM terutama angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7 APM/APK SLTP			5 Meningkatkan layananan PAUD		4 Meningkatkan harkat, martabat, dan insan berkarakter, berilmu pengetahuan dan menguasai sains, teknologi, seni dan budaya	5 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan	
	8 APM/APK SLTA			6 Meningkatkan kualitas Pendidikan anak usia dini		5 Memperluas Kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat baik formal maupun non formal		
	9 Kelulusan (SD/MI, SLTP, SLTA)			7 Meningkatkan beasiswa bagi siswa/i berprestasi				
	10 Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif			8 Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat miskin	6 Penguatan Organisasi Kepemudaan dengan dukungan program dan kegiatan kepemudaan	6 Penguatan Organisasi Kepemudaan dengan dukungan program dan kegiatan kepemudaan		

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11 Jumlah Olahraga yang populer ditengah masyarakat			9 Pembinaan dan peningkatan Prestasi Olahraga dan seni	7 Mendorong pembentukan kelompok pemuda produktif yang dapat berdaampaa k pada pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan 8 Meningkatkan Pemahaman terhadap budaya olahraga, budaya sehat dan sportivitas serta prestasi olahraga 9 Mendukung Pemantapan program KONI serta kelompok olahraga desa dan Kelurahan	7 Mendukung Pemantapan program KONI serta kelompok olahraga desa dan Kelurahan		

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Terciptanya lulusan sekolah yang berdaya saing	<p>1 Lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi Terakreditasi</p> <p>2 Siswa SMK yang langsung bekerja di bidangnya</p> <p>3 Rata-rata Nilai UN</p>	<p>1 Masih Adanya Lulusan SMU yang tidak diterima di Perguruan Tinggi Negeri</p> <p>2 Masih Adanya Siswa Lulusan SMK yang tidak Bekerja</p>	<p>1 meningkatkan pelaksanaan pendidikan ekstra kurikuler</p>	<p>1 Meningkatkan kualitas SMK berbasis lifeskill sesuai kebutuhan pasar</p>	<p>1 Peningkatan kompetensi dan kualifikasi Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>2 Mewujudkan kualitas SMK berbasis lifeskill sesuai kebutuhan pasar</p>	<p>1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan</p> <p>2 Mewujudkan kualitas SMK berbasis lifeskill sesuai kebutuhan pasar</p>		<p>1 Meningkatnya lulusan SMA yang diterima di PT terakreditasi</p> <p>2 Meningkatnya sekolah-sekolah kejuruan yang berorientasi pasar, berbasis potensi wilayah dan life skill yang memiliki daya saing internasional</p>

Tabel 5.8
MISI 2 : MENINGKATKAN FASILITAS DAN PELAYANAN UMUM
TUJUAN PEMBANGUNAN MISI 2 :
 5. Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Baik	1 Indeks kepuasan masyarakat atas Pelayanan Kependudukan 2 Persentase Penduduk Ber KTP 3 Persentase Keluarga ber KK	1 Belum Optimalnya Pelayanan Kependudukan 2 Masih Adanya Penduduk yang belum mempunyai KTP 3 Masih Adanya Keluarga yang belum mempunyai KK	1 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sampai tingkat pemerintah dasar 2 Menginventarisir data administrasi kependudukan	1 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sampai tingkat pemerintah dasar 2 Menyempurnakan data administrasi kependudukan 3 Mengupayakan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan kebutuhan universal	1 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan kebutuhan universal 2 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sampai tingkat pemerintah dasar 3 Menyempurnakan data administrasi kependudukan	1 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan kebutuhan universal 2 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sampai tingkat pemerintah dasar 3 Menyempurnakan data administrasi kependudukan	1 Mewujudkan pelayanan dan data administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan kebutuhan universal sampai ke tingkat pemerintahan terendah	1 Persentase Penduduk Ber KTP 100 % 2 Persentase Keluarga ber KK 100 % 3 Persentase Penduduk yang mempunyai Akta Kelahiran 100 %

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4 Persentase Penduduk yang mempunyai Akta Kelahiran 5 Persentase Pasngan Nikah mempunyai Akta Nikah	4 Masih Adanya Penduduk yang belum mempunyai Akte Kelahiran 5 Masih Adanya Pasangan Nikah yang belum mempunyai Akte Nikah						4 Persentase Pasngan Nikah mempunyai Akta Nikah 100 %

Tabel 5.9
MISI 2 : MENINGKATKAN FASILITAS DAN PELAYANAN UMUM
TUJUAN PEMBANGUNAN MISI 2 :

6. Untuk Meningkatkan Sinergisitas Dalam Upaya Mewujudkan Good Government and Clean Governance

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Terselenggaranya Good Governance dan Clean Government	<p>1 Terpenuhiya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)</p> <p>2 Hasil Audit Laporan Keuangan</p> <p>3 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah</p>	<p>1 Belum sesuaiya penempatan pegawai dengan kompetensi pendidikan dan pola karir yang jelas</p> <p>2 Belum Efektif dan Efisiennya Sistem Organisasi dan tata Kerja</p> <p>3 Hasil Laporan Audit Keuangan masih WDP</p>	<p>1 Mengoptimalkan pengawasan melekat dan fungsional</p> <p>2 Menyusun SOTK yang lebih sesuai kebutuhan</p> <p>3 Penerapan sistem karir dan prestasi kerja secara serasi</p>	<p>1 Meningkatkan kualitas SDM Aparatur pemerintahan</p> <p>2 Menyempurnakan Sistem Organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien</p> <p>3 Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya</p>	<p>1 Menciptakan Tata Kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan melayani</p> <p>2 Pemantapan sistem birokrasi yang berkeadilan dan membuka peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan</p> <p>3 Menyempurnakan Sistem Organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien</p>	<p>1 Mewujudkan Penyempurnaan Satuan Organisasi Pemerintah daerah kearah organisasi yang efektif dan efisien</p> <p>2 Mewujudkan Aparatur profesional dan berkualitas</p> <p>3 Mewujudkan sistem informasi yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan</p>	<p>1 Menyempurnakan Sistem Organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien</p> <p>2 Memantapkan kualitas Aparatur Pemerintahan yang profesional</p>	<p>1 Tercapainya kesesuaian penempatan pegawai dengan kompetensi pendidikan dan pola karir yang jelas</p> <p>2 Meningkatnya kapasitas organisasi dalam rangka meningkatkan profesionalitas dalam kinerja birokrasi yang ramping struktur</p> <p>3 Terciptanya sistem birokrasi yang efektif dan efisien</p>

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Daerah					Pemerintahan		
	4 Terjadinya Pemerataan Pembangunan di tiap tiap desa/Kelurahan	4 Belum Optimalnya Pelayanan Publik yang diterima Masyarakat	4 Meningkatkan kualitas aparatur	4 Meningkatkan sistem informasi yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan pemerintahan	4 Meningkatkan sistem informasi yang jelas, akurat dan mudah diakses tentang pengelolaan Pemerintahan	4 Meningkatkan sarana informasi dan telekomunikasi setiap wilayah	3 Meningkatkan sarana informasi dan telekomunikasi setiap wilayah	4 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah
	5 Kinerja dan disiplin aparatur	5 Belum Optimalnya Pemerataan Pembangunan ditiap daerah	5 Pemantapan sistem penyusunan, pengelolaan, serta pertanggungjaban anggaran	5 Mewujudkan sistem karir berbasis kompetensi dan kinerja	5 Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya		4 Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya	5 Terwujudnya Transparansi Anggaran Oleh Pemerintah Daerah
	6 Realisasi penyerapan anggaran	6 Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan informasi oleh Masyarakat	6 Mengupayakan penerapan hukum/aturan secara konsisten	6 Meningkatkan disiplin pegawai	6 Meningkatkan pemberdayaan dan SDM penduduk miskin serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang menganggur	5 Meningkatkan pemberdayaan dan SDM penduduk miskin serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang menganggur	5 Meningkatkan pemberdayaan dan SDM penduduk miskin serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang menganggur	6 Berkurangnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin
	7 Persentase PAD terhadap APBD	7 Belum Terwujudnya Transparansi Anggaran Oleh Pemerintah Daerah	7 Peningkatan SDM penduduk miskin dan tenaga kerja yang menganggur	7 Mengimplementasikan sistem dan prosedur Reward and Punishment bagi para pegawai	7 Menerapkan sistem dan prosedur Reward and Punishment dalam upaya meningkatkan kinerja dan	6 Menerapkan sistem dan prosedur Reward and Punishment dalam upaya meningkatkan	6 Mewujudkan perencanaan partisipatif dalam pembangunan	7 Membudayakan penerapan sistem dan prosedur Reward and Punishment dalam upaya meningkatkan

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>8 Implementasi IT dalam Birokrasi Pemerintah</p> <p>9 Jumlah Hasil Penelitian yang diterapkan</p>	<p>8 Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan informasi oleh Masyarakat</p>	<p>8 Mengefektifkan sarana informasi dan telekomunikasi</p> <p>9 Mengupayakan tersedianya sistem informasi yang jelas, akurat dan mudah diakses</p>	<p>8 Meningkatkan sarana informasi dan telekomunikasi setiap wilayah</p> <p>9 Peningkatan SDM penduduk miskin dan tenaga kerja yang menganggur</p> <p>10 Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan</p>	<p>8 Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan</p> <p>9 Meningkatkan sarana informasi dan telekomunikasi setiap wilayah</p>	<p>7 Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan</p>	<p>7 Mewujudkan good Governance dan clean government dalam sistem pemerintahan Kota Sawahlunto</p>	<p>kinerja dan disiplin pegawai</p>

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Meningkatkan Investasi	<p>1 Nilai Investasi PMA/PMDN</p> <p>2 Jumlah Investor / Perusahaan</p> <p>3 Meningkatnya Kemampuan Berwiraswasta bagi para pelaku UMKM</p> <p>4 Tersedianya Pelayanan Pemerintah Berupa Pelayanan Satu Pintu</p>	<p>1 Belum Kondusifnya Iklim Berinvestasi</p> <p>2 Belum Mendukungnya Sarana dan Prasarana Pendukung Iklim Berinvestasi</p> <p>3 Masih Rendahnya Kemampuan dan Kapabilitas Masyarakat untuk berwiraswasta</p> <p>4 Belum Optimalnya Pelayanan Pemerintah Untuk Mempermudah Investor memulai usahanya</p>	<p>1 Identifikasi dan pengkajian secara menyeluruh terhadap peluang investasi</p> <p>2 Mendorong terciptanya lembaga-lembaga keuangan yang aman dan terpercaya</p> <p>3 Mengadakan promosi pada skala regional, nasional dan internasional terhadap sektor-sektor potensial di Kota Sawahlunto</p> <p>4 Menciptakan kondisi yang kondusif untuk berinvestasi</p>	<p>1 Meningkatkan promosi pada skala regional, nasional dan internasional terhadap sektor-sektor potensial di Kota Sawahlunto</p> <p>2 Mendorong terciptanya lembaga-lembaga keuangan yang aman dan terpercaya</p> <p>3 Mendorong terciptanya hubungan yang baik dan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor dan sebaliknya</p> <p>4 Memeratakan informasi dan kemudahan akses mencari investor dan mencari sektor yang potensial untuk berkembang</p>	<p>1 Meningkatkan promosi pada skala regional, nasional dan internasional terhadap sektor-sektor potensial di Kota Sawahlunto</p> <p>2 Meningkatkan iklim berinvestasi yang kondusif bagi investor</p> <p>3 meningkatkan kualitas lembaga pendukung investasi yang aman, terpercaya dan memudahkan proses investasi</p> <p>4 Memeratakan informasi dan kemudahan akses mencari investor dan mencari sektor yang potensial untuk berkembang</p>	<p>1 Meningkatkan promosi pada skala regional, nasional dan internasional terhadap sektor-sektor potensial di Kota Sawahlunto</p> <p>2 Meningkatkan iklim berinvestasi yang kondusif bagi investor</p> <p>3 meningkatkan kualitas lembaga pendukung investasi yang aman, terpercaya dan memudahkan proses investasi</p> <p>4 meningkatkan kualitas sarana dan prasarana investasi</p>	<p>1 Menjaga dan mempertahankan iklim berinvestasi yang kondusif</p> <p>2 Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang investasi</p> <p>3 meningkatkan kualitas dan profesionalisme lembaga pendukung investasi yang aman, terpercaya dan memudahkan proses investasi</p>	<p>1 Terciptanya iklim berinvestasi yang kondusif bagi investor</p> <p>2 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang investasi</p>

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5 Terwujudnya Pelayanan Investasi yang mudah, murah, cepat dan pasti				5 meningkatkan kualitas sarana dan prasarana investasi			

Tabel 5.10
MISI 2 : MENINGKATKAN FASILITAS DAN PELAYANAN UMUM
TUJUAN PEMBANGUNAN MISI 2 :

7. Untuk Meningkatkan Kesadaran dan Peran serta Masyarakat dalam berpolitik

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Meningkatkan Kesadaran dan Peran serta Masyarakat dalam berpolitik	1 Tingkat Partisipasi Pemilih 80 % dari Penduduk Usia Pemilih	1 Tingkat Partisipasi Pemilih 60 %	<p>1 Memberikan Kesempatan Seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik</p> <p>2 Memberikan Kesempatan kepada Anggota Parpol untuk meningkatkan kemampuannya</p>	<p>1 Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terkait pemilihan umum</p> <p>2 Memberikan Kesempatan kepada Anggota Parpol untuk meningkatkan kemampuannya</p>	<p>1 Membangun Sistem Politik yang demokratis dengan memberi peran kepada semua parpol secara kualitatif dan proporsional</p> <p>2 Pencerdasan kehidupan berpolitik bagi masyarakat</p> <p>3 Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilu</p>	<p>1 Memperkuat Sistem Politik yang demokratis dengan memberi peran kepada semua parpol secara kualitatif dan proporsional</p> <p>2 Meningkatkan Pencerdasan kehidupan berpolitik bagi masyarakat</p> <p>3 Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pemilu</p>	<p>1 Memantapkan Sistem Politik yang demokratis dengan memberi peran kepada semua parpol secara kualitatif dan proporsional</p> <p>2 Memantapkan Pencerdasan kehidupan berpolitik bagi masyarakat</p>	1 Tingkat Partisipasi Pemilih sebesar 80 % dari penduduk usia pemilih

Tabel 5.11
MISI 3 : MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA TAMBANG
TUJUAN PEMBANGUNAN MISI 3
Untuk Mempertegas Spesifikasi Wisata Tambang sebagai branchmark Wisata Sawahlunto

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Meningkatkan Jumlah Objek Wisata Tambang	1 Terpeliharanya Benda Cagar Budaya	1 Belum Optimalnya Pemeliharaan dan Pelestarian Benda-benda Cagar Budaya yang ada di Kota Sawahlunto	1 Mengupayakan terbentuknya lembaga pengelolaan benda dan bangunan cagar budaya	1 Membentuk lembaga pengelolaan benda dan bangunan cagar budaya 2 Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran benda dan bangunan cagar budaya	1 Penguatan kelembagaan pengelola benda dan bangunan cagar budaya 2 Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran benda dan bangunan cagar budaya	1 Penguatan kelembagaan pengelola benda dan bangunan cagar budaya 2 Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran benda dan bangunan cagar budaya	1 Penguatan kelembagaan pengelola benda dan bangunan cagar budaya 2 Meningkatkan dukungan terhadap pengelolaan dan pemugaran benda dan bangunan cagar budaya	1 Diakuiya sebagai Kota Warisan Dunia oleh UNESCO 2 Ditetapkannya sebagai kota pusaka nasional

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2 Menginventarisir benda-benda cagar budaya dan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Sawahlunto	3 Mengembangkan nilai nilai keragaman budaya sebagai daya tarik wisata melalui kerjasama dengan semua pihak menuju terbentuknya suatu kawasan living museum				
2 Terwujudnya penataan dan pelestarian sebagai kota pusaka	1 Meningkatkan Jumlah Objek Wisata Spesifik Tambang Yang menjadi Unggulan di Kota Sawahlunto 2 Terdaftar kedalam Warisan Dunia (UNESCO)	1 Belum Terwujudnya Wisata Tambang sebagai Ikon Spesifik utama Wisata Sawahlunto 2 Masih dalam Proses Pendaftaran ke dalam Kota Warisan Dunia (UNESCO)	1 Mempersiapkan kawasan-kawasan kota lama dan bangunan bersejarah untuk dikunjungi wisatawan	1 Memperkuat citra dan komitmen daerah menjadi kota pusaka dan kota warisan dunia	1 Memperkuat citra dan komitmen daerah menjadi kota pusaka dan kota warisan dunia melalui perpaduan dan promosi di Objek wisata rekreasi dan hiburan 2 Mewujudkan pencapaian terdaftar sebagai kota warisan dunia versi UNESCO	1 Memperkuat citra dan komitmen daerah menjadi kota pusaka dan kota warisan dunia melalui perpaduan dan promosi di Objek wisata rekreasi dan hiburan	1 Memperkuat citra dan komitmen daerah menjadi kota pusaka dan kota warisan dunia melalui perpaduan dan promosi di Objek wisata rekreasi dan hiburan	1 20 % dari total Wisatawan mengunjungi Kota Pusaka

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>3 Diakui sebagai kota pusaka nasional</p> <p>4 Meningkatkan Jumlah Kunjungan wisatawan ke Objek Wisata Kota Pusaka</p>	<p>3 Ditetapkan sebagai peserta program penataan dan pelestarian kota pusaka</p> <p>4 Jumlah Kunjungan ke Objek Wisata pusaka masih 7 % dari Total Kunjungan</p>	<p>2 Membangun kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka</p>	<p>2 Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka</p>	<p>3 Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka</p>	<p>2 Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka</p>	<p>2 Meningkatkan kerjasama tingkat regional, nasional dan internasional dalam rangka penguatan status kota pusaka</p>	

Tabel 5.12
MISI 4 : MENGEMBANGKAN SELURUH POTENSI KOTA YANG DAPAT MENDORONG BERKEMBANGNYA PARIWISATA
TUJUAN PEMBANGUNAN MISI 4
Untuk Mewujudkan Kota Sawahlunto Menjadi Suatu paket Lengkap Kota Wisata.

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Berkembangnya usaha penunjang industri pariwisata	1 Meningkatnya produk lokal yang berkualitas dan layak menjadi souvenir	1 Belum Tersedianya bahan baku yang berkualitas sebagai bahan dasar industri pengolahan di Kota Sawahlunto	<p>1 Mendorong perkembangan sektor industri terutama industri kecil terpadu dengan memanfaatkan sumber daya lokal</p> <p>2 Mendorong peningkatan SDM Perajin</p> <p>3 Mewujudkan terlaksananya kerjasama pengembangan industri manufaktur berbasis potensi lokal</p>	1 Mendorong tumbuh dan berkembangnya agribisnis dan agroindustri	1 Penggunaan Kearifan Lokal untuk memantapkan berbagai pola kehidupan perekonomian yang berbasis pada pengembangan ekonomi kreatif, mandiri dan berdaya saing	1 Meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal untuk kegiatan jasa perdagangan	1 Memperkuat UMKM dan industri kreatif dari segi ekonomi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan agar lebih mandiri dan berdaya saing	1 Terserapnya produk UMKM di pasar Regional, nasional, dan internasional

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Meningkatnya Jumlah Lembaga Ekonomi dan UMKM yang Sehat	<p>2 Belum Optimalnya Pengembangan Sektor UMKM sebagai pendukung usaha masyarakat</p> <p>3 Masih rendahnya manajemen dan kualitas produk UMKM</p> <p>4 Masih rendahnya penggunaan teknologi ramah lingkungan di UMKM</p>	<p>4 Mengelompokkan dan mengembangkan kawasan strategis menjadi kawasan jasa perdagangan, UMKM dan industri kreatif</p> <p>5 Mendorong Kerjasama yang sinergis diantara sesama pedagang</p>	<p>2 Mendorong terwujudnya industri dan usaha kecil menengah serta koperasi yang tangguh profesional dan mandiri</p> <p>3 Memberikan kemudahan dan kesempatan bagi masyarakat dalam penciptaan usaha-usaha baru pengembangan ekonomi</p>	<p>2 Mengembangkan kawasan strategis menjadi kawasan jasa perdagangan, UMKM dan industri kreatif</p> <p>3 Menyusun AMDAL bagi kawasan pengembangan UMKM, industri kreatif serta pusat perdagangan</p>	<p>2 Meningkatkan pengetahuan, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat pelaku usaha dan kegiatan jasa perdagangan, UMKM dan Industri kreatif terkait penggunaan teknologi, kemudahan akses pemasaran dan permodalan Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan, UMKM dan ekonomi kreatif</p> <p>4 Mendorong peningkatan investasi terhadap UMKM dan ekonomi kreatif</p>	<p>2 Meningkatkan promosi hasil-hasil UMKM dan industri kreatif pada tingkat nasional</p>	<p>2 Meningkatkan kualitas produk UMKM</p>

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>3 Meningkatnya ketersediaan kamar hotel dan homestay</p> <p>4 Pengembangan Kemitraan Usaha Hulu Hilir secara Terintegrasi</p> <p>5 Meningkatnya jumlah rumah makan dan restoran yang layak</p>	<p>5 Masih rendahnya akses UMKM terhadap informasi pasar dan permodalan</p> <p>6 Belum Optimalnya pemanfaatan lembaga Ekonomi dan Permodalan untuk mengembangkan usaha</p> <p>7 Belum adanya konsep yang jelas pengembangan produk unggulan dari hulu ke hilir</p>	<p>6 Menyiapkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan</p> <p>7 Meningkatkan teknologi manufaktur</p>	<p>4 Melanjutkan pemberian skim kredit melalui penyederhanaan aturan dan fasilitas peningkatan pemasaran hasil produksi</p> <p>5 Mendorong berkembangnya usaha ekonomi rakyat/ sektor riil dengan melaksanakan pola kemitraan antara pemerintah dan swasta</p>	<p>4 Meningkatkan infrastruktur berupa jalan, pusat perdagangan dan fasilitas pendukung jasa perdagangan</p> <p>5 meningkatkan kerjasama antara daerah produsen dengan pasar-pasar yang menjadi target penjualan hasil produksi</p> <p>6 meningkatkan iklim investasi yang menarik dan mudah bagi investor</p>	<p>5 Meningkatkan promosi hasil-hasil UMKM dan industri kreatif pada tingkat nasional</p> <p>6 Meningkatkan kualitas dan skala jaangkauan pelayanan jasa perdagangan, dari skala kabupaten menjadi skala regional (antar kabupaten)</p>		<p>3 Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan dan Fasilitas Akses Permodalan</p>

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan	
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2 Tersedianya Objek Pariwisata yang nyaman, dan berdaya Saing dan terbangunnay kerjasama dengan daerah lain dan institusi kepariwisataan	1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kawasan Pariwisata di Kota Sawahlunto	1 Belum Optimalnya kegiatan Reklamasi lahan bekas tambang di Kota Sawahlunto	1 Mengoptimalkan reklamasi lahan bekas tambang untuk kegiatan wisata dan kegiatan pemerintah lainnya	1 Mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan potensi daerah dan memberikan kemudahan berinvestasi serta bersinergi dengan semua lembaga pemerintah dan swasta dalam rangka menciptakan lapangan kerja					Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kawasan Pariwisata di Kota Sawahlunto
3 Tersedianya sarana dan prasana olahraga dan hobbi minat khusus yang mendukung pariwisata	1 Meningkatnya Pengelolaan obyek Wisata	1 Perlunya peningkatan Profesionalisme pengelola objek wisata	1 Membangun objek wisata rekreasi yang bernilai jual dan berdaya saing	1 Membangun dan meningkatkan pengelolaan objek wisata rekreasi yang bernilai jual dan berdaya saing	1 Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis diarahkan untuk percepatan pertumbuhan pembangunan perumahan dan perkantoran serta pabrik sesuai prospek pengembangan ekonomi secara proporsional	1 Mengintegrasikan pengelolaan objek wisata rekreasi dan objek wisata tambang dan kota tua, wisata olahraga dan minat khusus	2 Mengintegrasikan pengelolaan objek wisata rekreasi dengan objek wisata tambang dan kota tua, wisata olahraga dan minat khusus	2 Meningkatnya Pengelolaan Daerah Tujuan Wisata	

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>2 Meningkatnya Keanekaragaman Objek Wisata selain Wisata Tambang</p> <p>3 Meningkatnya Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Objek Wisata Kota Sawahlunto disertai peningkatan lama kunjungan</p>	<p>2 Masih Sedikitnya Objek Wisata di Kota Sawahlunto yang menjadi unggulan dan tidak membutuhkan waktu panjang bagi pengunjung untuk mengunjunginya</p>	<p>2 Menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dapat dijadikan objek wisata dan pendukung pariwisata</p>	<p>2 Mengembangkan potensi daerah lainnya yang dapat dijadikan objek wisata dan pendukung pariwisata</p> <p>3 Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional secara kontinu dan tepat sasaran</p>	<p>2 Pemaksimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya potensi yang ada dan inovasi objek wisata</p> <p>3 Mengembangkan suatu kawasan sentral objek wisata kota Sawahlunto yang terfokus</p> <p>4 Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional secara kontinu dan tepat sasaran</p>	<p>2 Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang profesional dan berkualitas</p> <p>3 Mengembangkan suatu kawasan sentral objek wisata kota Sawahlunto yang terfokus</p> <p>4 Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional secara kontinu dan tepat sasaran</p>	<p>1 Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang profesional dan berkualitas</p> <p>3 Mengembangkan suatu kawasan sentral objek wisata kota Sawahlunto terfokus</p> <p>4 Meningkatkan promosi wisata Sawahlunto di tingkat regional, nasional dan internasional secara kontinu dan tepat sasaran</p>	<p>1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kawasan Pariwisata di Kota Sawahlunto</p> <p>3 Meningkatnya Keanekaragaman Objek Wisata selain Wisata Tambang termasuk wisata olahraga dan minat khusus</p> <p>4 Meningkatnya Jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Objek Wisata Kota Sawahlunto</p>

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>4 Meningkatnya jumlah wisatawan minat khusus yang berkunjung ke obyek wisata</p> <p>5 Meningkatnya Pola Kerja Sama, Kemitraan dan Promosi wisata Daerah</p>	<p>3 Belum adanya fasilitas olahraga dan hobbi yang berpotensi mendatangkan wisatawan</p> <p>4 Belum efektif dan efisien nya kegiatan promosi wisata yang dilakukan</p>			5 Mencari terobosan dan objek wisata baru yang bernilai jual dan berdaya saing tinggi			5 Meningkatnya Pola Kerja Sama, Kemitraan dan Promosi wisata Daerah
4 Tersedianya pusat promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	<p>1 Meningkatnya aktivitas ekonomi di pasar yang representatif dan pedagang informal yang tertata</p> <p>2 Meningkatnya Pemasaran Hasil Produk Unggulan Lokal di Kawasan Objek Wisata dan tempat strategis lainnya</p>	<p>1 Belum optimalnya penatan pedagang informal dan pasar tradisional di Kota Sawahlunto</p> <p>2 Belum optimal pemanfaatan kawasan objek wisata oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya</p>	<p>1 Meningkatkan kualitas dan mutu produk asli daerah kota Sawahlunto sehingga dapat bersaing ke tingkat Konsumen</p> <p>2 Mengoptimal pemanfaatan kawasan objek wisata oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya</p>	<p>1 Meningkatkan Penataan pasar tradisional dan pedagang informal</p> <p>2 Mengoptimal pemanfaatan kawasan objek wisata oleh masyarakat untuk mengembangkan usahanya</p>	<p>1 Memantapkan pengelolaan dan Penataan pasar tradisional dan pedagang informal</p> <p>2 Mewujudkan kawasan objek wisata yang berwawasan kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya</p>	<p>1 Memantapkan pengelolaan dan Penataan pasar tradisional dan pedagang informal</p> <p>2 Mewujudkan kawasan objek wisata yang berwawasan kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya</p>	<p>1 Memantapkan pengelolaan dan Penataan pasar tradisional dan pedagang informal</p> <p>2 Mewujudkan kawasan objek wisata yang berwawasan kemasyarakatan untuk mengembangkan usahanya</p>	<p>1 Revitalisasi Pasar Tradisional dan Penataan Pedagang Informal</p> <p>2 Meningkatnya Pemasaran Hasil Produk Unggulan Lokal di Kawasan Objek Wisata</p>

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3 Meningkatnya Jumlah Sentra Perdagangan Produk Unggulan	3 Belum adaya konsep yang jelas tentang penataan penjualan produk unggulan	3 Membentuk lembaga dan koperasi pengelolaan produk unggulan Sawahlunto	3 Penguatan kelembagaan pengelolaan produk unggulan Sawahlunto 4 Meningkatkan kualitas dan mutu produk asli daerah kota Sawahlunto sehingga dapat bersaing ke tingkat Konsumen	3 Penguatan kelembagaan pengelolaan produk unggulan Sawahlunto 4 Meningkatkan kualitas dan mutu produk asli daerah kota Sawahlunto sehingga dapat bersaing ke tingkat Konsumen	3 Penguatan kelembagaan pengelolaan produk unggulan Sawahlunto 4 Meningkatkan kualitas dan mutu produk asli daerah kota Sawahlunto sehingga dapat bersaing ke tingkat Konsumen	3 Penguatan kelembagaan pengelolaan produk unggulan Sawahlunto 4 Memantapkan kualitas dan mutu produk asli daerah kota Sawahlunto sehingga dapat bersaing ke tingkat Konsumen	3 Peningkatnya Jumlah Sentra Perdagangan Produk Unggulan
4 Tercapainya Produk Pertanian yang berdaya Saing	1 Produktivitas hasil pertanian setara standar nasional	1 Masih rendahnya produktifitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1 Menganangkan dan mengawali program intensifikasi pertanian,	1 Mendorong terlaksananya intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pemanfaatan lahan untuk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan kehutanan,	1 Mewujudkan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil	1 Memantapkan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil	1 Memantapkan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil	1 Meningkatkan produktifitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 Pendapatan Perkapita Petani	2 Masih rendahnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian 3 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani 4 Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, 3 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani 4 Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan		2 Memantapkan industri pengolahan hasil pertanian 3 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan pertanian	2 Memantapkan industri pengolahan hasil pertanian 3 Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan	2 Kualitas dan kuantitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai Standar
	3 Adanya kawasan Agro Wisata	3 Masih Dalam Rintisan Kawasan Agrowisata			3 Merintis perwujudan kawasan agrowisata sawahlunto	4 Mewujudkan kawasan agrowisata Sawahlunto	4 Mengembangkan kawasan agrowisata Sawahlunto	

Sasaran Pokok	Indikator	Kondisi Awal Kinerja Pembangunan	Tahapan Kebijakan					Kondisi Akhir Kinerja Pembangunan
			2005-2008	2008-2013	2013-2018	2018-2023	2023-2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4 Jumlah Industri Pengolahan Hasil Pertanian	4 Jumlah Industri Pengolahan Hasil Pertanian Masih 2 Buah	5 Menganangkan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan di tingkat masyarakat	5 Mengoptimalkan pengolahan hasil pertanian di tingkat masyarakat	4 Mengarahkan dan mendirikan pengolahan hasil pertanian di tingkat masyarakat menjadi industri pengolahan 5 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola hasil pertanian	5 Meningkatkan Pemasaran Hasil Pengolahan Pertanian	5 Meningkatkan Pemasaran Hasil Pengolahan Pertanian	3 Terciptanya Kawasan Agrowisata

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 merupakan pedoman dalam :

1. Penyusunan Visi, Misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
2. RPJP Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 merupakan pedoman penyusunan RTRW Kota, RPJM Daerah, Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Sawahlunto.
3. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah daerah maupun antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
5. Mewujudkan tercapainya pelaksanaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
6. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) di Kota Sawahlunto berkewajiban untuk melaksanakan Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJP Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJP Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Sawahlunto serta Instansi Vertikal, masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peran masing-masing.
2. Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah berkewajiban mempedomani RPJP Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dengan menggerakkan semua potensi dan kekuatan Daerah.
3. Sekretaris Daerah berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJP Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Sawahlunto berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto yang merupakan jabaran setiap tahapan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan serta pendanaan.
5. Hasil pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terhadap implementasi rencana pembangunan jangka menengah dijadikan bahan masukan penyusun dokumen perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dilakukan paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi *Kota Sawahlunto yaitu Sawahlunto tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya* sangat tergantung pada peran aktif seluruh lapisan masyarakat serta sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan. Selain itu perlu didukung oleh komitmen dari pimpinan daerah yang akuntabel, kapabel, demokratis dan berkualitas serta konsistensi kebijakan pemerintahan daerah, ketatalaksanaan pemerintahan yang baik, keterlibatan dan peran serta masyarakat secara langsung dan nyata mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF